

**STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI
KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU (STUDI KASUS
KECAMATAN TAMBANG)**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Mendapatkan
Gelar Sarjana Pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Universitas Islam Riau*



OLEH:

**ARICK BAGUS PRASETYA
143410539**

**PROGRAM STUDI TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020

**STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI
KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU (STUDI KASUS
KECAMATAN TAMBANG)**



NAMA : ARICK BAGUS PRASETYA

NPM : 143410539

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2020

LEMBAR PENGESAHAN

**STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI
KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU (STUDI KASUS
KECAMATAN TAMBANG)**

TUGAS AKHIR


Disusun Oleh :

**ARICK BAGUS PRASETYA
NPM 143410539**

Disetujui Oleh :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Dr. Apriyan Dinata, M.Env


Ir. H. Firdaus, MP

Disahkan Oleh :

KETUA PROGRAM STUDI


Puji Astuti, ST.MT

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Arick Bagus Prasetya
Tempat/ Tgl Lahir : Bangkinang, 18 Desember 1996
NPM : 143410539
Alamat : Jl. Rezeki, Pasir Putih, Desa Baru
Kecamatan Siak Hulu – Kabupaten Kampar

Adalah mahasiswa Universitas Islam Riau yang terdaftar pada:

Fakultas : Teknik
Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota
Jenjang Pendidikan : S-1

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir yang saya tulis ini adalah Benar dan Asli dengan judul “**Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kampar Provinsi Riau (Studi Kasus Kecamatan Tambang)**”

Apabila di kemudian hari ada yang merasa dirugikan dan/atau menuntut karena Tugas Akhir saya ini menggunakan sebagian dari hasil tulisan atau karya orang lain (**Plagiat**) tanpa mencantumkan nama penulisnya, maka saya menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, September 2020



Arick Bagus Prasetya
143410539



**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH & KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

Jl. Kaharuddin Nasution 113 Marpoyan - Pekanbaru 28284 Telp. 0761-674635, 674674.

**SURAT KETERANGAN
PERSETUJUAN JILID TUGAS AKHIR**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, pembimbing tugas akhir menerangkan bahwa mahasiswa dengan :

Nama : Arick Bagus Prasetya
NPM : 143410539
Fakultas : Teknik
Jurusan : Perencanaan Wilayah dan Kota
Judul Tugas Akhir : Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kampar Provinsi Riau (Studi Kasus Kecamatan Tambang)

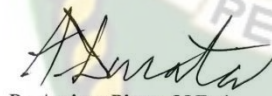
Telah memperbaiki dan menyempurnakan tugas akhir sesuai dengan berita acara komprehensif tugas akhir, dan selanjutnya disetujui untuk dijilid.

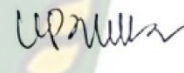
Demikianlah surat keterangan persetujuan jilid Tugas Akhir ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan baik dan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 28 Agustus 2020

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Aprivan Dinata, M.Env


Ir. H. Firdaus, MP

Penguji I

Penguji II


Puji Astuti, ST.MT


Rona Muliana, ST.MT



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS TEKNIK**

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284

Telp. +62 761 674674 Website: www.eng.uir.ac.id Email: fakultas_teknik@uir.ac.id

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Islam Riau, Pekanbaru, tanggal 23 Juni 2020, Nomor: 0612.C/KPTS/FT-UIR/2020, maka pada hari Jum'at, tanggal 26 Juni 2020, telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Riau, Jenjang Studi S1, Tahun Akademik 2019/2020 berikut ini.

1. Nama : Arick Bagus Prasetya
2. NPM : 143410539
3. Judul Skripsi : Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kampar Provinsi Riau (Studi Kasus Kecamatan Tambang)
4. Waktu Ujian : 13.00 WIB – Selesai
5. Tempat Pelaksanaan Ujian : Ruang Sidang Fakultas Teknik UIR

Dengan keputusan Hasil Ujian Skripsi:

~~Lulus~~*/ Lulus dengan Perbaikan*/ ~~Tidak Lulus~~*

* Coret yang tidak perlu.

Nilai Ujian:

Nilai Ujian Angka = 85,57 Nilai Huruf = A.....

Tim Penguji Skripsi.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Apriyan Dinata, M.Env	Ketua	1.
2	Ir. H. Firdaus, MP	Sekretaris	2.
3	Puji Astuti, ST., MT	Anggota	3.
4	Rona Muliana, ST., MT	Anggota	4.

Ketua,

Panitia Ujian
Sekretaris,

Dr. Apriyan Dinata, M.Env
NIDN. 1030046903

Ir. H. Firdaus, MP
NIDN. 1002056201

Pekanbaru, 26 Juni 2020
Mengetahui,
Dekan Fakultas Teknik

Dr. Eng. M. Glim, ST., MT
NIDN. 1016047901



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS TEKNIK**

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 2/2 /A-UIR/5-PWK/2020

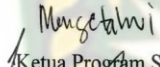
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Riau menerangkan bahwa Mahasiswa/i dengan identitas berikut:

Nama : **Arick Bagus Prasetya**
NPM : 14 341 0539
Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi / TA : Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Kampar Provinsi Riau (Studi kasus di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar)

Dinyatakan **Bebas Plagiat**, berdasarkan hasil pengecekan pada Turnitin menunjukkan angka **Similarity Index \leq 30%** sesuai dengan peraturan Universitas Islam Riau yang berlaku.


Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 15 Juli 2020 M
23 Dzulqae'dah 1441 H


Ketua Program Studi

Puji Astuti, ST., MT

Staf Pemeriksa Plagiat


M. Arif Mulyana, SE.Sy

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR ~~0411~~/KPTS/FT-UIR/2020
TENTANG PENGANGKATAN TIM PEMBIMBING PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS TEKNIK

- Membaca : Surat Ketua Program Studi Teknik Perencanaan Wilayah & Kota Nomor: 260/TA/PWK/FT/2020 tentang persetujuan dan usulan pengangkatan Tim Pembimbing penelitian dan penyusunan Skripsi.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk menyelesaikan perkuliahan bagi mahasiswa Fakultas Teknik perlu membuat Skripsi.
2. Untuk itu perlu ditunjuk Tim Pembimbing penelitian dan penyusunan Skripsi yang diangkat dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Mengangkat saudara-saudara yang namanya tersebut dibawah ini sebagai Tim Pembimbing Penelitian dan penyusunan Skripsi mahasiswa Fakultas Teknik Program Studi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota.

No	N a m a	Pangkat	Jabatan
1.	Dr. Apriyan Dinata, M., Env	Lektor	Pembimbing I
2.	Ir. H. Firdaus, MP	Asisten Ahli	Pembimbing II

2. Mahasiswa yang akan dibimbing :

N a m a : Arick Bagus Prasetya
NPM : 143410539
Program Studi : Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kampar Provinsi Riau
(Studi Kasus Kecamatan Tambang)

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan dikemudian hari segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 04 Ramadhan 1441 H
27 April 2020 M

Dekan,


Dr. Eng. Muslim, ST., MT

NPK : 09 11 02 374

Tembusan disampaikan :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru.
2. Yth. Sdr. Ketua Program Studi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota FT-UIR
3. Yang Bersangkutan .
4. Arsip



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 0612.C/KPTS/FT-UIR/2020
ENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA FAK. TEKNIK UNIV. ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS TEKNIK

- Menimbang : 1. Bahwa untuk menyelesaikan studi S.1 bagi mahasiswa Fakultas Teknik Univ. Islam Riau dilaksanakan Ujian Skripsi/Komprehensif sebagai tugas akhir. Untuk itu perlu ditetapkan mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian dimaksud serta dosen penguji.
2. Bahwa penetapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan dosen penguji yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.
8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Islam Riau yang tersebut namanya di bawah ini :
- Nama : Arick Bagus Prasetya
NPM : 143410539
Program Studi : Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kampar Provinsi Riau (Studi Kasus Kecamatan Tambang)
2. Penguji Skripsi/Komprehensif mahasiswa tersebut terdiri dari :
- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Dr. Apriyan Dinata, M.Env | Sebagai Ketua Merangkap Penguji |
| 2. Ir. H. Firdaus, MP | Sebagai Sekr. Merangkap Penguji |
| 3. Puji Astuti, ST., MT | Sebagai Anggota Merangkap Penguji |
| 4. Rona Muliana, ST., MT | Sebagai Anggota Merangkap Penguji |
3. Laporan hasil ujian serta berita acara telah sampai kepada Pimpinan Fakultas selambat-lambatnya 1(satu) bulan setelah ujian dilaksanakan.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan dikemudian hari segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 1 Dzulqa'dah 1441 H
23 Juni 2020 M



Dr. Eng. Muslim, ST., MT
NPK. 09 11 02 374

- Tembusan disampaikan :
1. Yth. Rektor UIR di Pekanbaru.
 2. Yth. Ketua Program Studi Teknik PWK FT-UIR.
 3. Yth. Pembimbing dan Penguji Skripsi.
 4. Mahasiswa yang bersangkutan.
 5. Arsip.

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
LEMBAGA DAKWAH ISLAM KAMPUS (LDIK)

SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 9806/LDIK-UIR/2020

Berdasarkan

Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 525/UJR/KPTS/2018
tentang Kewajiban Mahasiswa Muslim Universitas Islam Riau Bisa Membaca Al-Qur'an,
Lembaga Dakwah Islam Kampus (LDIK) Universitas Islam Riau menyatakan bahwa:

ARICK BAGUS PRASETYA

Nomor Pokok Mahasiswa : 143410539

Lahir di Bangkinang Tanggal Delapan Belas Desember Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam
Mahasiswa Prodi Teknik Planologi Fakultas Teknik Universitas Islam Riau
LULUS Tes Baca Al-Qur'an Dengan Predikat **Amat Baik**



Diuji Pada : 09.03.20

Pekanbaru, 10 Maret 2020



Dr. H. Zulhelmy, S.E., M. Si., Ak. C.A
NPK : 98-07-02-272


UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jl. Kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan Telp (0761) 72126 - 674884, Fax (0761) 674834 Pekanbaru - Riau. 20284

DAFTAR PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA

Nama : ARICK BAGUS PRASETYA
 Tempat/Tgl.Lahir : BANGKINANG / 18 Desember 1996
 NPM : 143410539
 Fakultas : Fakultas Teknik
 Program Studi : Teknik Perencanaan Wilayah Dan kota
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)

KODE MK	MATA KULIAH	NILAI	AM	K	KM
PW12001	AL ISLAM I / ISLAMIC I	A	4	2	8
TK12005	BAHASA INDONESIA / INDONESIAN LANGUAGE	B	3	2	6
PW12007	GAMBAR TEKNIK PERENCANAAN / DESIGN TO PLANNING ENGINEERING	A	4	2	8
PW12004	IT (TEKNOLOGI INFORMASI) / INFORMATION TECHNOLOGY	A	4	2	8
PW 12006	KALKULUS I / CALCULUS I	C	2	2	4
PW12003	KIMIA FISIKA LINGKUNGAN / ENVIRONMENTAL CHEMISTRY AND PHYSICS	C	2	2	4
TK12007	PENDIDIKAN PANCASILA / PANCASILA	A	4	2	8
TP1341108X	PENGANTAR EKONOMI / INTRODUCTION TO ECONOMICS	B	3	3	9
TP1341108	PENGANTAR PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / INTRODUCTION TO URBAN AND REGIONAL PLANNING	B	3	3	9
PW12002	SISTEM SOSIAL / SOCIAL SYSTEM	A-	3,67	2	7,34
PW 22009	AL-ISLAM II / ISLAMIC II	A-	3,67	2	7,34
PW 23013	EKONOMI WILAYAH DAN KOTA / URBAN AND REGIONAL ECONOMIC	B+	3,33	3	9,99
PW 23016	IDENTIFIKASI & TEKNIK PRESENTASI / IDENTIFICATION AND PRESENTATION TECHNIQUES	A	4	3	12
PW 22010	KALKULUS II / CALCULUS II	B+	3,33	2	6,66
PW 22011	KOMPUTER PERENCANAAN / PLANNING COMPUTATION	A	4	2	8
TK12008	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN / CITIZENSHIP	A	4	2	8
PW 23014	PENGANTAR PROSES PERENCANAAN / INTRODUCTION TO PLANNING PROCESS	A-	3,67	3	11,01
PW 21012	PRAKTIKUM KOMPUTER PERENCANAAN / PLANNING COMPUTATION PRACTICUM	A-	3,67	1	3,67
PW 22015	STATISTIK I / STATISTICS I	C	2	2	4
PW 32022	A M D A L / ENVIRONMENTAL IMPACT ANALYSIS	B	3	2	6
PW 32024	ANALISA LOKASI DAN POLA KERUANGAN / LOCATIONAL AND SPATIAL ANALYSIS	B+	3,33	3	9,99
PW 32020	ILMU UKUR TANAH / CARTOGRAPHY	C	2	2	4
PW 33019	PENGANTAR TRANSPORTASI / INTRODUCTION TO TRANSPORTATION	B	3	3	9
PW 33017	PERMUKIMAN KOTA / URBAN SETTLEMENT	B	3	3	9
PW 31021	PRAKTIKUM ILMU UKUR TANAH / CARTOGRAPHY PRACTICUM	B	3	1	3
PW 32018	STATISTIK II / STATISTICS II	C	2	2	4
PW 33025	TATA GUNA DAN PENGEMBANGAN LAHAN / LANDUSE PLANNING AND LAND DEVELOPMENT	B-	2,67	3	8,01
PW 32023	TEORI PERENCANAAN I / PLANNING THEORY I	D+	3,33	2	6,66
PW 43028	GEOLOGI LINGKUNGAN / ENVIRONMENTAL GEOLOGY	A	4	3	12
PW 42027	KEPENDUDUKAN / POPULATION STUDIES	B+	3,33	2	6,66
PW 43026	METODE ANALISIS PERENCANAAN / PLANNING ANALYSIS METHODOLOGY	B+	3,33	3	9,99
PW 43029	PERENCANAAN DESA TERPADU / INTEGRATED RURAL PLANNING	A-	3,67	3	11,01
PW 42032	PSIKOLOGI LINGKUNGAN / ENVIRONMENTAL PSYCHOLOGY	A	4	2	8

PW 43030	SISTEM INFORMASI PERENCANAAN / <i>PLANNING INFORMATION SYSTEM</i>	B	3	3	9
PW 44033	STUDIO PERMUKIMAN KOTA / <i>STUDIO OF URBAN SETTLEMENT</i>	A-	3,67	4	14,68
PW 42031	TEORI PERENCANAAN II / <i>PLANNING THEORY II</i>	A-	3,67	2	7,34
PW 53035	ANALISIS SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN / <i>RESOURCE AND ENVIRONMENTAL ANALYSIS</i>	B	3	3	9
PW 53038	MASALAH PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN / <i>DEVELOPMENT AND PLANNING PROBLEMS</i>	A-	3,67	3	11,01
PW 53037	PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN / <i>DEVELOPMENTAL FINANCING</i>	B	3	3	9
PW 52041	PERENCANAAN KAWASAN PARIWISATA / <i>TOURISM ZONE PLANNING</i>	A-	3,67	2	7,34
PW 53039	PERENCANAAN KOTA / <i>URBAN PLANNING</i>	A-	3,67	3	11,01
PW 53034	PERENCANAAN TRANSPORTASI / <i>TRANSPORTATION PLANNING</i>	C+	2,33	3	6,99
PW 53035	PRASARANA WILAYAH DAN KOTA / <i>URBAN AND REGIONAL INFRASTRUCTURE</i>	A	4	3	12
PW 54040	STUDIO PERENCANAAN DESA / <i>STUDIO OF RURAL PLANNING</i>	A	4	4	16
PW 62044	BAHASA INGGRIS TEKNIK / <i>ENGLISH FOR ENGINEERING</i>	B-	2,67	2	5,34
PW 63045	HUKUM DAN ADMINISTRASI PERENCANAAN / <i>PLANNING LAW AND ADMINISTRATION</i>	A-	3,67	3	11,01
PW 62043	KEWIRAUSAHAAN / <i>ENTERPRENUERSHIP</i>	A-	3,67	2	7,34
PW 62047	MANAJEMEN LAHAN / <i>LAND MANAGEMENT</i>	B-	2,67	2	5,34
PW 62050	MENAJEMEN PEMBANGUNAN / <i>DEVELOPMENTAL MANAGEMENT</i>	B+	3,33	2	6,66
PW 64049	PENGELOLAAN TRANSPORTASI / <i>TRANSPORTATION MANAGEMENT</i>	B	3	4	12
PW 63046	PERENCANAAN WILAYAH / <i>REGIONAL PLANNING</i>	A-	3,67	3	11,01
PW 64048	STUDIO PERENCANAAN KOTA / <i>STUDIO OF URBAN PLANNING</i>	A-	3,67	4	14,68
PW 72054	ETIKA PROFESI / <i>PROFESSIONAL ETHICS</i>	B	3	2	6
PW 72056	KERJA PRAKTEK / <i>INTERNSHIP</i>	A	4	2	8
PW 72055	METODOLOGI PENELITIAN / <i>RESEARCH METHODOLOGY</i>	B	3	2	6
PW 74057	STUDIO PERENCANAAN WILAYAH / <i>STUDIO OF REGIONAL PLANNING</i>	B	3	4	12
PW 73053	TEKNIK EVALUASI PERENCANAAN / <i>PLANNING EVALUATION TECHNIQUES</i>	B+	3,33	3	9,99
PW 72052	TEKNOLOGI ISLAMI / <i>ISLAMIC TECHNOLOGY</i>	A	4	2	8
PW 84060	TUGAS AKHIR / <i>THESIS</i>	A	4	4	16
		Jumlah		150	502,07
		IPK		3,35	



18 Agustus 2020

DR. Kurma Hastuti, S.T., M.T

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan salah satu masalah serius dalam proses pembangunan. Pemerintah telah berupaya memperkenalkan berbagai program yang melibatkan sejumlah pakar kemiskinan nyatanya belum mampu mengentaskan kemiskinan secara menyeluruh. Kecamatan Tambang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kampar yang memiliki angka kemiskinan tertinggi, maka dari itu dibutuhkan strategi penanggulangan kemiskinan guna mengurangi angka kemiskinan di masa yang akan datang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik kemiskinan, faktor-faktor kemiskinan, dan untuk merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan. Metode yang digunakan untuk mengetahui karakteristik kemiskinan adalah metode deskriptif. Metode yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor kemiskinan adalah regresi linear berganda. Sedangkan, metode merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan adalah *logical framework analysis* (LFA).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa lima variabel berpengaruh terhadap kemiskinan dengan tingkat perhitungan terbesar yaitu, status pekerjaan dengan nilai t hitung 3,452, modal usaha dengan nilai t hitung 3,175, tingkat pendidikan dengan nilai t hitung 3,030, pendapatan dengan nilai t hitung 1,455, dan jumlah tanggungan keluarga dengan nilai t hitung -2,135. Hasil dari analisis LFA menjelaskan bahwa program kemiskinan yang telah dilakukan masih belum maksimal dalam mengurangi angka kemiskinan di Kecamatan Tambang, sehingga strategi yang dibutuhkan dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Tambang adalah peningkatan kualitas dan partisipasi pendidikan, peningkatan keahlian dan mengubah persepsi masyarakat dalam bekerja, peningkatan partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana (KB), memperkuat kebijakan terhadap perusahaan dan melakukan pengawasan kepada masyarakat yang melakukan intervensi kepada perusahaan.

Kata kunci : Kemiskinan, Karakteristik, Faktor-faktor, Strategi, Kecamatan Tambang

ABSTRACT

Poverty is a serious problem in the development process. The government has tried to introduce various programs that involve a number of poverty experts, in fact they have not been able to eradicate poverty as a whole. Tambang is one of the sub-districts in Kampar District that has the highest poverty rate, therefore a poverty reduction strategy is needed to reduce poverty in the future. The purpose of this study is to determine the characteristics of poverty, poverty factors, and to formulate poverty reduction strategies. The method used to determine the characteristics of poverty is a descriptive method. The method used to determine poverty factors is multiple linear regression. Meanwhile, the method of formulating poverty reduction strategies is logical framework analysis (LFA). Based on the results of the study shows that the five variables affect poverty with the greatest level of calculation, namely, employment status with a value of t arithmetic 3.452, capital limitations with a value of t arithmetic 3.175, education level with a value of arithmetic 3.030, income with a value of arithmetic 1.455, and the amount dependents of the family with a t value of -2.135. The results of the LFA analysis explain that the poverty program that has been carried out is still not maximized in reducing poverty in the Tambang District, so the strategies needed in poverty reduction in the Tambang District are improving the quality and participation of education, increasing expertise and changing people's perceptions at work, increasing participation the community in the family planning (KB) program, strengthening the policy towards the company and supervising the community who intervene in the company.

Keywords: Poverty, poverty characteristics, poverty main causes, poverty reduction strategy, Kecamatan Tambang

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah سبحانه وتعالى yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kampar Provinsi Riau (Studi Kasus Kecamatan Tambang)”. Penyusunan skripsi merupakan hasil penelitian dalam memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Riau.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL, selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Eng. Muslim, ST.MT, selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Islam Riau.
3. Ibuk Puji Astuti, ST.MT, selaku Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Riau.
4. Bapak Muhammad Shofwan, ST.MT, selaku Sekretaris Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Riau.
5. Bapak Dr. Apriyan Dinata, M.Env dan Bapak Ir. H. Firdaus, MP, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan penulis mulai awal penelitian, memberikan saran dan arahan kepada penulis hingga skripsi ini selesai dengan baik.
6. Ibuk Puji Astuti, ST.MT dan Ibuk Rona Muliana, ST.MT selaku Dosen Penguji.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menjadi Mahasiswa di Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Riau.
8. Semangat dan do'a dari kedua orangtua tercinta ayahanda Peltu Ali Basri dan ibunda Zurbanita serta kakak-adik tersayang Ikromulhadi Al Arif, S.Kom, Arizta Nanda Putri, SKM, M.Si, Aria Bagas Bimantara, Ariqoh Bintang

Saputra, dalam menyelesaikan pendidikan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Riau.

9. Kepada Istriku tercinta Rise Desva Sari, S.Pd yang selalu memberi dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada seluruh sahabat-sahabat terbaik Hanafi Hidayat, ST, Herri Putra, Faisal alfahreza, ST, Iqbal Nurdiansyah, ST, Roihan, ST, yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan dan pihak terkait dengan penelitian ini serta memicu munculnya penelitian-penelitian yang lain untuk kemajuan ilmu pengetahuan pada masa mendatang. Atas perhatian dan bantuan seluruh pihak, diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, September 2020

Arick Bagus Prasetya

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Ruang Lingkup.....	8
1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah.....	8
1.5.2 Ruang Lingkup Materi.....	12
1.6 Hipotesis Penelitian.....	12
1.7 Kerangka Berfikir.....	13
1.8 Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Konsepsi Dasar Kemiskinan.....	17
2.1.1 Definisi Kemiskinan.....	17
2.1.2 Kemiskinan dan Kemanusiaan.....	20
2.2 Pandangan Tentang Kemiskinan.....	21
2.2.1 Pandangan Konservatif.....	22
2.2.2 Pandangan Liberal.....	23
2.2.3 Pandangan Transformatif.....	24
2.3 Indikator Kemiskinan.....	25
2.4 Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan.....	29
2.4.1 Faktor Sosial Ekonomi.....	29
2.4.1.1 Tingkat Pendidikan.....	29
2.4.1.2 Status Pekerjaan.....	31
2.4.1.3 Keterbatasan Modal.....	32
2.4.1.4 Jumlah Tanggungan Keluarga.....	32

2.4.1.5 Pendapatan.....	34
2.5 Karakteristik Kemiskinan.....	36
2.6 Teori Strategi Dalam Mengatasi Kemiskinan	47
2.7 Perencanaan Pembangunan Belum Dapat Mengatasi Kemiskinan	49
2.8 Pembangunan dan Kemiskinan	51
2.9 Penelitian Terdahulu	54

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian	57
3.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian	58
3.2.1 Jenis Data Penelitian.....	58
3.2.2 Sumber Data Penelitian	59
3.3 Tahapan Penelitian.....	59
3.3.1 Tahap Persiapan	59
3.3.2 Tahap Pengumpulan Data.....	61
3.4 Populasi dan Teknik Sampel	62
3.4.1 Populasi.....	62
3.4.2 Teknik Sampel	62
3.5 Teknik Analisis.....	64
3.5.1 Karakteristik Kemiskinan	65
3.5.2 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kemiskinan	65
3.5.3 Strategi Penanggulangan Kemiskinan.....	69
3.6 Variabel Penelitian.....	71
3.7 Desain Penelitian	73

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Kampar.....	76
4.1.1 Luas Wilayah dan Batas Administrasi	77
4.1.2 Letak dan Kondisi Geografi.....	80
4.1.3 Klimatologi	82
4.1.4 Kependudukan	82
4.1.5 Penggunaan Lahan	85
4.2 Gambaran Umum Kecamatan Tambang.....	86
4.2.1 Kondisi Geografis	86
4.2.2 Kondisi Alam	91
4.2.3 Kependudukan	91
4.2.4 Pendidikan	97
4.2.5 Kesehatan.....	99
4.2.6 Ekonomi.....	102

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	106
5.1 Karakteristik Kemiskinan di Kecamatan Tambang.....	106
5.1.1 Kesehatan.....	106
5.1.1.1 Penolong Persalinan di Kecamatan Tambang	107
5.1.1.2 Vaksinasi di Kecamatan Tambang.....	108
5.1.1.3 Jaminan Kesehatan di Kecamatan Tambang	110
5.1.2 Pendidikan.....	111
5.1.2.1 Partisipasi Pendidikan di Kecamatan Tambang.....	112
5.1.3 Standar Hidup	121
5.1.3.1 Analisis Sanitasi di Kecamatan Tambang	121
5.1.3.2 Analisis Air Minum di Kecamatan Tambang	125
5.1.3.3 Analisis Jaringan Listrik di Kecamatan Tambang	129
5.1.3.4 Analisis Kondisi Rumah di Kecamatan Tambang	129
5.2 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kemiskinan.....	133
5.2.1 Status Pekerjaan	133
5.2.2 Pendapatan Perbulan	134
5.2.3 Jumlah Tanggungan Keluarga	135
5.2.4 Tingkat Pendidikan.....	137
5.2.5 Modal Usaha	138
5.2.6 Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan	139
5.2.7 Uji Parsial (Uji T).....	142
5.3 Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Tambang.....	144
5.3.1 Analisis Situasi.....	145
5.3.2 Analisis Pemangku Kepentingan	146
5.3.3 Analisis Stakeholder	149
5.3.4 Analisis Permasalahan	153
5.3.4.1 Analisis Permasalahan Hasil Penelitian	153
5.3.4.2 Analisis Permasalahan Stakeholder	154
5.3.4.3 Analisis Program Yang Belum Terimplementasi	158
5.3.5 Analisis Tujuan	161
BAB VI PENUTUP	165
6.1 Kesimpulan.....	165
6.2 Saran	168
DAFTAR PUSTAKA	169
LAMPIRAN	172-192

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Indikator Utama Kemiskinan.....	28
Tabel 2.2 Sintesis Faktor Tingkat Pendidikan.....	31
Tabel 2.3 Sintesis Faktor Pekerjaan.....	32
Tabel 2.4 Sintesis Faktor Pendapatan	35
Tabel 2.5 Indikator Kemiskinan	39
Tabel 2.6 Penelitian Sebelumnya	55
Tabel 3.1 Definisi Operasional.....	68
Tabel 3.2 Stakeholder yang Terlibat.....	71
Tabel 3.3 Variabel Penelitian	72
Tabel 3.4 Desain Penelitian.....	74
Tabel 4.1 Jumlah Desa Menurut Kecamatan di Kabupaten Kampar 2017	78
Tabel 4.2 Luas Wilayah Kabupaten Kampar Menurut Kecamatan 2017	79
Tabel 4.3 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk	84
Tabel 4.4 Luas Tanah Menurut Penggunaan Tahun 2017	85
Tabel 4.5 Luas Wilayah Kecamatan Menurut Desa Tahun 2017.....	87
Tabel 4.6 Jarak Lurus Desa ke Pusat Kecamatan Tahun 2017	89
Tabel 4.7 Jumlah Penduduk Menurut Desa di Kecamatan Tambang 2017	92
Tabel 4.8 Rata-rata Jumlah Penduduk Perumah Tangga Menurut Desa 2017.....	93
Tabel 4.9 Kepadatan Penduduk Menurut Desa di Kec Tambang 2017.....	95
Tabel 4.10 Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Tambang 2017.....	98
Tabel 4.11 Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Tambang 2017	99
Tabel 4.12 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kecamatan Tambang 2017	101
Tabel 4.13 Luas Panen Sayur-sayuran di Kecamatan Tambang 2013-2016.....	102

Tabel 4.14 Jumlah Usaha Industri di Kecamatan Tambang 2016	104
Tabel 4.15 Jumlah Usaha Perdagangan di Kecamatan Tambang 2016	105
Tabel 5.1 Penolong Persalinan Tenaga Kesehatan di Kab Kampar 2017	108
Tabel 5.2 Cakupan Vaksinasi di Kabupaten Kampar 2017	109
Tabel 5.3 Jumlah Sekolah Dasar Menurut Desa di Kec Tambang 2016	113
Tabel 5.4 Jumlah Murid SD Menurut Desa di Kec Tambang 2016	114
Tabel 5.5 Jumlah SLTP Menurut Desa di Kec Tambang 2016.....	115
Tabel 5.6 Jumlah Murid SLTP Menurut Desa di Kec Tambang 2016	116
Tabel 5.7 Jumlah SLTA Menurut Desa di Kec Tambang 2016	118
Tabel 5.8 Jumlah Murid SLTA Menurut Desa di Kec Tambang 2016	119
Tabel 5.9 Layanan Air Limbah Domestik di Perkotaan Kec Tambang.....	123
Tabel 5.10 Layanan Air Limbah Domestik di Pedesaan Kec Tambang.....	123
Tabel 5.11 SPAM Exsisting Bukan Jaringan Perpipaan.....	126
Tabel 5.12 Daftar Kegiatan Pamsimas di Kecamatan Tambang	126
Tabel 5.13 Kegiatan Program Pamsimas di Kecamatan Tambang	127
Tabel 5.14 Kondisi Jaringan Listrik di Kecamatan Tambang.....	129
Tabel 5.15 Data Kondisi Permukiman di Kecamatan Tambang	130
Tabel 5.16 Daftar Rumah Mendapat Bantuan Stimulant di Kec Tambang	131
Tabel 5.17 Kondisi Bangunan Rumah di Kawasan Permukiman	132
Tabel 5.18 Status Pekerjaan Responden di Kecamatan Tambang.....	133
Tabel 5.19 Pendapatan Perbulan Responden di Kecamatan Tambang.....	134
Tabel 5.20 Status Rumah Tangga Responden di Kecamatan Tambang	135
Tabel 5.21 Jumlah Tanggungan Rumah Tangga Miskin di Kec Tambang.....	136
Tabel 5.22 Tingkat Pendidikan Rumah Tangga Miskin di Kec Tambang.....	137
Tabel 5.23 Jumlah Responden yang Memiliki Keterbatasan Modal.....	138
Tabel 5.24 Hasil Estimasi Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan ...	140

Tabel 5.25 Hasil Uji t.....	143
Tabel 5.26 Identifikasi <i>Stakeholder</i> yang Terlibat	149
Tabel 5.27 Analisis Kepentingan (<i>interest</i>).....	150
Tabel 5.28 Hasil Wawancara Instansi.....	151

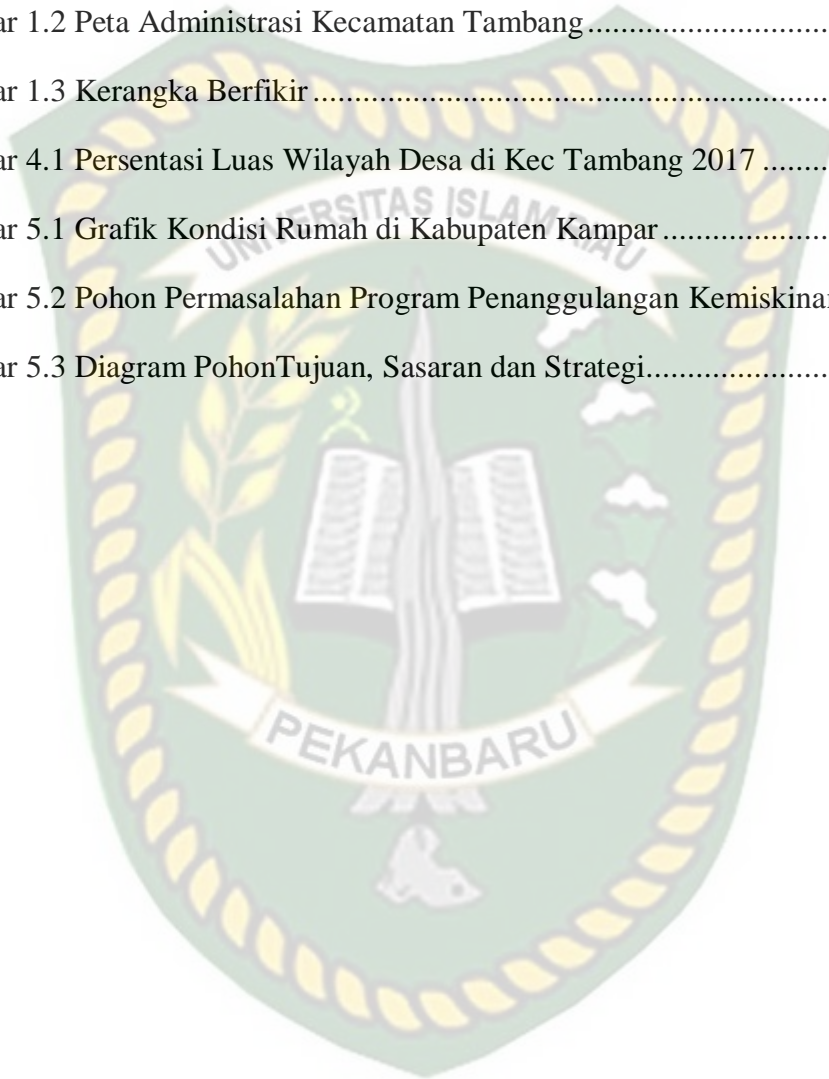


DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Kampar	10
Gambar 1.2 Peta Administrasi Kecamatan Tambang	11
Gambar 1.3 Kerangka Berfikir	14
Gambar 4.1 Persentasi Luas Wilayah Desa di Kec Tambang 2017	88
Gambar 5.1 Grafik Kondisi Rumah di Kabupaten Kampar	132
Gambar 5.2 Pohon Permasalahan Program Penanggulangan Kemiskinan	160
Gambar 5.3 Diagram Pohon Tujuan, Sasaran dan Strategi	164

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hall dan Midgley (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi deprivasi materi dan sosial yang menyebabkan individu hidup di bawah standar kehidupan yang layak, atau kondisi dimana individu mengalami deprivasi relatif dibandingkan dengan individu lain dalam masyarakat secara ekonomi. Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Sumber daya dalam konteks ini menyangkut tidak hanya aspek finansial, melainkan pula semua jenis kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas.

Suparlan (2014) mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang rendah ini secara langsung nampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga diri mereka yang tergolong sebagai orang miskin.

Menurut Ritonga (2003) bahwa kemiskinan adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi kehidupannya. Kebutuhan dasar minimal yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan kebutuhan pangan, sandang, perumahan dan kebutuhan sosial yang diperlukan oleh penduduk atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

Kemiskinan identik dengan orang yang serba kekurangan, keterbelakangan, ketidak mampuan dalam mencukupi kebutuhan, pendidikan rendah, penyakit karena tidak mampu membiayai biaya kesehatan, status lemah dalam bermasyarakat, serta tidak memiliki tabungan untuk masa depan. Dari segi fisik kemiskinan identik dengan tempat tinggal di daerah pedesaan, pesisir pantai, bantaran sungai yang keruh, kotor dan rumah kumuh. Bahkan kemiskinan dapat menyebabkan seseorang gelap mata sehingga melakukan beragam hal negatif untuk mencukupi kebutuhan, misalnya pelacuran, pencurian, penipuan, bunuh diri, dan banyak hal lain akibat dari kemiskinan yang membelenggu.

Setiap permasalahan timbul pasti karena ada faktor yang mengiringinya yang menyebabkan timbulnya sebuah permasalahan, begitu juga dengan masalah kemiskinan yang dihadapi oleh negara Indonesia. Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan yaitu : pendidikan yang terlampaui rendah, malas bekerja, keterbatasan sumber alam, terbatasnya lapangan kerja, keterbatasan modal, beban keluarga (Hudyana, 2009).

Adapun menurut Suryawati (2004) ada beberapa bentuk-bentuk kemiskinan yaitu: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan struktural, kemiskinan situasional atau kemiskinan natural, dan kemiskinan kultural. Menurut Baswir (2003) berdasarkan penyebabnya kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu ; kemiskinan natural, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktur.

Islam memandang bahwa masalah kemiskinan adalah masalah tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer secara menyeluruh. Syariat Islam telah menentukan kebutuhan primer itu (yang menyangkut eksistensi manusia) berupa tiga hal, yaitu sandang, pangan, dan papan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَرَأَيْتَ الَّذِي يَكْذِبُ بِالذِّينِ ﴿١﴾ فذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا
يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٣﴾ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ
صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ الَّذِينَ هُمْ يَرَاءُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ
الْمَاعُونَ ﴿٧﴾

“(1)Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? (2)maka itulah orang yang menghardik anak yatim (3)dan tidak mendorong memberi makan orang miskin (4)Maka celakalah orang yang salat, (5)yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya, (6)yang berbuat riya (7)dan enggan memberikan bantuan” (QS Al-Ma’un 1-7).

Kemiskinan di negara sedang berkembang menjadi masalah yang sangat rumit diselesaikan meskipun kebanyakan negara-negara ini sudah berhasil melaksanakan pembangunan ekonominya dengan tingkat pertumbuhan produksi dan pendapatan nasional yang tinggi, namun pada saat yang bersamaan telah terjadi peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan antara kelompok kaya dan kelompok miskin, sehingga kemiskinan relative semakin meningkat terutama di wilayah pedesaan.

Dewasa ini kemiskinan menjadi masalah utama dalam proses pelaksanaan pembangunan di daerah pedesaan, karena sebagian besar penduduk miskin tinggal di

daerah pedesaan dan karakteristik penyebab kemiskinan struktural yang dialami sangat banyak. Selain itu kebijakan pemerintah yang mengalokasikan anggaran pembangunan yang lebih besar di daerah perkotaan daripada daerah pedesaan, merupakan salah satu faktor penyebab daerah pedesaan semakin tertinggal dan kemiskinan struktural semakin bertambah di daerah pedesaan.

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Maraknya kegiatan dan perencanaan pembangunan belum sepenuhnya mampu mensejahterakan bangsa dan negara. Pembangunan di berbagai sektor juga belum dapat menampung dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dapat kita lihat bahwa hingga kini masalah kemiskinan belum bisa di tanggulangi dengan baik. Bahkan semakin maraknya pembangunan semakin menambah deret kemiskinan di negeri ini.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah serius dalam proses pembangunan nasional di Indonesia. Masalah ini seolah-olah tidak dapat dituntaskan secara serius, padahal upaya pemerintah telah memperkenalkan berbagai paket dan program yang melibatkan sejumlah pakar kemiskinan nasional dan internasional. Hakekatnya belum ada keberlanjutan sistem penanganan kemiskinan baik dalam satu rezim kekuasaan maupun pada saat peralihan rezim.

Kabupaten Kampar merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Riau, dan merupakan salah satu Kabupaten tertua yang ada di Provinsi Riau, namun Kabupaten Kampar masih banyak mengalami permasalahan terutama masalah kemiskinan. Total penduduk Kabupaten Kampar sebanyak 812.702 jiwa dan

masyarakat yang menerima bantuan kemiskinan menurut basis data terpadu sebanyak 257.179 jiwa (BPS, 2018).

Adapun kemiskinan di Kecamatan Tambang terbilang tinggi. Kecamatan Tambang adalah kecamatan yang terletak di Kabupaten Kampar. Menurut basis data terpadu Kabupaten Kampar 2018, Kecamatan Tambang merupakan salah satu kecamatan yang mendapatkan dana bantuan miskin tertinggi di Kabupaten Kampar dengan jumlah penerima bantuan miskin sebanyak 21.637 jiwa dari total penduduk sebanyak 79.326 jiwa (BPS, 2018). Artinya terdapat 27% masyarakat miskin yang berada di Kecamatan Tambang, untuk klasifikasi tingkat kemiskinan, daerah dengan persentase kemiskinan 0% - 11,54% dikategorikan rendah, daerah dengan persentase 11,54% - 18,21% dikategorikan sedang dan daerah dengan persentase diatas 18,21% dikategorikan tinggi. Maka untuk Kecamatan Tambang termasuk kategori tinggi.

Untuk keluar dari kemiskinan, tentu terlebih dahulu harus mengetahui karakteristik kemiskinan yang ada di Kecamatan Tambang dan juga mengetahui faktor-faktor apa saja penyebab terjadinya kemiskinan di Kecamatan Tambang. Hal ini tentu mengacu kepada teori-teori yang sudah ada sehingga dapat diketahui faktor apa saja yang menyebabkan kemiskinan.

Berdasarkan pemaparan diatas, untuk itu penulis memberi penelitian ini dengan judul “*Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kampar (studi kasus di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar).*”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan pokok di daerah studi dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Tingginya angka kemiskinan di Kecamatan Tambang sangat berakibat terhadap laju pertumbuhan ekonomi, hal ini juga berimbas terhadap pembangunan wilayah, dan belum terpirincinya karakteristik kemiskinan seperti apa yang terjadi di Kecamatan Tambang.
- b. Tingginya angka kemiskinan di Kecamatan Tambang sangat mempengaruhi sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Tambang, seperti tingkat pendidikan, status pekerjaan, pendapatan, jumlah tanggungan, dan keterbatasan modal merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan.
- c. Kurangnya penanganan serius terhadap penanggulangan kemiskinan yang ada di Kecamatan Tambang sehingga angka kemiskinan yang semakin tinggi di Kecamatan Tambang, berdasarkan basis data terpadu Kampar 2018 angka masyarakat miskin di Kecamatan Tambang sebanyak 21.637 jiwa dari total penduduk sebanyak 79.326 jiwa.

Bertitik tolak dari rumusan masalah, maka pertanyaan penelitian/*research question* yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik kemiskinan di Kecamatan Tambang?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kecamatan Tambang?

3. Bagaimana rumusan strategi penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Tambang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui karakteristik kemiskinan di Kecamatan Tambang.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kecamatan Tambang.
- c. Untuk merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Tambang.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk:

- a. Pihak Pemerintah
Bahan masukan yang bermanfaat dalam upaya menanggulangi kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Kampar khususnya di Kecamatan Tambang sehingga menjadi masukan untuk meningkatkan strategi guna mengurangi angka kemiskinan.
- b. Pihak Akademis

Bahan perbandingan (komparasi) terhadap hasil penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya, dalam konteks untuk meningkatkan dan pendalaman pengetahuan tentang strategi penanggulangan kemiskinan. diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis

serta dapat menjadi referensi yang dapat diajukan sebagai bahan percontohan bagi penelitian yang sama selanjutnya.

c. Peneliti

Agar apa yang telah dilakukan selama penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam rangka memperdalam dan mengembangkan ilmu pengetahuan tentang strategi penanggulangan kemiskinan serta memberikan pengalaman langsung dalam pelaksanaan dan penulisan penelitian serta menyusun hasil penelitian.

1.5 Ruang Lingkup

Dalam studi penelitian ini ruang lingkup yang digunakan meliputi ruang lingkup wilayah studi dan ruang materi, ruang lingkup materi bertujuan membatasi materi pembahasan sedangkan ruang lingkup wilayah bertujuan untuk membatasi lingkup wilayah kajian.

1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah Studi

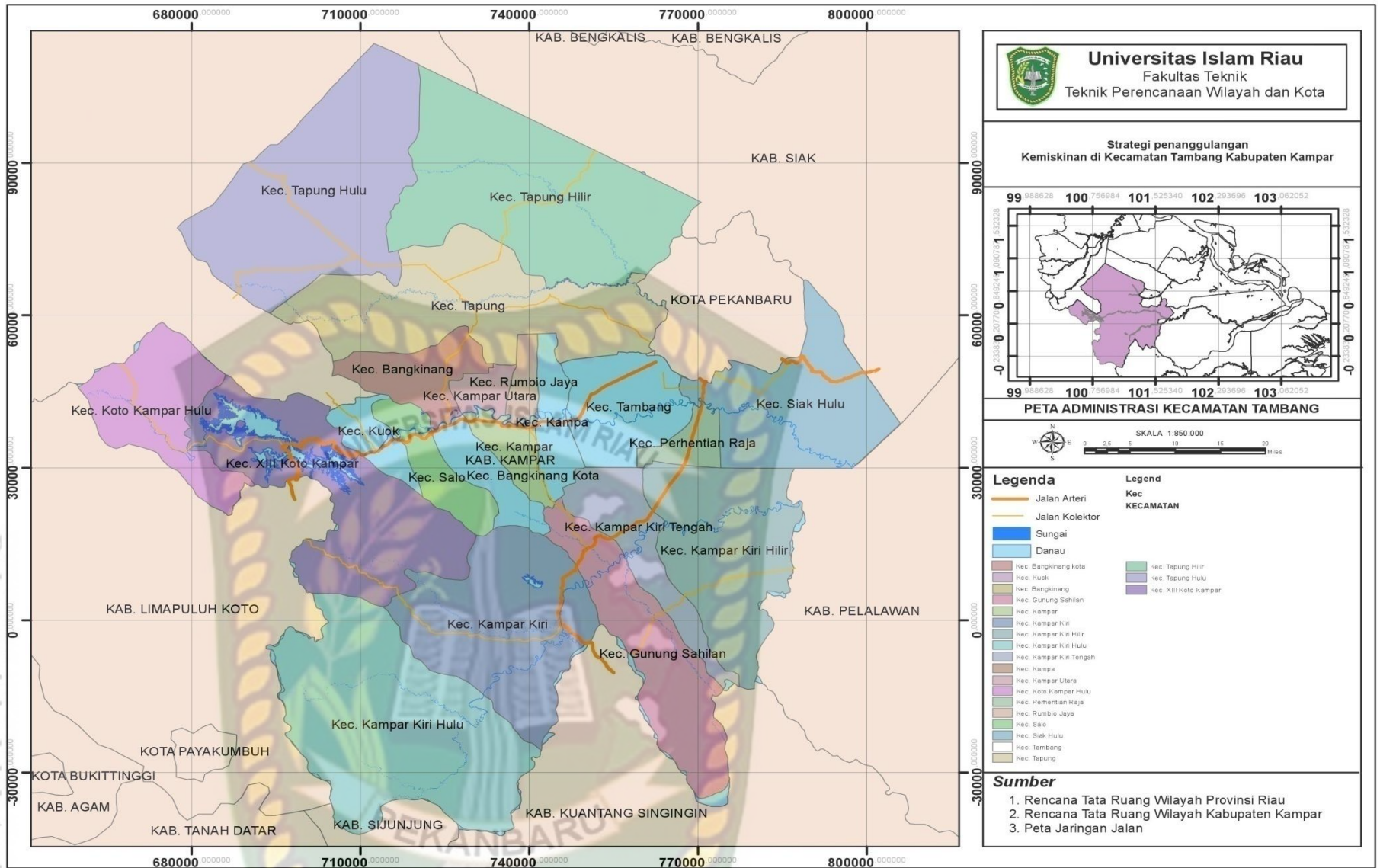
Kecamatan Tambang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kampar yang luas wilayah menurut pengukuran kantor camat Tambang adalah lebih kurang 489,91 km² atau 53,298 Ha, mempunyai 17 desa dengan pusat pemerintah berada di Desa Sungai Pinang. Kecamatan Tambang tidak ada wilayahnya yang berbatasan dengan laut, namun sebageian wilayahnya yang berbatasan dengan sungai, sebagai batas alam dengan kecamatan lain. Sebanyak 12 dari 17 desa di Kecamatan Tambang

dilintasi oleh Sungai Kampar yang merupakan salah satu sungai terbesar di Kabupaten Kampar.

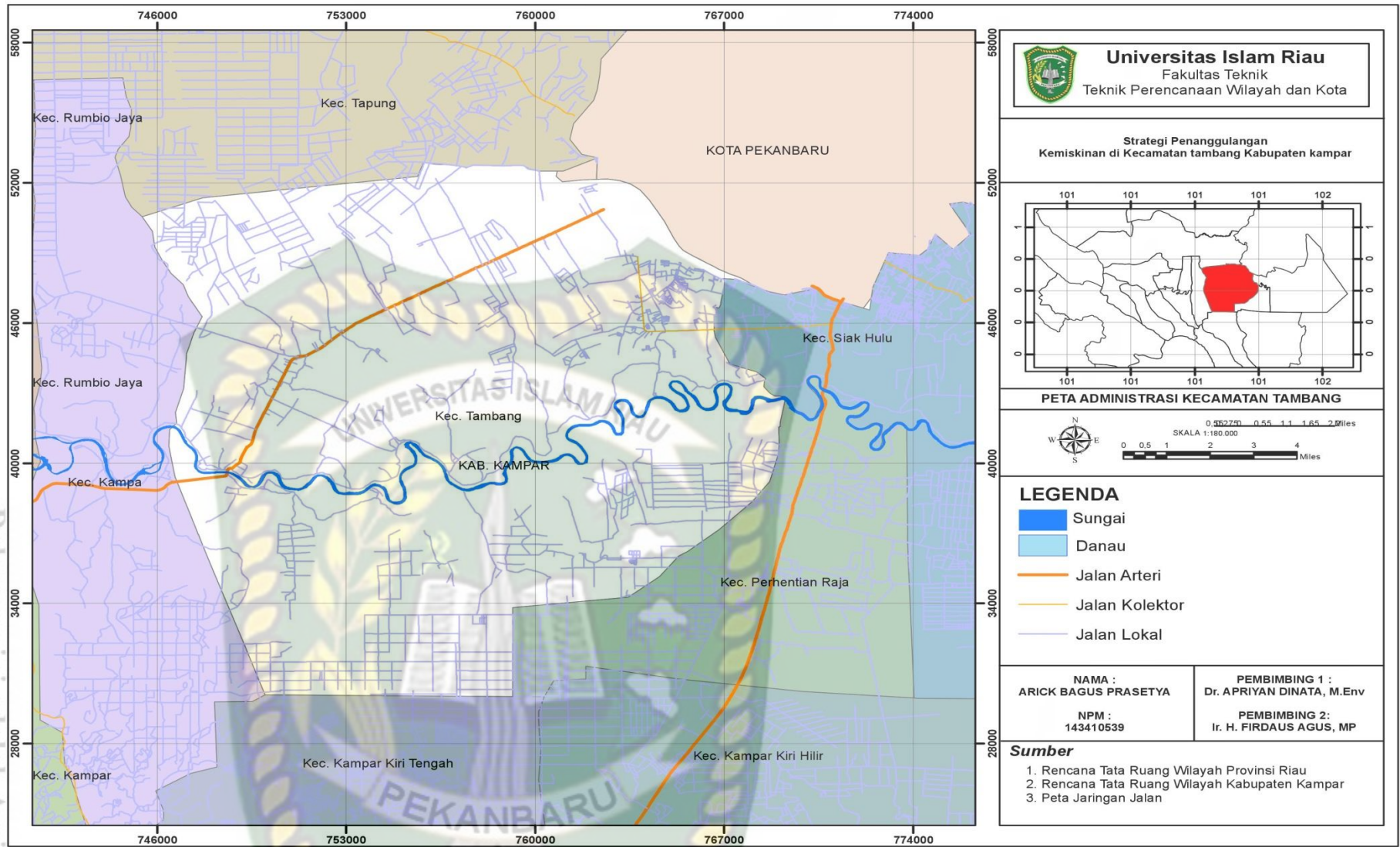
Batas wilayah Kecamatan Tambang meliputi;

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tapung.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Siak Hulu, Perhentian Raja dan Kampar Kiri Hilir.
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kampar
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Desa yang terluas di Kecamatan Tambang adalah Desa Rimbo Panjang dengan luas sekitar 15.058.20 Ha atau sekitar 28.25 % dari luas Kecamatan Tambang. Daerah kecamatan pada umumnya terletak didaerah dataran/hamparan yang dilalui oleh Sungai Kampar dan sungai kecil lainnya.



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Kampar



1.5.2 Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi pada penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui karakteristik kemiskinan di Kecamatan Tambang proses analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh gambaran yang mendalam tentang karakteristik kemiskinan di Kecamatan Tambang.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan, analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif, dengan menggunakan regresi linear sederhana, bertujuan untuk mengkonstruksikan faktor-faktor penyebab kemiskinan dalam suatu bentuk regresi.
- c. Merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Tambang, strategi penanggulangan yang dimaksud yaitu kebijakan pemerintah dan aturan-aturan yang mengatur penanggulangan kemiskinan berdasarkan faktor-faktor tingkat kemiskinan kemudian merekomendasi dari perbandingan kinerja pemerintah dengan perencanaan, pelaksana, dan pengendalian dalam penanggulangan kemiskinan pada lokasi penelitian.

1.6 Hipotesis Penelitian

Apabila t hitung $>0,08$ maka H_0 ditolak sedangkan H_1 diterima, dimana variabel bebas yang di maksud mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sebaliknya apabila t hitung $<0,08$ maka disimpulkan bahwa H_0 diterima sedangkan H_1 ditolak, dimana berarti variabel bebas yang di

maksud tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.
 H_0 = Tidak adanya hubungan antara status pekerjaan, pendapatan bulanan, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, dan keterbatasan modal terhadap kemiskinan di Kecamatan Tambang.

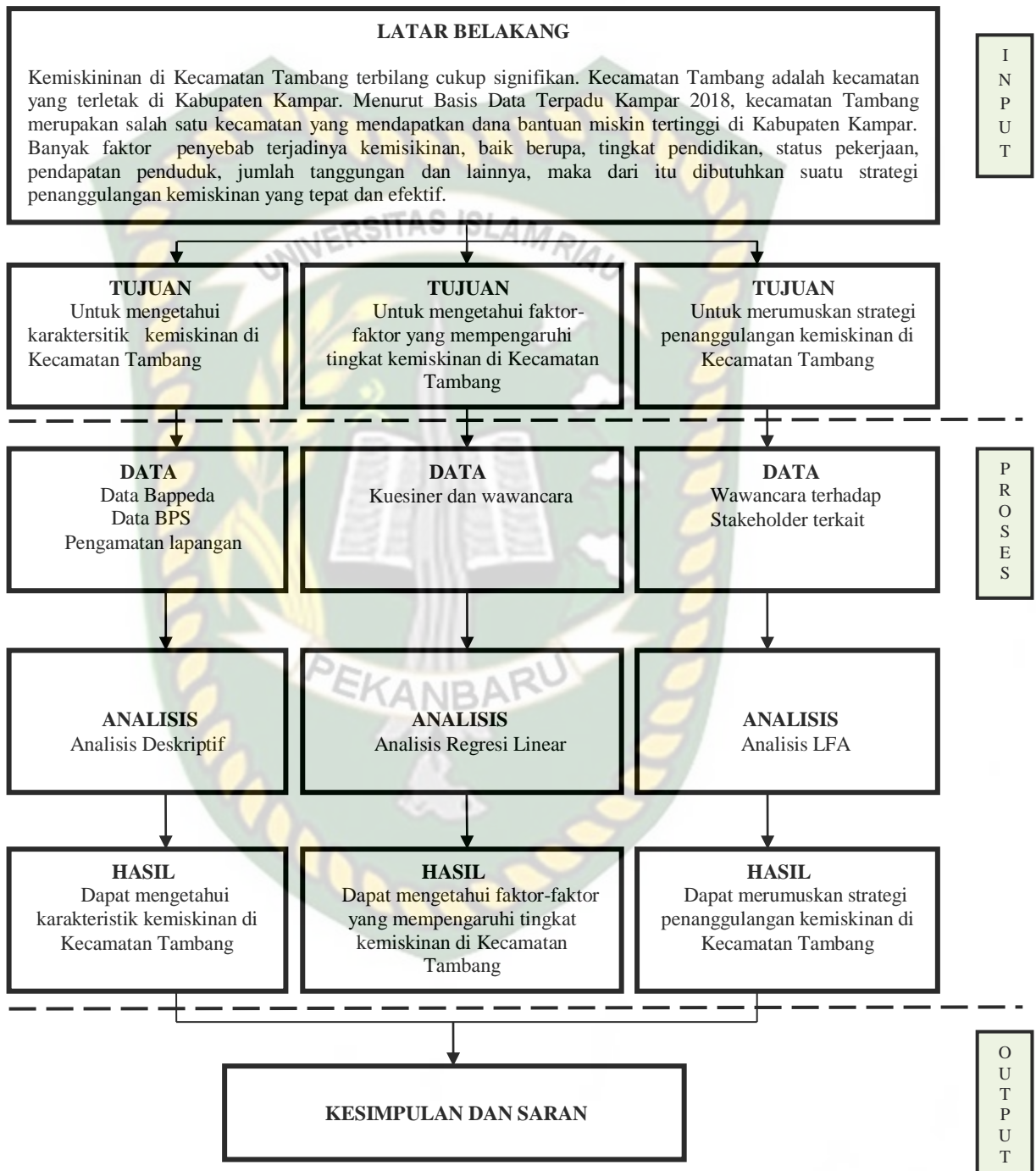
H_1 = Adanya hubungan antara status pekerjaan, pendapatan bulanan, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, dan modal usaha terhadap kemiskinan di Kecamatan Tambang.

1.7 Kerangka Berfikir

Pengertian kerangka berpikir adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek permasalahan. Kerangka berpikir ini disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait. Kerangka berpikir ini merupakan suatu argumentasi dalam merumuskan hipotesis. Dalam merumuskan suatu hipotesis, argumentasi kerangka berpikir menggunakan logika deduktif (untuk metode kuantitatif) dengan memakai pengetahuan ilmiah sebagai premis dasarnya.

Kerangka berfikir ini adalah alternatif atau jalan keluar yang paling optimal dalam menangani permasalahan ini. Maka dari itu jalan keluar yang akan diberikan diantaranya dengan membuat secara diagramatis atau kerangka berfikir, yang mana didalamnya terdapat permasalahan yang akan dibahas yang akan di rangkum di dalam rumusan masalah kemudian diidentifikasi dan menemukan sasaran yang akan dilakukan dengan menggunakan metode apa selanjutnya menentukan analisis apa yang digunakan agar dapat memecahkan persoalan yang akhirnya menemukan hasil

dari penelitian yang dilakukan dan di rangkum dalam kesimpulan dan saran yang mana dapat dilihat dari pada Gambar 1.3 berikut ini :



Gambar 1.3 Kerangka Berfikir

1.8 Sistematika Penulisan

Secara garis besar pembahasan didasarkan atas beberapa bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, ruang lingkup penelitian, kerangka berfikir dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat tentang konsepsi dasar kemiskinan, pandangan tentang kemiskinan, indikator kemiskinan, faktor-faktor penyebab kemiskinan, karakteristik kemiskinan, teori strategi dalam mengatasi kemiskinan, perencanaan pembangunan belum dapat mengatasi kemiskinan, pembangunan dan kemiskinan dan penelitian terdahulu.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini memuat tentang pendekatan penelitian, jenis data penelitian, tahapan penelitian, populasi dan teknik sampel, teknik analisis, dan desain survei.

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

Pada bab ini akan di bahas tentang gambaran umum wilayah penelitian, gambaran umum karakteristik kemiskinan di Kecamatan Tambang, gambaran umum faktor-faktor kemiskinan di Kecamatan Tambang.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas analisis karakteristik kemiskinan di Kecamatan Tambang, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat

kemiskinan di Kecamatan Tambang, dan strategi penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Tambang dengan menggunakan analisis LFA (*Logical Framewok Analysis*).

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini akan membahas mengenai kesimpulan hasil kajian dari penelitian ini dan saran-saran yang akan penulis sampaikan sehubungan dengan penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dasar Kemiskinan

2.1.1 Definisi Kemiskinan

Hall dan Midgley (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi deprivasi materi dan sosial yang menyebabkan individu hidup di bawah standar kehidupan yang layak, atau kondisi dimana individu mengalami deprivasi relatif dibandingkan dengan individu lain dalam masyarakat secara ekonomi. Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Sumber daya dalam konteks ini menyangkut tidak hanya aspek finansial, melainkan pula semua jenis kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas.

Satu dari tujuh orang di seluruh dunia hidup dalam kemiskinan baik itu di daerah perkotaan maupun pedesaan. Sebagian besar dari mereka hidup dalam pemukiman yang penuh sesak, kekurangan air, sanitasi yang buruk, keamanan yang tidak terkontrol, pelayanan kesehatan yang kurang memadai dan fasilitas pendidikan yang masih kurang memungkinkan. Orang-orang seperti ini menanggung kondisi hidup dengan bekerja yang buruk, rendahnya pendapatan yang tidak memadai, yang semuanya menambah beban kesehatan yang besar atau bahkan kematian dini. Di atas semua masalah ini, kaum miskin memiliki sedikit suara dan sedikit sarana untuk memengaruhi kebijakan dan tekanan yang bertentangan dengan kepentingan mereka. Pemerintah dan lembaga bantuan

seringkali gagal memahami dan menyediakan bagi masyarakat miskin karena cara mereka mendefinisikan dan mengukur kemiskinan, menggunakan sistem berdasarkan US \$ 1 per garis kemiskinan hari. Ini sangat mengecilkan skala dan kedalaman kemiskinan menetapkan kemiskinan garis terlalu rendah dan kemiskinan tampaknya hilang. Tindakan sederhana semacam itu juga tidak memperhitungkan dimensi penuh dari apa sebenarnya arti kemiskinan bagi orang-orang yang menjalaninya (Mitlin dan Satterthwhite 2012).

Menurut Ritonga (2003) bahwa kemiskinan adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi kehidupannya. Kebutuhan dasar minimal yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan kebutuhan pangan, sandang, perumahan dan kebutuhan sosial yang diperlukan oleh penduduk atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

Kemiskinan adalah teori, fakta dan kebijakan bahkan masalah yang sudah sejak lama ada dan hampir dapat dikatakan akan tetap menjadi “kenyataan abadi”. Kemiskinan selalu mendapatkan tempat yang cukup penting dalam pembahasan pembangunan.

Menurut Sumodiningrat dkk (1999) pengertian kemiskinan adalah sebuah konsep ilmiah yang lahir sebagai dampak ikutan dari pembangunan dalam kehidupan. Kemiskinan dipandang sebagai bagian dari masalah dalam pembangunan, yang keberadaannya ditandai dengan adanya pengangguran, keterbelakangan, yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan.

Kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standard hidup yang layak. Oleh karena standard hidup itu berbeda-beda, maka tidak ada definisi kemiskinan yang dapat diterima secara universal (Levitan, 1980). Hal ini sesuai dengan definisi kemiskinan yang diungkapkan oleh Bradley R. Schiller bahwa kemiskinan adalah ketidakanggapan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial yang terbatas (Murindk, 1979).

Kemiskinan dapat dilukiskan dengan kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok (Salim, 1984). Dalam kaitannya dengan hal ini, World Bank mendefinisikan keadaan miskin sebagai: *“Poverty is concern with absolute standard of living of part of society the poor in equality refers to relative living standards across the whole society”* (World Bank, 1990).

Dengan kata lain, kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan atau rumah tangga dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimum. Kebutuhan tersebut hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang dapat hidup secara layak. Jika tingkat pendapatan tidak dapat memenuhi kebutuhan minimum, maka orang atau rumah tangga tersebut dapat dikatakan sebagai keluarga miskin.

Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi, sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang memiliki potensi lebih tinggi. Masalah kemiskinan muncul karena adanya sekelompok anggota masyarakat yang secara struktural

tidak mempunyai peluang dan kemampuan yang memadai untuk mencapai tingkat kehidupan yang layak. Akibatnya mereka harus mengakui keunggulan kelompok masyarakat lainnya dalam persaingan mencari nafkah dan kepemilikan aset produktif, sehingga semakin lama menjadi semakin tertinggal. Dalam prosesnya, gejala tersebut memunculkan persoalan ketimpangan distribusi pendapatan.

2.1.2 Kemiskinan dan Kemanusiaan

Suatu kondisi kemiskinan dapat mendorong tindakan-tindakan yang dapat dipandang sebagai perbuatan yang menentang nilai-nilai kemanusiaan. Sudah tentu mereka yang hidup dalam kondisi kemiskinan (*the have nots*) akan membangun atau membentuk nilai-nilai tersendiri yang khas dan tidak sama dengan golongan lain di atasnya.

Sebagai contoh, kebiasaan kaum miskin hidup dalam kekurangan membuat cara hidup mereka tidak bisa memiliki kadar kebersihan sebagaimana golongan atas, hal ini disebabkan oleh:

- a. Dari segi waktu, mereka kebanyakan tidak cukup punya waktu untuk memikirkan hal-hal lain diluar usaha mencari sesuap nasi.
- b. Dari segi ketersediaan fasilitas, memang tidak memungkinkan suasana yang bersih. Bagaimana orang yang tinggal di kolong jembatan atau di pinggir kali dapat memiliki punya tradisi bersih (menjaga kebersihan) apabila kondisi lingkungannya lebih buruk dibandingkan dengan mereka yang tinggal dirumah yang mapan. Selain itu, cara komunikasi mereka yang biasa tinggal dalam hiruk pikuk jalan, kebisingan yang tinggi, tentu saja akan terbiasa bersuara keras (volume suara). Dapatkah tradisi ini diterima ? Apakah dapat diterima oleh norma-norma kesopanan dan etiket golongan

elit?

Jika nilai-nilai dari golongan atas digunakan sebagai titik pijakan dan ukuran dalam menilai tingkat realisasi kemanusiaan, maka dengan sendirinya mereka yang bergelimang dalam kemiskinan dapat dikatakan hidup dalam kondisi kemanusiaan yang rendah. Sebagai contoh antara lain seperti :

- a. Ditempat-tempat pembuangan sampah, serombongan manusia saling berebut barang (sampah) yang baru diturunkan dari truk pengangkut.
- b. Pagi hari ketika kereta api masuk stasiun, anak-anak gelandangan saling berebut makanan bekas, sisa-sisa makanan dari para penumpang.
- c. Pemulung yang masih bersedia memakan makanan bekas yang sudah ada di tempat sampah.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kemiskinan menjadi kenyataan yang tidak memungkinkan nilai kemanusiaan dan martabat manusia tumbuh secara wajar. Masih adanya kemiskinan dengan sendirinya memberikan bukti bahwa keadaan kemanusiaan masih sangat memprihatinkan. Dalam kondisi yang demikian, pembicaraan mengenai martabat (kemuliaan) manusia hanya sebatas bagi mereka yang dalam posisi mapan, tetapi belum menyentuh pada mereka yang dihinakan karena hidup dalam kemiskinan dan menderita.

2.2 Pandangan Tentang Kemiskinan

Menurut Sutrisno (1999), kemiskinan merupakan sebuah pertanyaan yang tidak menarik dan sekaligus berbahaya. Pertanyaan tentang sebab tersebut pada akhirnya akan mengarah pada proses kemiskinan bagaimana orang menjadi miskin. Tentu saja banyak pandangan yang berusaha untuk menjelaskan adanya

kemiskinan tersebut. Berikut akan dibahas mengenai tiga pandangan tentang kemiskinan.

2.2.1 Pandangan Konservatif

Pandangan ini beranggapan bahwa pasar bebas dapat menjadi pondasi bagi kebebasan ekonomi dan politik, yang juga akan memungkinkan demokrasi. Perbedaan-perbedaan dikalangan masyarakat semata-mata dipandang sebagai akibat dari perbedaan individu, pembawaan bakat dan karakter, termasuk motif hidup. Tidak ada masalah dalam sistem, sebab sistem telah dianggap final atau tidak dapat diganggu gugat. Bahkan pandangan ini percaya bahwa pada masa depan akan terjadi suatu kondisi yang menguntungkan bagi semua pihak. (Sutrisno, 1999).

Jika sekarang terdapat golongan miskin, maka menurut pandangan tersebut, pangkal masalah ada pada orang miskin itu sendiri. Mereka yang miskin itu dinilai pemalas, bodoh dan tidak punya keinginan untuk maju, kurang keterampilan serta hidup dalam kebudayaan yang anti kemajuan (anti modernisasi). Secara prinsip pandangan ini mendekati masalah dari sisi orban dan lebih cenderung menyalahkan korban. Oleh karena itu, untuk merubah mereka yang miskin tersebut, maka perlu dilakukan intervensi, terutama bagi rekayasa individu mengubah mentalitas si miskin agar memiliki daya hidup dan ketahanan dalam menghadapi tantangan dan perkembangan. Pendidikan-pendidikan untuk memacu motivasi seseorang, pemberian latihan-latihan keterampilan, dapat dikatakan bersumber pada pandangan ini.

2.2.2 Pandangan Liberal

Dalam pandangan ini, sistem dianggap tidak bermasalah, letak masalah pada bagaimana sistem tersebut bekerja. Adanya kebocoran, in-efisiensi, tidak adanya kontrol, korupsi, kolusi, nepotisme, hukum tidak berjalan, dan lain-lain, dipandang sebagai sumber masalah. Kesemuanya menunjukkan bahwa sistem tidak berjalan sebagaimana mestinya. Terdapat distorsi yang mengakibatkan fungsi dasar sistem menjadi mandul, dan di sisi lain menjadi faktor yang mempersempit kesempatan pada sebagian orang dan membuka kesempatan pada bagian yang lain (khususnya yang berada dekat dengan kekuasaan). Pada prinsipnya pandangan ini tidak mempersoalkan struktur sosial, sehingga arah perubahannya pun tidak akan sampai pada perubahan struktur sosial. (Sutrisno,1999).

Terhadap kemiskinan, golongan ini berpendapat, bahwa adanya kemiskinan disebabkan oleh kesempatan yang tidak sama yang merupakan sebagai akibat dari manajemen yang amburadul berantakan dan tidak profesional. Oleh sebab itu, jika orang miskin diberi kesempatan berusaha, maka masalah kemiskinan akan dapat diatasi. Pada sisi lain, untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan, penyalahgunaan kekuasaan, diperlukan kontrol publik. Untuk keperluan itu diperlukan adanya jaminan agar masyarakat bebas dari segala tata aturan yang menghambat gerak maju mereka, dan dengan itu diharapkan masyarakat dapat menjalankan fungsi kontrol yang ketat, termasuk menghidupkan supremasi hukum. Usaha-usaha yang kini berkembang dalam skema bungkus gerakan reformasi, dapat dikatakan sebagai model dari pandangan liberal.

2.2.3 Pandangan Transformatif

Berbeda dengan dua pandangan diatas, pandangan ini berangkat dari sistem struktur dan kultural sosial sebagai titik persoalan. Ketidakadilan bersumber pada sistem yang bukan saja memungkinkan ketidakadilan, tetapi juga memuat ketidakadilan itu sendiri. Dalam pandangan transformatif, persoalan yang kini berkembang tidak akan pernah dapat diselesaikan dengan tuntas, selama system tidak mengalami transformasi, diubah dengan sistem baru yang berdiri diatas fondasi keadilan. (Sutrisno, 1999).

Dalam kasus perubahan, sebagai contoh pandangan transformatif akan melihat kemiskinan di sektor perburuhan sebagai akibat dari hubungan produksi yang tidak adil. Kaum buruh hanya menjadi objek, pihak yang menjual tenaga untuk mendapatkan upah, dan sama sekali tidak memiliki andil untuk menentukan proses produksi termasuk menentukan besarnya upah yang selayaknya mereka terima. Di sektor pertanian, kemiskinan kaum tani dipandang sebagai akibat ketimpangan dalam struktur penguasaan sumber-sumber agraria (termasuk tanah); sehingga kaum tani tetap tidak bisa hidup dalam kecukupan, namun sebaliknya malah mengalami ketertindasan yang panjang. Dua kasus ini merupakan suatu contoh akibat yang lebih luas dari ketidakadilan yang termuat dalam sistem. Usaha-usaha untuk menaikkan upah buruh, menaikkan harga gabah, tanpa melibatkan perubahan yang mendasar, terbukti tidak banyak memberikan arti pada perbaikan kehidupan perekonomian masyarakat.

Kemiskinan bukan diakibatkan oleh kesalahan si miskin korban, tidak pula dilihat sebagai salah arus, melainkan sebagai akibat struktur, terutama yang berkaitan dengan aset produksi yang timpang, sehingga memungkinkan pihak lain

menentukan dan sekaligus menjadi penikmat pertama dari segala hasil. Masalah kemiskinan tidak bersifat spesifik hanya ada disuatu daerah, melainkan perlu dilihat secara makro, termasuk sistem dunia yang menjadikan negara-negara utara lebih mampu dari negara-negara selatan. Pola hubungan utara-selatan dalam kerangka ini menjadi penting untuk dipersoalkan. Dalam pandangan ini, hubungan kekuasaan laki-laki dan perempuan menjadi bagian dari masalah yang perlu ditransformasikan, agar tercipta suatu keadilan bagi semua orang.

2.3 Indikator Kemiskinan

Berdasarkan sebab terjadinya kemiskinan di perkotaan, maka indikator utama kemiskinan dapat dirumuskan sebagai berikut:

BAPPENAS merumuskan Indikator-indikator kemiskinan dengan rumusan yang konkrit berikut ini:

- a. terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, dilihat dari stok pangan yang terbatas, rendahnya asupan kalori penduduk miskin dan buruknya status gizi bayi, anak balita dan ibu. Sekitar 20 % penduduk dengan tingkat pendapatan terendah hanya mengkonsumsi 1.571 kkal per hari. Kekurangan asupan kalori, yaitu kurang dari 2.100 kkal per hari, masih dialami oleh 60 % penduduk berpenghasilan terendah (BPS, 2004);
- b. terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan disebabkan oleh kesulitan mendapatkan layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar, kurangnya pemahaman terhadap perilaku hidup sehat, dan kurangnya layanan kesehatan reproduksi; jarak fasilitas layanan kesehatan yang jauh, biaya perawatan dan pengobatan yang mahal. Di sisi lain, utilisasi rumah sakit masih didominasi oleh golongan mampu, sedang

masyarakat miskin cenderung memanfaatkan pelayanan di puskesmas. Demikian juga persalinan oleh tenaga kesehatan pada penduduk miskin, hanya sebesar 39,1 % dibanding 82,3 % pada penduduk kaya. Asuransi kesehatan sebagai suatu bentuk sistem jaminan sosial hanya menjangkau 18,74 % penduduk, dan hanya sebagian kecil di antaranya penduduk miskin; terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan yang disebabkan oleh kesenjangan biaya pendidikan, fasilitas pendidikan yang terbatas, biaya pendidikan yang mahal, kesempatan memperoleh pendidikan yang terbatas, tingginya beban biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung;

- c. terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan seperti buruh migran perempuan dan pembantu rumahtangga;
- d. terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi. Masyarakat miskin yang tinggal di kawasan nelayan, pinggiran hutan, dan pertanian lahan kering kesulitan memperoleh perumahan dan lingkungan permukiman yang sehat dan layak. Dalam satu rumah seringkali dijumpai lebih dari satu keluarga dengan fasilitas sanitasi yang kurang memadai;
- e. terbatasnya akses terhadap air bersih. Kesulitan untuk mendapatkan air bersih terutama disebabkan oleh terbatasnya penguasaan sumber air dan menurunnya mutu sumber air;

- f. lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah. Masyarakat miskin menghadapi masalah ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah, serta ketidakpastian dalam penguasaan dan pemilikan lahan pertanian. Kehidupan rumah tangga petani sangat dipengaruhi oleh aksesnya terhadap tanah dan kemampuan mobilisasi anggota keluarganya untuk bekerja di atas tanah pertanian;
- g. memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam. Masyarakat miskin yang tinggal di daerah perdesaan, kawasan pesisir, daerah pertambangan dan daerah pinggiran hutan sangat tergantung pada sumberdaya alam sebagai sumber penghasilan;
- h. lemahnya jaminan rasa aman. Data yang dihimpun UNSFIR menggambarkan bahwa dalam waktu 3 tahun (1997-2000) telah terjadi 3.600 konflik dengan korban 10.700 orang, dan lebih dari 1 juta jiwa menjadi pengungsi. Meskipun jumlah pengungsi cenderung menurun, tetapi pada tahun 2001 diperkirakan masih ada lebih dari 850.000 pengungsi di berbagai daerah konflik;
- i. lemahnya partisipasi. Berbagai kasus penggusuran perkotaan, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, dan pengusiran petani dari wilayah garapan menunjukkan kurangnya dialog dan lemahnya partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan. Rendahnya partisipasi masyarakat miskin dalam perumusan kebijakan juga disebabkan oleh kurangnya informasi baik mengenai kebijakan yang akan dirumuskan maupun mekanisme perumusan yang memungkinkan keterlibatan mereka;

- j. besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga dan adanya tekanan hidup yang mendorong terjadinya migrasi. Menurut data BPS, rumah tangga miskin mempunyai rata-rata anggota keluarga lebih besar dari pada rumah tangga tidak miskin. Rumah tangga miskin di perkotaan rata-rata mempunyai anggota 5,1 orang, sedangkan rata-rata anggota rumah tangga miskin di perdesaan adalah 4,8 orang.

Berdasarkan pendapat diatas, maka indikator utama kemiskinan dapat dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Indikator Utama Kemiskinan

INDIKATOR	KETERANGAN
Ekonomi rendah	Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan; Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha; Besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga;
Terbatasnya sarana dan prasarana	Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan; Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan; Terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi; Terbatasnya akses terhadap air bersih; Memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam;
Terbatasnya perlindungan sosial dan politik	Lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah; Lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah; Lemahnya jaminan rasa aman; Lemahnya partisipasi; Tata kelola pemerintahan yang buruk yang menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pelayanan publik, meluasnya korupsi dan rendahnya jaminan sosial terhadap masyarakat.

Sumber: Hasil Analisis, 2019

2.4 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kemiskinan

Setiap permasalahan timbul pasti karna ada faktor yang mengiringinya yang menyebabkan timbulnya sebuah permasalahan, begitu juga dengan masalah kemiskinan yang dihadapi oleh negara indonesia. Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan antara lain :

2.4.1 Faktor Sosial Ekonomi

Beberapa faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi timbulnya kemiskinan yaitu :

2.4.1.1 Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang dimiliki seseorang menyebabkan keterbatasan kemampuan seseorang untuk masuk dalam dunia kerja (Hartomo dan Aziz dalam Hudyana, 2009). Menurut Kuznets dalam Suryandari (2017) menyatakan pendidikan merupakan cara untuk menyelamatkan diri dari kemiskinan. Pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar, yang mana pendidikan memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Menurut Kartasmita dalam Rahmawati (2006) taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan meyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dapat dimasuki. Taraf pendidikan yang rendah

juga membatasi kemampuan seseorang untuk mencari dan memanfaatkan peluang.

Keterkaitan kemiskinan dan pendidikan sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan. Pendidikan juga menanamkan kesadaran akan pentingnya martabat manusia. Mendidik dan memberikan pengetahuan berarti menggapai masa depan. Hal tersebut harusnya menjadi semangat untuk terus melakukan upaya mencerdaskan bangsa (Suryawati, 2005). Siregar dan Wahyuniarti (2008), di dalam penelitiannya menemukan bahwa pendidikan yang diukur dengan jumlah penduduk yang lulus pendidikan SMP, SMA, dan diploma memiliki berpengaruh besar dan signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. Ini mencerminkan bahwa pembangunan modal manusia (human capital) melalui pendidikan merupakan determinan penting untuk menurunkan jumlah penduduk miskin.

Teori yang dapat dijadikan pijakan yang mendukung bahwa tingkat pendidikan termasuk di dalamnya pengetahuan, ketrampilan serta informasi dapat dijadikan salah satu faktor yang menentukan kemiskinan. Pendapat-pendapat itu dapat dilihat dalam Tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2 Sintesis Faktor Tingkat Pendidikan

Tokoh	Pernyataan
Friedmann, 1979	Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuatan sosial. Basis kekuatan sosial meliputi : pengetahuan dan ketrampilan yang memadai dan informasi yang berguna untuk memajukan kehidupan anda.
Ala, 1981	Nilai-nilai ini berkaitan erat dengan kebutuhan dasar manusia yakni salah satunya pendidikan.
Adler Karlsson, 1978	Pendidikan juga harus termasuk dalam pengukuran kemiskinan absolut
World Bank, 1980	Beberapa aspek kemiskinan salah satunya pendidikan yang rendah
Hendratta, 1979	Suatu penelitian dalam masyarakat akan menunjukkan ruwet dan kompleksnya hubungan diantara berbagai manifestasi kemiskinan yakni buta huruf.
Ala, 1981	Terdapat ada 10 macam nilai, sehingga dengan demikian terdapat sepuluh dimensi atau aspek kemiskinan, yakni: pendidikan dan pengetahuan, ketrampilan dan keahlian
Salim, 1980	Orang miskin memiliki lima ciri salah satunya yakni tingkat pendidikan rendah, tak sampai tamat sekolah dasar.

Sumber: Hasil Studi, 2019

2.4.1.2 Status Pekerjaan

Ada beberapa indikator yang bisa dijadikan tolak ukur produktivitas antara lain adalah status kerja, jenis pekerjaan, jumlah hari kerja, dan jam kerja. Keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal seseorang harus mampu menciptakan lapangan kerja baru sedangkan secara faktual hal tersebut sangat kecil kemungkinannya bagi masyarakat miskin karena keterbatasan modal dan keterampilan. Hartomo dan Aziz dalam Hudyana (2009). Menurut Kartasmita dalam Rahmawati (2006) selain kondisi kemiskinan dan kesehatan yang rendah, kemiskinan juga diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Selama ada lapangan kerja atau kegiatan usaha, selama itu pula ada harapan untuk memutuskan lingkaran kemiskinan.

Dasar-dasar teori faktor pekerjaan merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan, dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3 Sintesis Faktor Pekerjaan

Tokoh	Pernyataaan
Friedmann, 1979	Kemiskinan mendefinisikan sebagai ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuatan sosial. Basis kekuatan sosial meliputi: network atau jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan.
Adler Karlsson, 1978	Tenaga kerja juga harus termasuk didalam pengukuran kemiskinan absolut.
Herlianto, 1997	Suatu penelitian dalam masyarakat akan menunjukkan ruwet dan kompleksnya hubungan di antara berbagai manifestasi kemiskinan: pengangguran.

Sumber: Hasil Studi, 2019

2.4.1.3 Keterbatasan Modal

Seseorang miskin sebab mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan (Hartomo dan Aziz dalam Hudyana, 2009).

2.4.1.4 Jumlah Tanggungan Keluarga

Semakin besar jumlah tanggungan keluarga semakin berat beban rumah tangga dalam memenuhi kebutuhannya (Firdaus, 2006). Program keluarga berencana (KB) menyatakan bahwa rumah tangga keluarga berencana di programkan memiliki anak dua orang atau jumlah tanggungan dalam keluarga sebanyak tiga orang (Firdaus, 2006).

Seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan akan menimbulkan kemiskinan karena semakin banyak anggota keluarga akan semakin meningkat tuntutan atau

beban untuk hidup yang harus dipenuhi (Hartomo dan Aziz dalam Hudyana, (2009).

Jumlah anggota rumah tangga merupakan indikasi dalam menentukan miskin atau tidaknya suatu rumah tangga. Semakin besar jumlah anggota keluarga akan semakin besar pendapatan yang dikeluarkan untuk biaya hidup. Sehingga menurut masyarakat miskin, jumlah anggota keluarga yang banyak akan mengakibatkan kondisi menjadi semakin miskin. Menurut Rivani (2003) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa jumlah anggota rumah tangga mempengaruhi kemiskinan. Alasan jumlah tanggungan keluarga yang banyak, dapat disebabkan oleh beberapa penyebab antara lain, banyak anak, ada anggota keluarga yang tidak produktif (usia lanjut atau alasan lain) dan kesulitan memperoleh pekerjaan bagi anggota keluarga yang sebenarnya sudah mencapai usia produktif. Rumah tangga miskin memiliki anggota rumah tangga lebih banyak dibandingkan rumah tangga tidak miskin. Rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin sekitar satu orang lebih banyak dibanding mereka yang tidak miskin, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Hubungan jumlah anggota rumah tangga yang besar dengan kemiskinan bersifat saling memperkuat. Di satu sisi, rumah tangga miskin cenderung mempunyai anak lebih banyak. Hal itu tidak lepas dari anggapan bahwa anak adalah jaminan masa depan bagi si orang tua. Di sisi lain, rumah tangga dengan jumlah anak yang lebih banyak cenderung menjadi miskin karena untuk suatu tingkat pendapatan tertentu harus dipakai untuk menghidupi lebih banyak anggota rumah tangga (TNP2K, 2010).

2.4.1.5 Pendapatan

Kondisi seseorang dapat diukur dengan menggunakan konsep pendapatan yang menunjukkan jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu. Definisi lain dari pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diperoleh dari hasil pekerjaan dan biasanya pendapatan seseorang dihitung setiap tahun atau setiap bulan. Dengan demikian pendapatan merupakan gambaran terhadap posisi ekonomi keluarga dalam masyarakat. Pendapatan keluarga berupa jumlah keseluruhan pendapatan dan kekayaan keluarga, dipakai untuk membagi keluarga dalam tiga kelompok pendapatan, yaitu: pendapatan rendah, pendapatan menengah dan pendapatan tinggi. Pembagian di atas berkaitan dengan, status, pendidikan dan keterampilan serta jenis pekerja seseorang namun sifatnya sangat relative (Prayuda, 2014).

Menurut Sukirno (2000), pendapatan dapat dihitung melalui tiga cara yaitu:

- a. Cara Pengeluaran. Cara ini pendapatan dihitung dengan menjumlahkan nilai pengeluaran/perbelanjaan ke atas barang-barang dan jasa.
- b. Cara Produksi. Cara ini pendapatan dihitung dengan menjumlahkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan.
- c. Cara Pendapatan. Dalam penghitungan ini pendapatan diperoleh dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima.

Pendapatan penduduk dijadikan salah satu faktor yang menentukan faktor kemiskinan berdasarkan pendapat-pendapat dalam Tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.4 Sintesis Faktor Pendapatan

Tokoh	Pernyataan
Salaim, 1980	Kemiskinan biasanya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok.
Friedmann, 1979	Kemiskinan didefinisikan ketidaksetaraan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuatan sosial. Basis kekuatan sosial meliputi (tidak terbatas pada): sumber-sumber keuangan (income dan kredit yang memadai).
World Bank, 1980	Beberapa aspek kemiskinan yaitu: income atau pendapatan yang rendah.

Sumber: Hasil Studi, 2019

Menurut Kuncoro (2001) terdapat tiga faktor penyebab kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksetaraan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya yang terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktifitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau keturunan. ketiga kemiskinan muncul karena perbedaan akses dalam modal.

Kenyataan menunjukkan bahwa kemiskinan tidak bisa didefinisikan dengan sangat sederhana, karena tidak hanya berhubungan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan material, tetapi juga sangat berkaitan dengan dimensi kehidupan manusia yang lain. Menurut Bank Dunia (2003), terdapat beberapa

faktor penyebab dasar dari kemiskinan dipandang dari sisi sosial ekonomi adalah sebagai berikut:

- a) kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal;
- b) terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana;
- c) adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antara sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern);
- d) rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat;
- e) pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan.

2.5 Karakteristik Kemiskinan

Alkire dan Foster pada tahun 2007 mengembangkan ukuran kemiskinan baru yang dinamakan *Multidimensional Poverty Index* (MPI). MPI menganalisa kemiskinan pada level rumah tangga/individu dan telah banyak diterapkan di berbagai negara di dunia. MPI memiliki tiga dimensi yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Setiap dimensi terdiri dari beberapa indikator, masing-masing dua indikator untuk dimensi kesehatan dan pendidikan, serta enam indikator untuk dimensi standar hidup.

- a. Indikator pada dimensi kesehatan adalah gizi dan kematian anak. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan kebutuhan kesehatan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap rumah tangga.
- b. Indikator pada dimensi pendidikan adalah tahun lama bersekolah dan partisipasi sekolah untuk semua anak usia sekolah. Indikator ini digunakan untuk menangkap akses rumah tangga terhadap pendidikan,

namun belum mencerminkan kualitas pendidikan itu sendiri.

- c. Indikator pada dimensi standar hidup adalah bahan bakar memasak, sanitasi layak, air minum bersih, listrik, lantai, dan kepemilikan beberapa barang konsumsi (radio, televisi, telepon, sepeda, sepeda motor, mobil, truk, dan kulkas).

Dalam pengukuran multidimensi, setiap dimensi memiliki garis kemiskinan masing-masing. Hal ini menyebabkan identifikasi kelompok miskin menjadi lebih kompleks karena menggunakan beberapa ambang batas ganda. Ambang batas pertama menyerupai garis kemiskinan untuk tiap-tiap dimensi yang mengidentifikasi apakah seseorang tergolong miskin. Ambang batas kedua dilakukan sebagai penentuan terakhir, yakni apakah orang tersebut tergolong sebagai orang miskin berdasarkan keseluruhan dimensi. Adapun nilai bobot berkisar antara 0 - 1. Bobot tersebut diinterpretasikan bahwa setiap orang yang terdeprivasi atau miskin dalam satu dimensi akan diberi bobot tertentu.

Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI), bersama dengan United Nations Development Programme (UNDP), kemudian mengembangkan MPI Global untuk membandingkan MPI antar berbagai negara. MPI Global dipahami sebagai ketidakmampuan memenuhi standar minimum internasional yang sebanding dengan indikator terkait *Millennium Development Goals/MDGs* (OPHI,2016). Pada September 2013, OPHI membentuk Jaringan Kemiskinan Multidimensional atau Multidimensional Poverty Peer Network (MPPN) untuk membantu negara-negara memahami teknik penerapan MPI. Lebih dari 60 negara dan lembaga menjadi anggota forum MPPN dengan dimensi dan indikator mereka sendiri. Saat ini, 15 negara telah menerapkan MPI untuk

pengukuran kemiskinan nasionalnya.

MPI Global dibangun menggunakan tiga dimensi dan indikator yang serupa dengan Alkire Foster, yaitu dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Dengan menggunakan MPI, Alkire dan Santos (2010) menemukan bahwa 1,7 miliar orang di dunia hidup dalam kemiskinan multidimensi dan umumnya tinggal di negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah. Di tahun yang sama, Wardhana (2010) mencoba mengembangkan MPI khusus untuk Indonesia. Kajian ini membandingkan kemiskinan multidimensi dengan kemiskinan moneter di Indonesia pada tahun 1993 dan 2007. Pemilihan dimensi dalam membangun MPI relatif sama, yakni menggunakan dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup, namun beberapa indikator dimodifikasi karena keterbatasan data. Data indikator gizi anak yang tidak tersedia dimodifikasi dengan indikator kondisi kesehatan yang disertai dengan penambahan indikator jaminan kesehatan. Kajian ini menunjukkan bahwa penduduk miskin di Indonesia secara multidimensi lebih besar jumlahnya daripada penduduk miskin secara moneter, namun kedua jenis kemiskinan tersebut memiliki korelasi yang positif. Modifikasi terhadap dimensi dan indikator MPI Alkire dan Foster memang sering dilakukan karena keterbatasan data dan perbedaan permasalahan yang dihadapi tiap negara.

Indikator-indikator untuk dimensi kesehatan yang dianggap dapat mencerminkan akses rumah tangga terhadap kebutuhan dasar kesehatan adalah jaminan kesehatan, kondisi kesehatan, vaksinasi, nutrisi anak, dan proses persalinan. Sementara itu, dimensi pendidikan tidak mengalami banyak modifikasi, tetapi ada beberapa penelitian yang menambahkan indikator buta huruf. Indikator buta huruf lebih mencerminkan kualitas pendidikan karena

indikator yang digunakan oleh Alkire dan Foster belum mencakup kualitas pendidikan. Modifikasi terhadap indikator dalam dimensi standar hidup juga terbilang sedikit. Umumnya, dimensi standar hidup diukur dari indikator yang menggambarkan keseharian hidup rumah tangga seperti air minum bersih, sanitasi, listrik, bahan bakar memasak, kondisi rumah (lantai, dinding dan atap rumah), dan kepemilikan aset. Berikut Indikator kemiskinan yang telah dirangkum dari Bappenas dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut ini:

Tabel 2.5 Indikator Kemiskinan

Dimensi	Indikator	Penjelasan
Kesehatan	Penolong persalinan	Jumlah ibu hamil yang ditolong persalinan
	Vaksinasi	Jumlah partisipasi masyarakat mengikuti program vaksinasi
	Jaminan kesehatan	Berupa program-program jaminan kesehatan yang ditujukan kepada masyarakat
Pendidikan	Partisipasi sekolah	Angka partisipasi sekolah masyarakat
Standar hidup	Sanitasi	Sanitasi dengan kualitas yang memadai
	Air minum	Air minum dengan kualitas yang memadai
	Listrik	Jaringan listrik yang sudah dialiri
	Kondisi rumah	Berdasarkan kondisi lantai, kondisi dinding dan kondisi atap

Sumber : Bappenas 2019

Adapun bentuk-bentuk kemiskinan tersebut (Suryawati, 2004) adalah:

a. Kemiskinan Absolut

Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan kebutuhan dasar hidupnya. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup. Kesulitan utama dalam konsep kemiskinan absolut adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja, tetapi juga iklim, tingkat kemajuan suatu negara, dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Walaupun demikian, untuk dapat hidup layak, seseorang membutuhkan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan fisik dan sosialnya

b. Kemiskinan Relatif

Seseorang termasuk golongan miskin relatif apabila telah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah sehingga konsep kemiskinan ini bersifat dinamis atau akan selalu ada. Oleh karena itu, kemiskinan dapat dari aspek ketimpangan sosial yang berarti semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah, maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang di kategorikan selalu miskin.

c. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya atau sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan seperti ini juga terkadang memiliki unsur diskriminatif. Bentuk kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang paling banyak mendapatkan perhatian di bidang ilmu sosial terutama di kalangan negara-negara pemberi bantuan seperti Bank Dunia, IMF, dan Bank Pembangunan Asia. Bentuk kemiskinan struktural juga di anggap paling banyak menimbulkan adanya ketiga bentuk kemiskinan yang telah disebutkan sebelumnya

d. Kemiskinan Situasional atau Kemiskinan Natural

Kemiskinan situasional terjadi di daerah-daerah yang kurang menguntungkan dan oleh karenanya menjadi miskin

e. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara modern. Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap malas, pemboros atau tidak pernah hemat, kurang kreatif, dan relatif pula bergantung pada pihak lain.

Setelah dikenal bentuk kemiskinan, dikenal pula dengan jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya. Adapun jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya adalah:

a. Kemiskinan alamiah

Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang terbentuk sebagai akibat adanya kelangkaan sumberdaya alam dan minimnya atau ketiadaan prasarana umum (jalan raya, listrik, dan air bersih), dan keadaan tanah yang kurang subur. Daerah-daerah dengan karakteristik tersebut pada umumnya adalah daerah yang belum terjangkau oleh kebijakan pembangunan sehingga menjadi daerah tertinggal.

b. Kemiskinan buatan

Kemiskinan buatan adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang menyebabkan masyarakat tidak memiliki banyak kesempatan untuk menguasai sumber daya, sarana dan fasilitas ekonomi secara merata. Kemiskinan seperti ini adalah dampak negatif dari pelaksanaan konsep pembangunan (*developmentalism*) yang umumnya dijalankan di negara-negara sedang berkembang. Sasaran untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi tinggi mengakibatkan tidak meratanya pembagian hasil-hasil pembangunan di mana sektor industri misalnya lebih menikmati tingkat keuntungan dibandingkan mereka yang bekerja di sektor pertanian.

Harry (2007) mengemukakan terdapat dua jenis kemiskinan, yaitu:

a. Kemiskinan yang bersifat kronis (*chronic poverty*)

Ciri dari kemiskinan ini diantaranya adalah sangat terbatasnya infrastruktur

transportasi yang menunjukkan bahwa penduduk miskin yang tinggal di daerah terpencil, sering mengalami sakit yang berkepanjangan dan tidak mampu mengakses pelayanan kesehatan, serta tidak memiliki banyak peluang untuk memperoleh pendidikan. Kemiskinan jenis ini biasanya akan menghasilkan keturunan yang miskin juga, sehingga jenis ini sering dikaitkan dengan kemiskinan antar generasi.

b. Kemiskinan yang bersifat sementara (*transient poverty*)

Yakni kemiskinan yang disebabkan karena suatu kejadian atau perkara yang mempengaruhi kehidupan orang tersebut. Ketika kondisinya membaik, maka mereka akan dapat hidup normal dan lebih baik.

Menurut Chambers (1998) dalam Chriswardani (2005) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *integrated concept* yang memiliki lima dimensi sebagai ketidakberuntungan (*disadvantages*) yang melingkupi orang miskin atau keluarga miskin antara lain:

a. Kemiskinan (*proper*)

Permasalahan kemiskinan seperti halnya pada pandangan semula adalah kondisi ketidakmampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan pokok. Konsep atau pandangan ini berlaku tidak hanya pada kelompok yang tidak memiliki pendapatan, akan tetapi dapat berlaku pula pada kelompok yang telah memiliki pendapatan.

b. Ketidakberdayaan (*powerless*)

Pada umumnya, rendahnya kemampuan pendapatan akan berdampak pada kekuatan sosial (*social power*) dari seseorang atau sekelompok orang terutama dalam memperoleh keadilan ataupun persamaan hak untuk

mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

c. Kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*)

Seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tidak memiliki atau kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga di mana situasi ini membutuhkan alokasi pendapatan untuk menyelesaikannya. Misalnya, situasi rentan berupa bencana alam, kondisi kesehatan yang membutuhkan biaya pengobatan yang relatif mahal, dan situasi-situasi darurat lainnya yang membutuhkan kemampuan pendapatan yang dapat mencukupinya. Kondisi dalam kemiskinan di anggap tidak mampu untuk menghadapi situasi ini.

d. Ketergantungan (*dependency*)

Keterbatasan kemampuan pendapatan ataupun kekuatan sosial dari seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tadi menyebabkan tingkat ketergantungan terhadap pihak lain adalah sangat tinggi. Mereka tidak memiliki kemampuan atau kekuatan untuk menciptakan solusi atau penyelesaian masalah terutama yang berkaitan dengan penciptaan pendapatan baru. Bantuan pihak lain sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan-persoalan terutama yang berkaitan dengan kebutuhan akan sumber pendapatan.

e. Keterasingan (*isolation*)

Dimensi keterasingan seperti yang dimaksudkan oleh *Chambers* adalah faktor lokasi yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Pada umumnya, masyarakat yang disebut miskin ini berada pada daerah yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Hal

ini dikarenakan sebagian besar fasilitas kesejahteraan lebih banyak terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti di perkotaan atau kota-kota besar. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh fasilitas-fasilitas kesejahteraan relatif memiliki taraf hidup yang rendah sehingga kondisi ini menjadi penyebab adanya kemiskinan.

Moeljarto (1995) mengemukakan tentang *poverty profile* sebagaimana berikut: masalah kemiskinan bukan saja masalah *welfare* akan tetapi mengandung enam alasan antara lain:

- a. Masalah kemiskinan adalah masalah kerentanan.
- b. Kemiskinan berarti tertutupnya akses kepada berbagai peluang kerja karena hubungan produksi dalam masyarakat tidak memberi peluang kepada mereka untuk berpartisipasi dalam proses produksi
- c. Masalah ketidakpercayaan, perasaan impotensi emosional dan sosial dalam menghadapi elit desa dan para birokrat yang menentukan keputusan menyangkut dirinya tanpa memberi kesempatan untuk mengaktualisasikan diri, sehingga membuatnya tidak berdaya.
- d. Kemiskinan juga berarti menghabiskan sebagian besar penghasilannya untuk konsumsi pangan dalam kualitas dan kuantitas terbatas.
- e. Tingginya rasio ketergantungan, karena jumlah keluarga yang besar.
- f. Adanya kemiskinan yang diwariskan secara terus menerus.

Suryawati (2004) mengemukakan ciri-ciri kemiskinan yang hingga saat ini masih dipakai untuk menentukan kondisi miskin adalah:

- a. Tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, peralatan kerja, dan keterampilan yang memadai
- b. Tingkat pendidikan yang relatif rendah
- c. Bekerja dalam lingkup kecil dan modal kecil atau disebut juga bekerja di lingkungan sektor informal sehingga mereka ini terkadang disebut juga setengah menganggur
- d. Berada di kawasan pedesaan atau dikawasan yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan regional atau berada pada kawasan tertentu di perkotaan (*slum area*)
- e. Memiliki kesempatan yang relatif rendah dalam memperoleh bahan kebutuhan pokok yang mencukupi termasuk dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan sesuai dengan standar kesejahteraan pada umumnya

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa ciri-ciri kemiskinan di atas tidak memiliki sifat mutlak untuk dijadikan kebenaran universal terutama dalam menerangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan ataupun terbentuknya kemiskinan. Sifat-sifat kemiskinan di atas hanya merupakan temuan lapangan yang paling banyak di identifikasikan atau diukur.

2.6 Teori Strategi Dalam Mengatasi Kemiskinan

Pada dasarnya, kemiskinan merupakan persoalan klasik yang telah ada sejak umat manusia ada. Kemiskinan merupakan persoalan kompleks, berwajah banyak, dan tampaknya akan terus menjadi persoalan aktual dari masa kemasa. Meskipun sampai saat ini belum ditemukan suatu rumusan ataupun formula penanganan kemiskinan yang dianggap paling signifikan, dan relevan. Pengajian konsep dan strategi penanganan kemiskinan harus terus diupayakan. Adapun teori dan pendekatan dalam mengatasi kemiskinan antara lain:

a. Teori Neo-Liberal

Shanon, Kpicker, Cheyne, O'Brien, dan Belgrave beragumen bahwa kemiskinan merupakan persoalan individual yang disebabkan oleh kelemahan dan pilihan individual yang bersangkutan. Kemiskinan akan hilang sendirinya jika kekuatan pasar diperluas sebesar-besarnya dan pertumbuhan ekonomi dipacu setinggi-tingginya.

b. Teori Marjinal

Teori ini berasumsi bahwa kemiskinan di perkotaan terjadi dikarenakan adanya kebudayaan kemiskinan yang tersosialisasi dikalangan masyarakat tertentu.

Lewis (1966) adalah tokoh dari aliran teori marjinal, konsepnya yang terkenal adalah *culture of poverty*, menurut Luwis masyarakat di dunia menjadi miskin karena adanya budaya kemiskinan dengan karakter apatis, menyerahkan pada nasib, sistem keluarga yang tidak mantap, kurang pendidikan, kurang ambisi membangun masa depan, kejahatan dan kekerasan yang banyak terjadi.

c. Teori Development

Teori Development (bercorak pembangunan) muncul dari teori-teori pembangunan terutama Neo-Liberal. Teori ini mencari akar masalah kemiskinan pada persoalan ekonomi dan masyarakat sebagai suatu kesatuan. Ada tiga asumsi dasar pada teori ini:

- Negara menjadi miskin karena ketidakadaan atribut industrilisasi, modal, kemampuan majerial, dan prasarana yang diperlukan untuk meningkatkan ekonomi.
- Pertumbuhan ekonomi adalah kriteria utama pembangunan yang dianggap dapat mengatasi masalah-masalah tetimpangan.
- Kemiskinan akan hilang dengan sendirinya bila pasar diperluas sebesar-besarnya dan pertumbuhan ekonomi dipacu setinggi-tingginya.

Ketiga asumsi tersebut memperlihatkan bahwa kemiskinan yang terjadi bukan persoalan budaya sebagaimana anggapan teori marjinal melainkan adalah persoalan ekonomi dan pembangunan.

d. Teori Struktural

Teori ini didasari oleh pemikiran yang berasal dari teori ketergantungan yang diperkenalkan oleh Andre Gunder Frak (1967) *Capitalis and the Underdevelopment in Latin Amerika*, dan juga oleh Teothonio Dos Santos dan Samir. Teori structural berasumsi bahwa kemiskinan terjadi bukan karna persoalan budaya dan pembangunan ekonomi, melainkan politik ekonomi Dunia.

2.7 Perencanaan dan Program Pembangunan Belum Dapat Menanggulangi Kemiskinan di Indonesia

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan pada abad ini terlihat telah berhasil membawa kesejahteraan dan berbagai kemudahan bagi manusia dalam menjalani kehidupannya. Meskipun kemudahan hidup dengan munculnya teknologi baru telah menggiring manusia ke arah kehidupan manusia yang lebih baik dan sejahtera, tetapi ternyata hanya sebagian saja yang dapat menikmati kemajuan itu, sebagian lainnya masih tetap bergelimang dengan kehidupan tradisional (Sairin 2002). Menurut Chambers (1987) kemiskinan dianggapnya sebagai proses interaksi dari berbagai faktor yang muncul sebagai akibat dari situasi ketidakadilan, ketidakpastian, ketimpangan, ketergantungan dalam struktur masyarakat. Oleh karena itu, kemiskinan lebih tepat disebut sebagai perangkap kemiskinan. Lima unsur penyebab kemiskinan yang saling terkait yaitu : ketidakberdayaan, kerawanan atau kerentanan, kelemahan fisik, kemiskinan, dan isolasi. Negara miskin akan selalu menjadi negara yang terbelakang dalam pembangunan karena tidak dapat mandiri serta selalu tergantung dengan negara maju. Negara maju identik menjadi negara pusat, sedangkan negara miskin menjadi satelitnya. Konsep ini lebih dikenal dengan istilah “pusat - periferi”. Pola hubungan antara pusat-periferi ini dijelaskan oleh Frank bahwa kemampuan negara satelit dalam pembangunan ekonomi terutama pembangunan industri kapitalis meningkat pada saat ikatan terhadap negara pusat sedang melemah. Pendapat ini merupakan antitesis dari modernisasi yang menyatakan bahwa kemajuan negara dunia ketiga hanya dapat dilakukan dengan hubungan dan difusi dengan negara maju.

Dampak dari ketergantungan ini terhadap dunia ketiga adalah ketimpangan pembangunan, ketimpangan kekayaan, eksploitasi tenaga kerja, serta terbatasnya perkembangan pasar domestik negara dunia ketiga itu sendiri. Asumsi dasar teori dependensi ini menganggap ketergantungan sebagai gejala yang sangat umum ditemui pada negara-negara dunia ketiga, disebabkan faktor eksternal, lebih sebagai masalah ekonomi dan polarisasi regional ekonomi dan kondisi ketergantungan adalah anti pembangunan atau tak akan pernah melahirkan pembangunan. Hal ini juga mempengaruhi pandangan-pandangan teoritis dependensi diatas bahwa kemiskinan di suatu negara disebabkan karena faktor eksternal. Kemiskinan dilihat sebagai akibat dari bekerjanya kekuatan-kekuatan luar yang menyebabkan negara yang bersangkutan gagal melakukan pembangunannya. Munculnya kemiskinan juga diakibatkan oleh bias pembangunan yang hanya bertumpu pada filsafat ketergantungan (dependensi) terhadap negara-negara maju dan modern. Jika pola dan ideology pembangunan masih tetap seperti itu dengan mengadopsi teori dan praktek ideology barat, maka pembangunan Indonesia akan menyisakan sejumlah persoalan seperti kemiskinan. Faktanya pola pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, belum menyentuh kepentingan masyarakat secara universal dan komprehensif, pembangunan hanya mampu diperuntukan untuk kepentingan para pemilik modal, pembangunan hanya dinikmati oleh segelintir orang. Paradigma pemerataan yang dihembuskan oleh pemerintah belum bisa diwujudkan secara nyata dalam dinamika kehidupan masyarakat Indonesia. Akibat dari biasanya pembangunan tersebut, maka terciptalah masyarakat miskin. Karena itu, model pembangunan seharusnya bertumpu pada keinginan masyarakat, sebab kenyataannya antara

keinginan pemerintah sebagai elit pembangunan seringkali bersebrangan dengan keinginan masyarakat pada umumnya.

2.8 Pembangunan dan Kemiskinan

Semarang, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan buruknya tingkat ketimpangan ekonomi di Indonesia, disebabkan belanja pemerintah yang tidak efektif. Termasuk, pertumbuhan ekonomi sebesar lima persen juga belum mampu mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Ketimpangan ekonomi Indonesia masih mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin yang terus bertumbuh. Padahal, pertumbuhan perekonomian dalam negeri sedang bagus.

Enny menjelaskan, apabila persoalan ketimpangan ekonomi ini tidak segera dicarikan jalan keluar, dikhawatirkan bisa menghambat pembangunan berkelanjutan. “Cuma problemnya adalah kemiskinan relatif atau ketimpangan. Ketimpangannya kan naik. Ketimpangan ini jadi problem berat dan PR bagi pembangunan berkelanjutan,” kata Enny. Lebih lanjut Enny menjelaskan, ketimpangan di Tanah Air bukan rahasia lagi. Masalah kemiskinan muncul karena ketidakadilan.

Cita-cita bangsa Indonesia yang menghendaki adanya pemerataan kesejahteraan, hingga kini belum terpenuhi. Akibatnya, jurang ketimpangan ekonomi semakin lebar. “Kemiskinan absolut memang menurun. Tapi kemiskinan dari sisi kedalaman kemiskinan, tingkat keparahan kemiskinan semuanya memburuk,” pungkasnya.

Menurut para sarjana sains sosial dan kemanusiaan, pembangunan adalah sebagai bagian dari proses perubahan sosial yang sifatnya lebih menyeluruh. Pembangunan itu pula dibagi kepada dua kategori besar. Pertama, pembangunan yang direncanakan, dan kedua pembangunan yang tidak direncanakan.

Namun jika dilihat dari segi kebudayaan, pembangunan tidak lain adalah usaha sadar untuk menciptakan kondisi hidup manusia yang lebih baik. Menciptakan lingkungan hidup yang lebih serasi. Menciptakan kemudahan atau fasilitas agar hidup lebih nikmat. Pembangunan adalah suatu intervensi manusia terhadap alam lingkungannya, baik lingkungan alam fisik, maupun lingkungan sosial budaya. Sedangkan kemiskinan lazimnya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Dikatakan berada dibawah garis kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok seperti pangan, pakaian, tempat berteduh, dan lain-lain. (Salim, 1982). Kemiskinan merupakan tema sentral dari perjuangan bangsa, sebagai inspirasi dasar dan perjuangan akan kemerdekaan bangsa, dan motivasi fundamental dari cita-cita menciptakan masyarakat adil dan makmur.

Garis kemiskinan, yang menentukan batas minimum pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok, bisa dipengaruhi oleh tiga hal: (1) persepsi manusia terhadap kebutuhan pokok yang diperlukan, (2) posisi manusia dalam lingkungan sekitar, dan (3) kebutuhan objektif manusia untuk bisa hidup secara manusiawi. Kesemuanya dapat tersimpul dalam barang dan jasa serta tertuangkan dalam nilai uang sebagai patokan bagi penetapan pendapatan minimal yang diperlukan, sehingga garis kemiskinan ditentukan oleh tingkat pendapatan minimal. Di Indonesia pola perkembangan pembangunan juga mengikuti

pendapatan yang dikemukakan Kuznets, artinya golongan miskin kurang terjamah oleh hasil-hasil pertumbuhan ekonomi. Mengapa mereka tidak terangkat, padahal pemerintah telah mengambil kebijaksanaan penyebaran proyek-proyek ke daerah-daerah ke desa-desa. Bila diteliti golongan-golongan miskin yang tidak terjamah oleh hasil-hasil pembangunan karena:

- a. Ketimpangan dalam peningkatan pendidikan. Selama belum ada kewajiban belajar golongan miskin tidak akan mampu berpartisipasi mengenyam peningkatan anggaran pendidikan.
- b. Ketidakmerataan kemampuan untuk berpartisipasi. Untuk berpartisipasi diperlukan tingkat pendidikan, keterampilan, relasi, dan sebagainya. Golongan miskin tidak memilikinya .
- c. Ketidakmerataan pemilikan alat-alat produksi. Golongan miskin tidak memiliki alat-alat produksi, penghasilannya untuk makan saja sudah susah, sehingga tidak mungkin untuk membentuk modal.
- d. Ketidakmerataan kesempatan terhadap modal dan kredit ada. Modal dan kredit pemberiannya menghendaki syarat-syarat tertentu dan golongan miskin tidak mungkin memenuhi persyaratannya.
- e. Ketidakmerataan menduduki jabatan-jabatan. Untuk mendapat pekerjaan yang memberi makan pada keluarga saja susah, apalagi menduduki jabatan-jabatan yang sering memerlukan relasi tertentu dan persyaratan tertentu.
- f. Ketidakmerataan mempengaruhi pasaran. Karena miskin dan pendidikannya rendah, maka tidak mungkin golongan miskin dapat mempengaruhi pasaran.

- g. Ketidakmerataan kemampuan menghindari musibah misalnya penyakit, kecelakaan dan ketidak beruntungan lainnya. Bagi golongan miskin dibutuhkan bantuan untuk dapat mengatasi musibah tersebut. Mengharapkan diri mereka sendiri dapat mengangkat dirinya tanpa pertolongan, sukar dipastikan.
- h. Laju pertumbuhan penduduk lebih memberatkan golongan miskin. Dengan jumlah keluarga besar, mereka sulit dapat menyekolahkan, memberi makan, dan pakaian secukupnya. Hanya keluarga yang kaya atau berpenghasilan besar sajalah yang mampu.

Dapatlah dipastikan bahwa golongan berpenghasilan rendah, karena kurang terjamah pendidikan, tidak memiliki sarana-sarana, misalnya kredit, modal, alat-alat produksi, relasi dan sebagainya, tidak akan mampu berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi dan menikmati pembagian hasil-hasilnya tanpa adanya kebijaksanaan khusus yang ditujukan untuk mengangkat mereka.

2.9 Penelitian Terdahulu

Keaslian Penelitian merupakan suatu syarat sebagai keabsahan suatu karya ilmiah yang dapat ditinjau dari ide dasar penelitian dan perbandingan penelitian dengan penelitian yang sejenis lainnya. Adapun keabsahan penelitian tentang “Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Tambang” dapat dilihat melalui beberapa kajian yang sudah ada sebelumnya. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut ini :

Tabel 2.6 Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti	Judul	Lokasi Penelitian	Variabel	Metode Penelitian	Hasil
1	Restu Sita Harsiwi dan Jawoto Sih Setyono	Tingkat kerentanan ekonomi wilayah kabupaten wonogiri	Kabupaten Wonogiri	<ul style="list-style-type: none"> • pertumbuhan ekonomi • faktor kemiskinan 	metode survei	<p>1. Kabupaten Wonogiri tergolong dalam Kabupaten yang tergolong rentan tinggi apabila dilihat dari segi perekonomian</p> <p>2. Dari 4 faktor dominan yang mempengaruhi kerentanan ekonomi wilayah Kabupaten Wonogiri, Faktor Kemampuan Produksi Barang Dan Jasa memberikan kontribusi paling besar dalam mempengaruhi Tingkat Kerentanan Ekonomi Kabupaten Wonogiri, yaitu 29,91%. Tingginya kontribusi Faktor Kemampuan Produksi Barang Dan Jasa menunjukkan bahwa hasil produksi barang, jasa dan hasil produksi pertanian perkebunan menjadi aspek penting dalam mempengaruhi Tingkat Kerentanan Ekonomi.</p>
2	Mita Natalia dan Muhammad Mukti Alie	Kajian Kemiskinan Pesisir di Kota Semarang (Studi Kasus: Kampung Nelayan Tambak Lorok)	Kampung Nelayan Tambak Lorok	<ul style="list-style-type: none"> • kualitas sumber daya manusia • kondisi infrastruktur • kepemilikan modal dan teknologi 	Metode Kualitatif	Kemiskinan yang terjadi di kampung nelayan tambak lorok disebabkan oleh faktor rendahnya kualitas sumber daya manusia, minimnya kepemilikan modal usaha dan teknologi, dan gaya hidup masyarakat. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dengan rendahnya tingkat pendidikan mayoritas masyarakat yaitu Sekolah Dasar (SD) dan ketrampilan yang dimiliki oleh masyarakat Tambak Lorok. Rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan mengakibatkan masyarakat Tambak Lorok tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh bidang kerja yang lebih luas.
3	Amelia Renggapratiwi	Kemiskinan Dalam Perkembangan Kota Semarang: Karakteristik Dan Respon Kebijakan	Kota Semarang	<ul style="list-style-type: none"> • Karakteristik kemiskinan 	Metode Kualitatif	Respon kebijakan penanganan kemiskinan di Kota Semarang belum sesuai dengan karakteristik kemiskinan yang terjadi pada masing-masing wilayah.

No	Nama Peneliti	Judul	Lokasi Penelitian	Variabel	Metode Penelitian	Hasil
4	Rini Salman	Kajian Sosial Ekonomi Rumah Tangga Miskin di Perkotaan	Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru	<ul style="list-style-type: none"> • Sosial • Ekonomi • Pendapatan • Lapangan Pekerjaan • Tanggungan Keluarga • Pendidikan • Usaha Sampingan 	Deskriptif Kuantitatif	<p>Teridentifikasinya karakteristik sosial ekonomi rumah tangga miskin di kecamatan rumbai pesisir.</p> <p>Teridentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan masyarakat di kecamatan rumbai pesisir</p> <p>Teridentifikasi kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan di perkotaan</p>
5	Gatot Winoto	Pola Kemiskinan Di Permukiman Nelayan Kelurahan Dompok Kota Tanjungpinang	Kota Tanjungpinang	<ul style="list-style-type: none"> • Indikasi Kemiskinan • Pola Kemiskinan • Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan 	Metode Kualitatif	<p>(a) kemiskinan sub-sistensi, dicirikan oleh pendapatan masyarakat di permukiman nelayan Kelurahan Dompok yang rendah, kondisi perumahan yang tidak layak dan minimnya fasilitas air bersih;</p> <p>(b) kemiskinan perlindungan, dimana lingkungan permukiman nelayan yang buruk (sanitasi, sarana pembuangan sampah, polusi) dan tidak adanya jaminan atas hak pemilikan tanah;</p> <p>(c) kemiskinan pemahaman, kualitas pendidikan formal buruk (rendah), terbatasnya keahlian yang menyebabkan terbatasnya kesadaran atas hak, kemampuan dan potensi untuk mengupayakan perubahan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di permukiman nelayan Kelurahan Dompok adalah faktor ekonomi, Sosial, dan faktor pendidikan.</p>

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan proses penelitian yang bersifat deduktif dengan metode penelitian kuantitatif atau metode deskriptif. Pendekatan deduktif adalah pendekatan secara teoritik untuk mendapatkan konfirmasi berdasarkan hipotesis dan observasi yang telah dilakukan sebelumnya. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik dengan metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme (Sugiyono, 2012).

Proses penelitian bersifat deduktif, dimana untuk menjawab rumusan masalah digunakan konsep atau teori sehingga dapat dirumuskan hipotesis. Untuk mengumpulkan data digunakan instrument penelitian. Data yang telah terkumpul selanjutnya di analisis secara kuantitatif dengan menggunakan statistik deskriptif atau inferensial (Sugiyono, 2012).

Teknik pengumpulan data untuk memperoleh data primer dilakukan dengan kegiatan-kegiatan berupa kuisioner, observasi lapangan dan dokumentasi gambar. Adapun instrument penelitian yang digunakan adalah angket dan instrument yang telah tersandar.

Kuesioner dilakukan untuk mendapatkan data terkait. Observasi lapangan untuk mendapatkan informasi langsung terkait faktor-faktor penyebab kemiskinan. Dokumentasi gambar dilakukan untuk menggambarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Data yang diperoleh akan diklasifikasikan menjadi dua kelompok

data yaitu data kuantitatif yang berbentuk angka-angka dan data kualitatif yang dinyatakan dalam kata-kata.

3.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian

3.2.1 Jenis Data Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam studi ini dibutuhkan data dan informasi yang relevan dan lengkap. Adapun jenis data yang diperlukan terdiri atas dua macam, yaitu :

a. **Data Primer**

Data primer adalah data yang langsung dari hasil observasi lapangan (Sangadji, 2010), seperti yang diperoleh dari responden melalui kuesioner dan observasi langsung di lapangan. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui kondisi kualitatif obyek studi. Data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber datanya. Pengumpulan data primer dapat melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan kuesioner.

b. **Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang bukan di usahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misal diambil dari surat kabar dan majalah ataupun publikasi lainnya (Marzuki, 2005). Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan yang telah disusun dalam arsip yang didokumentasikan maupun tidak didokumentasikan.

3.2.2 Sumber Data Penelitian

Data yang diperoleh kaitannya dengan penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh dari instansi-instansi yang terkait sebagai berikut, yaitu:

- a. Kondisi penduduk miskin, kondisi sarana prasarana ekonomi, yang bersumber dari wawancara tokoh-tokoh masyarakat dan sebaran kuisisioner.
- b. Data kemiskinan, seperti jumlah KK, tingkat perceraian, tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan yang bersumber dari pengamatan observasi.
- c. Data BDT, data kependudukan Kecamatan Tambang diperoleh dari BAPPEDA Kabupaten Kampar, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar dan Dinas Sosial Kabupaten Kampar.

3.3 Tahapan Penelitian

3.3.1 Tahap Persiapan

Tahap persiapan diperlukan dalam kegiatan penelitian sehingga nantinya dapat diperoleh hasil serta data-data yang lengkap dan akurat. Tahap persiapan ini meliputi:

- a. Perumusan Masalah, Tujuan, dan Sasaran Studi

Penentuan masalah untuk penelitian ini didasarkan pada kondisi yang ada pada saat ini, dan permasalahan perkembangan tersebut perlu dikaji guna memperoleh keadaan perkembangan pada saat ini, sehingga dapat dijadikan referensi dalam melakukan perencanaan serta perumusan tujuan diperlukan

sebagai salah satu upaya untuk mengetahui perkembangan permasalahan yang di tentukan sebelumnya.

b. Penentuan Lokasi Studi

Lokasi studi yang diangkat dalam studi ini adalah kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, karena Kecamatan Tambang merupakan salah satu kecamatan yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi di Kabupaten Kampar berdasarkan data BDT Kabupaten Kampar 2018 jumlah penduduk miskin di kecamatan Tambang sebanyak 21.637 jiwa dari total penduduk sebanyak 79.326 jiwa.

c. Penentuan Kebutuhan Data

Untuk mempermudah pelaksanaan survei serta analisis yang akan dilakukan, diperlukan inventarisasi kebutuhan data maupun informasi yang mendukung penelitian.

d. Pengumpulan Studi Pustaka

Penelitian ini untuk mempermudah dalam pembuatan metodologi serta pemahan terhadap permasalahan yang diambil.

e. Perumusan Rencana Pelaksanaan Survei

Tahap ini merupakan tahap lanjutan setelah diperoleh hasil survey awal yang sifatnya sementara, sehingga dapat ditentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melengkapi data maupun informasi yang masih kurang, baik melalui observasi lapangan, wawancara kepada beberapa responden yang dianggap mengetahui mengenai permasalahan yang diambil

3.3.2 Tahap Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang akurat sebagai berikut:

a. Kuesioner

Suroyoanwar (2009) Angket atau kuisisioner merupakan sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis tentang data faktual atau opini yang berkaitan dengan diri responden, yang dianggap fakta atau kebenaran yang diketahui dan perlu dijawab oleh responden. Menurut komalasari (2011) kuesioner sebagai suatu alat pengumpul data dalam assessment non tes, berupa serangkaian yang diajukan kepada responden (peserta didik, orang tua atau masyarakat).

b. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (Riduwan 2004). Menurut Hanna Djumhana, pengertian observasi adalah suatu metode ilmiah yang paling utama dalam ilmu pengetahuan empiris serta masih mendapat pengakuan dari dunia penelitian karya ilmiah sebagai metode yang sering digunakan dalam melakukan pengumpulan data.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui pihak lain, atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip yang dipublikasikan atau tidak dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain (Sekaran, 2006).

- d. Wawancara atau *interview* adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara dengan *Stakeholder* untuk memperoleh data yang bersifat fisik dan non fisik yang dialami masyarakat.

3.4 Populasi dan Teknik Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut Arikunto (2002), pengertian populasi adalah objek yang secara keseluruhan digunakan untuk penelitian. Jadi apabila ada seseorang yang hendak meneliti semua karakteristik dan elemen dalam suatu wilayah penelitian, tentu saja penelitian tersebut termasuk dalam penelitian populasi.

Sedangkan Ismiyanto berpendapat bahwa populasi adalah totalitas atau keseluruhan subjek penelitian baik benda, orang, ataupun suatu hal lain yang di dalamnya bisa diambil informasi penting berupa data penelitian. Pengertian populasi dan sampel juga dijelaskan oleh Nursalam (2003). Beliau menjelaskan bahwa populasi merupakan suatu keseluruhan dari variabel penting yang akan diteliti. Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah masyarakat miskin yang ada di Kecamatan Tambang. Jumlah masyarakat miskin di Kecamatan Tambang berjumlah 21.637 jiwa.

3.4.2 Teknik Sampel

Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan terutama mengenai tingkat kemiskinan, akan dilakukan melalui penyebaran kuesioner untuk disampaikan kepada

responden yaitu masyarakat miskin yang bertempat tinggal di Kecamatan Tambang.

Rumus sampel yang digunakan pada penelitian ini ialah rumus Slovin.

$$\begin{aligned}n &= \frac{N}{1 + Ne^2} \\n &= \frac{21.637}{1 + 21.637 (0.05)^2} \\n &= \frac{21.637}{1 + 21.637 (0,0025)} \\n &= \frac{21.637}{1 + 54,09} \\n &= \frac{21.637}{55,09} \\n &= 392\end{aligned}$$

Dimana:

n : Jumlah sampel minimal e : 5%

N : Populasi

Dengan tingkat presisi atau tingkat kesalahan sebesar 5%, didapat jumlah sampel masyarakat miskin di Kecamatan Tambang sebanyak 392, dengan asumsi jumlah masyarakat miskin di setiap desa sama.

Teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel yaitu dengan cara *simple random sampling*. Sedangkan *simple random sampling* adalah suatu cara pengambilan sampel yang memberikan kesempatan atau peluang yang sama untuk diambil kepada setiap elemen populasi.

Sampling ini digunakan dimana populasi dianggap homogen berdasarkan kriteria tertentu. Pengambilan unit sampel dari *sampling frame* dapat dilakukan dengan undian maupun dengan pertolongan bilangan random. Kelebihan teknik

sampling ini adalah pelaksanaannya mudah, namun kelemahannya yaitu letak populasi jauh dan menyebar.

3.5 Teknik Analisis

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan *verifikasi* data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Analisis data juga bisa dikatakan sebagai sebuah proses berkelanjutan dalam penelitian, dengan analisis awal menginformasikan data yang kemudian dikumpulkan.

Metode analisis data adalah hal yang terpenting dalam sebuah penelitian. Tanpa adanya analisis data, maka kesahihan sebuah penelitian masih diragukan. Karena dengan analisis data penelitian itu akan menghasilkan hasil penelitian yang akurat.

Metode analisis data sangat mempengaruhi hasil penelitian, jika metode yang digunakan sesuai dengan objek penelitian, maka hasilnya akan dapat diterima, sedangkan jika tidak sesuai, maka penelitian itu pun dianggap gagal, karena itu, ketika melakukan sebuah penelitian, harus mempertimbangkan objek penelitian dan menentukan metode yang akan digunakan dalam analisis data.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini di urutkan berdasarkan dengan tujuan dan sasaran penelitian, adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian, yakni:

3.5.1 Karakteristik Kemiskinan

Untuk mengetahui karakteristik kemiskinan di Kecamatan Tambang proses analisis yang digunakan adalah dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh gambaran yang mendalam tentang karakteristik kemiskinan di Kecamatan Tambang. Dimana berdasarkan kriteria yang dikeluarkan oleh Bappenas maka beberapa jenis karakteristik kemiskinan seperti kesehatan, (penolong persalinan, vaksinasi, jaminan kesehatan), pendidikan (partisipasi sekolah, tahun sekolah, buta huruf), dan standar hidup (sanitasi, air minum, listrik, bahan bakar memasak, kondisi rumah, kepemilikan rumah, kepemilikan telepon) menjadi acuan dalam memberikan gambaran yang mendalam tentang karakteristik kemiskinan, dengan itu dilakukan proses analisis dengan mengidentifikasi karakteristik kemiskinan dilokasi penelitian.

3.5.2 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kemiskinan

Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan masyarakat miskin dilakukan dengan menggunakan analisis kuantitatif dengan analisis Regresi linear memakai alat bantu komputer dengan mengoperasikan software SPSS (*Statistic Package For Social Sciences*). untuk mencari faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

Dalam statistika, regresi linear adalah sebuah pendekatan untuk memodelkan hubungan antara variabel terikat Y dan satu atau lebih variabel bebas yang disebut X. Salah satu kegunaan dari regresi linear adalah untuk melakukan prediksi berdasarkan data-data yang telah dimiliki sebelumnya. Hubungan di antara variable-variabel

tersebut disebut sebagai model regresi linear. Berdasarkan penggunaan variable bebas, maka regresi linear dapat dibagi menjadi dua, yaitu regresi linear univariate dan regresi linear multivariate.

Secara umum regresi linear terdiri dari dua, yaitu regresi linear sederhana yaitu dengan satu buah variabel bebas dan satu buah variabel terikat; dan regresi linear berganda dengan beberapa variabel bebas dan satu buah variabel terikat. Analisis regresi linear merupakan metode statistik yang paling jamak dipergunakan dalam penelitian-penelitian sosial, terutama penelitian ekonomi. Program komputer yang paling banyak digunakan adalah SPSS (*Statistic Package For Social Sciences*).

Metode analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah metode regresi untuk melihat keterkaitan antar variable. Kemiskinan dalam kajian ini menjadi variabel terikat (*dependent variable*). Kemiskinan dipengaruhi oleh variabel bebas (*independent variable*) terdiri dari status pekerjaan, pendapatan perbulan, dan tiga variabel dami (*dummy variable*) yang terdiri dari tingkat pendidikan, jumlah tanggungan, dan modal usaha.

Secara umum persamaan linear sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 D_1 + \beta_4 D_2 + \beta_5 D_3 + e$$

Dimana:

Y = Kemiskinan

X₁ = Status pekerjaan

X₂ = Pendapatan perbulan

D_1 = Tingkat pendidikan

Nilai $D_1 = 1$: rendah (SD-SMP)

Nilai $D_1 = 2$: tinggi (SMA-keatas)

D_2 = Jumlah tanggungan keluarga

Nilai $D_2 = 1$: tanggungan > 3 orang

Nilai $D_2 = 2$: tanggungan 1-3 orang

D_3 = Modal usaha

Nilai $D_3 = 1$: tidak memiliki modal

Nilai $D_3 = 2$: memiliki modal

β_0 = *Intersept/konstanta*

e = *error term/disturbance term*

$\beta_1\beta_2\beta_3\beta_4\beta_5$ merupakan parameter peubah penjelas yang akan diduga

Model persamaan linear diatas akan diestimasi dengan program komputer SPSS (Statistical Product and Service Solutions). Tingkat signifikan yang digunakan untuk menguji hipotesis baik secara individu maupun secara bersama-sama adalah pada $\alpha = 5\%$ atau pada tingkat keyakinan 95% dengan menggunakan uji t.

Adapun Definisi Operasional yang digunakan dalam analisis regresi dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1 Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Alat Ukur	Hasil Ukur
1. Tingkat Pendidikan	Jenjang sekolah yang pernah diraih dan mendapatkan ijazah	Kuesioner	1. Rendah (SD dan SMP) 2. Tinggi (SMA ke atas)
2. Status pekerjaan	Status pekerjaan kepala rumah tangga, apakah bekerja atau tidak bekerja	Kuesioner	1. Tidak bekerja 2. Bekerja
3. Pendapatan penduduk	Tingkat penghasilan keluarga diukur dari pengeluaran rata-rata perbulan dalam satuan rupiah	Kuesioner	1. Rendah bila pendapatan 1 bulan <Rp.1.500.000,- 2. Tinggi bila pendapatan 1 bulan >Rp.1.500.000,-
4. Jumlah tanggungan keluarga	Jumlah anggota keluarga yang tinggal menetap dalam satu rumah, dimana biaya hidupnya menjadi tanggungan kepala rumah tangga, dalam satuan orang	Kuesioner	1. Tanggungan keluarga dikategorikan tinggi apabila > 3 orang 2. Tanggungan keluarga dikategorikan rendah apabila 1-3 orang
5. Modal usaha	Keterbatasan modal merupakan terbatasnya modal yang berguna untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan tujuan memperoleh penghasilan	Kuesioner	1. Tidak memiliki modal 2. Memiliki modal

Sumber : Hasil Analisis, 2019

3.5.3 Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Dalam menyusun rancangan program, perlu terlebih dahulu dianalisis dan ditetapkan masalah prioritas. Setelah itu ditetapkan suatu strategi pengembangan dan penanggulangan, selanjutnya disusun rancangan program untuk direkomendasikan kepada pihak terkait. Perancangan program dimaksud dilakukan dengan metode LFA (*logical Framework Analysis*) dan melibatkan Stakeholder terkait.

Pemilihan metode ini didasarkan pada pemikiran bahwa metode ini bisa digunakan untuk menganalisis masalah yang diawali dengan menentukan masalah pokok dan menentukan masalah prioritas. Dalam hal ini metode LFA lebih aplikatif untuk dilaksanakan dalam upaya mengatasi dampak yang timbul dan mampu mengakomodir sebahagian keinginan masyarakat.

Prosedur yang dilakukan dalam metode ini:

- a. Mengadakan pendekatan dan komunikasi dengan Stakeholder terkait tentang hasil kajian melalui kuesioner.
- b. Menganalisis informasi yang didapat dari Stakeholder tersebut, kemudian disusun suatu metode usaha-usaha penanggulangan kemiskinan yang bisa didukung pemerintah.
- c. Melakukan sosialisasi terutama kepada kelompok sasaran, sehingga model program penanggulangan kemiskinan tersebut dapat dilaksanakan.

Logical Framework Analysis (LFA) merupakan suatu instrumen analisis, presentasi dan manajemen yang dapat membantu perencanaan untuk menganalisis situasi eksisting, membangun hirarki logika dari tujuan yang akan dicapai, mengidentifikasi risiko potensial yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan hasil, membangun cara untuk melakukan monitoring selama pelaksanaan implementasi proyek (Lutfi, 2015).

Penggunaan *logframe* pada sebuah proyek atau program dilakukan dengan menggunakan matriks empat kali empat. Matriks yang dimaksud memiliki empat baris dan kolom. Baris pertama berisikan *goal*, mewakili maksud utama dari proyek atau program, biasa dinyatakan dalam maksud utama dari pembangunan. Baris kedua berisikan tujuan, dimana tujuan ini merupakan yang ingin dicapai oleh suatu proyek untuk mendukung maksud utama proyek (baris pertama). Baris ketiga berisikan keluaran, merupakan hasil yang diharapkan dari proyek untuk mendukung mencapai tujuan (baris kedua). Baris keempat merupakan baris terakhir, yakni kegiatan yang merupakan daftar kegiatan yang harus dilakukan untuk memperoleh hasil seperti baris ketiga. Langkah-langkah dalam penyusunan kerangka kerja logis (*Logical Framework Analysis* (LFA)), yakni :

- a. Menetapkan tujuan (*purpose*) yang akan dicapai oleh program tersebut.
- b. Menetapkan sasaran (*goal*) dimana program akan memberikan sumbangsuhnya.
- c. Menetapkan keluaran (*output*) untuk mencapai tujuan (*purpose*)
- d. Menetapkan aktivitas guna mencapai setiap *output*.

Analisis LFA (*logical framewok analysis*) bertujuan untuk mengevaluasi strategi dari Pemerintah mengenai kinerja dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang berdasarkan kepada perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam penanganan kemiskinan. Analisis ini nantinya akan dapat menghasilkan sebuah strategi dalam mengurangi dan menimalisir terjadinya kemiskinan di Kecamatan Tambang. Pendekatan analisis LFA (*logical framewok analysis*) dimulai dengan menganalisis situasi, analisis masalah, dan analisis tujuan.

Tabel 3.2 Stakeholder yang Terlibat

No	Stakeholder	Keterangan
1	Dinas Sosial	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
2	BPS	Bidang Statistik Sosial
3	Kantor Camat	Seksi Kesejahteraan Sosial
4	Kantor Desa	Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA)
5	Masyarakat	Masyarakat Miskin

Sumber: Hasil Analisis, 2019

3.6 Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2014) dalam Purnama (2015) variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Setelah mengkaji teori dan konsep dari berbagai literature yang ada maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa untuk mengidentifikasi karakteristik kemiskinan, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan dan strategi penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Tambang. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut :

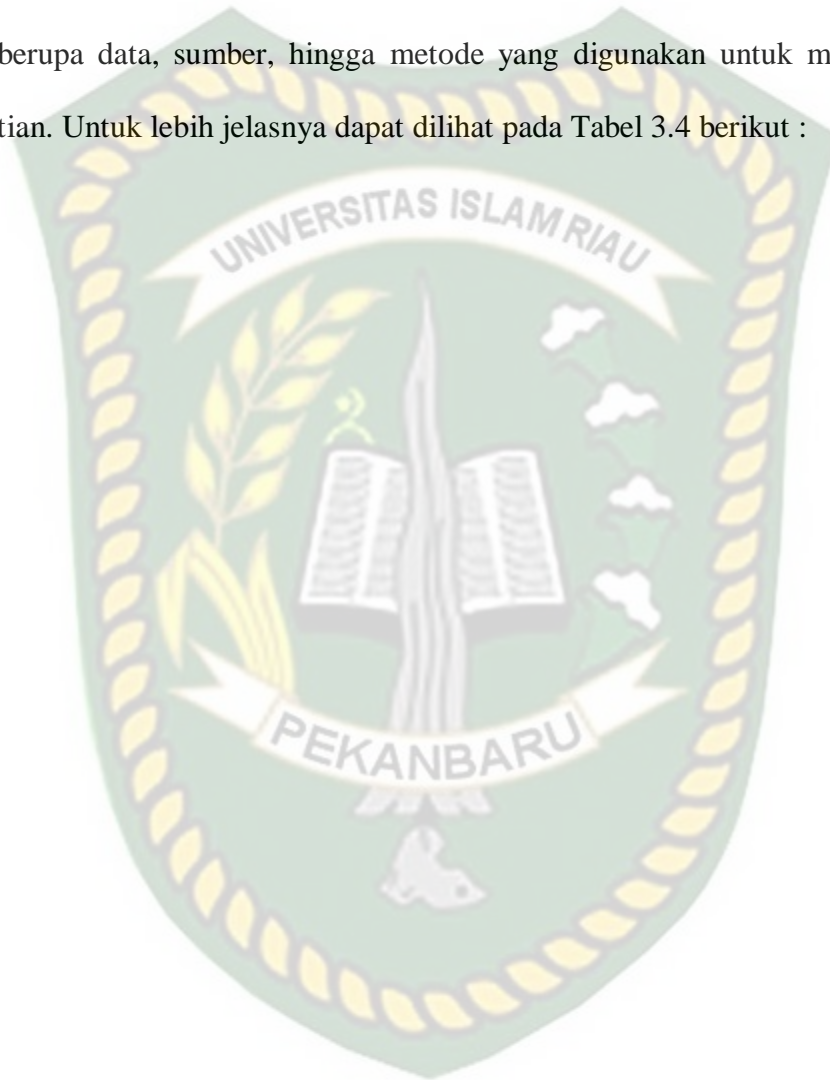
Tabel 3.3 Variabel Penelitian

No	Tujuan	Variabel	Indikator
1	Untuk mengetahui karakteristik kemiskinan di Kecamatan Tambang	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Penolong persalinan • Vaksinasi • Jaminan kesehatan
		Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi sekolah
		Standar hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Sanitasi • Air minum • Listrik • Kondisi rumah (lantai, dinding, atap rumah)
2	Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan di Kecamatan Tambang	Sosial ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat pendidikan • Status pekerjaan • Pendapatan penduduk • Jumlah tanggungan keluarga • Modal usaha
3	Untuk merumuskan strategi penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Tambang	Strategi penanggulangan kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> • Faktor-faktor penyebab kemiskinan • Kebijakan dan program • Keterkaitan masyarakat

Sumber: Hasil Analisis, 2019

3.7 Desain Penelitian

Desain penelitian ini berisi tentang gambaran variabel-variabel yang digunakan dalam melakukan penelitian atau semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian (Nazir, 2003). Desain Penelitian berisikan yaitu berupa data, sumber, hingga metode yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut :



Tabel 3.4 Desain Penelitian

Tujuan	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode pengambilan data	Metode Analisis	Teknik Analisis	Output
Untuk mengetahui karakteristik kemiskinan di Kecamatan Tambang	<ul style="list-style-type: none"> • kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penolong persalinan • Vaksinasi • Jaminan kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • BPS • Pengamatan lapangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Observasi • Kunjungan dinas 	Deskriptif kualitatif	Deskriptif	Gambaran umum karakteristik kemiskinan di Kecamatan Tambang
	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi sekolah 					
	<ul style="list-style-type: none"> • Standar hidup 	<ul style="list-style-type: none"> • Sanitasi • Air minum • Listrik • Kondisi rumah 					
Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan di Kecamatan Tambang	Sosial ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat pendidikan • Status pekerjaan • Pendapatan • Jumlah tanggungan keluarga • Modal usaha 	Responden	<ul style="list-style-type: none"> • Kuesioner • Observasi • Wawancara 	Deskriptif kuantitatif	Analisis Regresi linear	Teridentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di kecamatan Tambang

Tujuan	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode pengambilan data	Metode Analisis	Teknik Analisis	Output
Untuk merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Tambang	Strategi penanggulangan kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> • Faktor-faktor penyebab kemiskinan • Kebijakan dan program • Keterkaitan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas sosial • BPS • Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Observasi • Wawancara • Kunjungan dinas terkait 	Deskriptif kualitatif	Analisis LFA	Merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan di kecamatan Tambang

Sumber: Hasil Analisis, 2019

BAB IV

GAMBARAN UMUM WILAYAH

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Kampar

Sejarah perkembangan Kabupaten Kampar diawali dengan diterbitkannya surat keputusan gubernur militer Sumatera Tengah Nomor: 10/GM/STE/49 tanggal 9 November 1949 yang menyatakan bahwa Kabupaten Kampar merupakan salah satu daerah tingkat II di Provinsi Riau terdiri dari Kawedanan Palalawan, Pasir Pangarayan, Bangkinang dan Pekanbaru luar kota dengan ibukota Pekanbaru. Kemudian berdasarkan Undang-Undang No. 12 tahun 1956 ibukota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang dan baru terlaksana tanggal 6 Juni 1967. Semenjak terbentuk Kabupaten Kampar pada tahun 1949 sampai tahun 1967 ibukota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1956.

Pada awalnya Kabupaten Kampar terdiri dari 19 kecamatan dengan luas ±30.569,56 Km², kemudian berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri No. 105 tahun 1994 dan PP No. 8 tahun 1995 dan Peraturan Daerah Tingkat I Riau No. 06 tahun 1995, Kabupaten Kampar ditetapkan sebagai salah satu proyek percontohan otonomi.

Dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah di tingkat kabupaten dan kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, bermunculan daerah kabupaten/kota yang baru di Provinsi Riau yang berasal dari pemekaran beberapa

kabupaten, termasuk di Kabupaten Kampar. Kabupaten/kota baru di Provinsi Riau yang dimekarkan adalah menjadi tiga wilayah pemerintahan, yaitu:

1. Kabupaten Kampar terdiri dari 8 kecamatan meliputi 153 desa dan 8 kelurahan dengan ibukota Bangkinang
2. Kabupaten Palalawan terdiri dari 4 kecamatan meliputi 81 desa dan 4 kelurahan dengan ibukota Pangkalan Kerinci
3. Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari 7 kecamatan meliputi 89 desa dan 6 kelurahan dengan ibukota Pasir Pangaraian.

Setelah pemekaran, Kabupaten Kampar hanya terdiri dari 8 kecamatan, kemudian pada tahun 2003 dimekarkan menjadi 13 kecamatan. Pada tahun 2003, pemerintah pusat mengeluarkan UU No. 11 tahun 2003 yang merevisi UU No. 53 tahun 1999, yaitu dikeluarkannya Kecamatan Tapung Kiri dari wilayah Kabupaten Kampar, sehingga Kabupaten Kampar hanya memiliki 12 kecamatan. Kemudian pada tahun 2005, wilayah Kabupaten Kampar dimekarkan kembali menjadi 20 kecamatan dan pada tahun 2010 dimekarkan kembali menjadi 21 kecamatan dengan luas \pm 10.983,46 Km² atau 1.098.346 ha.

4.1.1 Luas Wilayah dan Batas Administrasi

Kabupaten Kampar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau. Kabupaten Kampar terdiri dari 21 kecamatan dan 250 desa/kelurahan. Kecamatan yang berada di Kabupaten Kampar yaitu Kampar Kiri, Kampar Kiri Hulu, Kampar Kiri Hilir, Gunung Sahilan, Kampar Kiri Tengah, XIII Koto Kampar,

Koto Kampar Hulu, Kuok, Salo, Tapung, Tapung Hulu, Tapung Hilir, Bangkinang Kota, Bangkinang, Kampar, Kampar Timur, Rumbio Jaya, Kampar Utara, Tambang, Siak Hulu, dan Perhentian Raja. Jumlah kelurahan dan desa Menurut kecamatan di Kabupaten Kampar tersaji pada Tabel 4.1 Berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Desa Menurut Kecamatan di Kabupaten Kampar Tahun 2017

No	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Jumlah
1	Kampar Kiri	1	19	20
2	Kampar Kiri Hulu	-	24	24
3	Kampar Kiri Hilir	1	7	8
4	Gunung Sahilan	-	11	11
5	Kampar Kiri Tengah	-	9	9
6	XIII Koto Kampar	1	12	13
7	Koto Kampar Hulu	-	6	6
8	Kuok	-	9	9
9	Salo	-	6	6
10	Tapung	-	25	25
11	Tapung Hulu	-	14	14
12	Tapung Hilir	-	16	16
13	Bangkinang Kota	2	4	6
14	Bangkinang	2	9	11
15	Kampar	1	18	19
16	Kampa	-	9	9
17	Rumbio Jaya	-	7	7
18	Kampar Utara	-	8	8
19	Tambang	-	17	17
20	Siak Hulu	-	12	12
21	Perhentian Raja	-	5	5

No	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Jumlah
	Jumlah	8	242	250

Sumber : RPJMD Kabupaten Kampar 2017-2022

Luas wilayah Kabupaten Kampar adalah 11.289.28 km². Kecamatan Tapung mempunyai luas wilayah terbesar yaitu 1.365,97 km² atau sekitar 12,1 persen dari luas wilayah Kabupaten Kampar sedangkan Kecamatan Rumbio Jaya mempunyai luas wilayah terkecil yaitu 76,92 km² atau sekitar 0,7 persen dari luas wilayah Kabupaten Kampar. Untuk luas wilayah menurut kecamatan dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2 Luas Wilayah Kabupaten Kampar Menurut Kecamatan Tahun 2017

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase (%)
1	Kampar Kiri	915.33	8,1
2	Kampar Kiri Hulu	1.301.25	11,5
3	Kampar Kiri Hilir	759.74	6,8
4	Gunung Sahilan	597.97	2,9
5	Kampar Kiri Tengah	330.59	5,3
6	XIII Koto Kampar	732.40	12,4
7	Koto Kampar Hulu	674.00	6,0
8	Kuok	151.41	1,3
9	Salo	207.83	1,8
10	Tapung	1.365.97	12,1
11	Tapung Hulu	1.169.15	10,3
12	Tapung Hilir	1.013.56	8,9
13	Bangkinang Kota	177.18	1,6
14	Bangkinang	253.50	2,3

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase (%)
15	Kampar	136.28	1,3
16	Kampa	173.08	1,5
17	Rumbio Jaya	76.92	0,7
18	Kampar Utara	79.84	0,8
19	Tambang	371.94	3,3
20	Siak Hulu	689.80	6,1
21	Perhentian Raja	111.54	1,0
	Jumlah	11.289.28	100

Sumber : RPJMD Kabupaten Kampar 2017-2022

Secara administratif Kabupaten Kampar memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi.
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat.
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.

4.1.2 Letak dan Kondisi Geografi

Secara astronomis, Kabupaten Kampar terletak antara 01⁰00'40'' Lintang Utara dan 00⁰27'00'' Lintang Selatan dan antara 100⁰28'30''– 101⁰14'30'' Bujur Timur dan dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 0⁰.

Topografi Kabupaten Kampar sebagian besar merupakan daerah perbukitan yang berada di sepanjang Bukit Barisan yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dengan ketinggian 0-500 meter dari permukaan laut dan kemiringan 0-40 persen. Topografi wilayah umumnya datar, landai hingga sangat curam. Terbentuk dari batuan sedimen dan meta sedimen, batuan metamorfosis, dan terobosan yang tersebar di seluruh wilayah. Wilayah bagian barat ke arah pantai, terbentuk dari formasi geologi batuan metamorfosis, batuan sedimen, sedangkan wilayah timur terbentuk dari batuan sedimen. Wilayah Kampar juga dilalui sesar membujur dari timur laut ke arah tenggara, terdapat di wilayah bagian barat (perbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat) di kawasan Batu Bersurat.

Kabupaten Kampar memiliki banyak sungai, baik sungai besar maupun sungai-sungai kecil, alur, danau dan rawa-rawa. Perairan umum dimanfaatkan untuk perikanan darat dan tempat penangkapan (*fishing ground*) berbagai jenis ikan perairan, sedangkan sungai-sungai besar (Sungai Kampar, Sungai Siak dan Sungai Tapung) dimanfaatkan untuk jalur perhubungan antar desa. Memiliki dua sungai besar dan beberapa anak sungai, diantaranya :

- a. Sungai Kampar, mengalir dari punggung Bukit Barisan ke arah timur membelah wilayah Kabupaten Kampar dengan melalui beberapa kecamatan diantaranya Kecamatan XIII Koto Kampar, Kecamatan Bangkinang, Kecamatan Kampar, Kecamatan Kampar Timur, Kecamatan Siak Hulu dan Kecamatan Tambang, yang dilalui oleh Sungai Kampar Kanan dan Sungai Kampar Kiri. Sungai Kampar dengan panjang \pm 413,5 kilometer dengan kedalaman rata-rata 7,7 meter dan lebar rata-rata 143 meter.

- b. Sungai Tapung yaitu Sungai Tapung Kanan dan Sungai Tapung Kiri, kedua hilir sungai ini menyatu ke Sungai Siak. Sungai Siak bagian hulu mempunyai panjang \pm 90 kilometer dengan kedalaman rata-rata 8-12 meter.

4.1.3 Klimatologi

Secara umum Kabupaten Kampar beriklim tropis dengan suhu udara rata-rata 27°C - 33°C , kelembaban nisbi rata-rata 78-94 persen dan curah hujan rata-rata 283 mm per tahun. Selama tahun 2016 jumlah curah hujan tertinggi di Kabupaten Kampar terjadi di bulan Januari yaitu 1.412 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 24 hari. Kecamatan Koto Kampar Hulu memiliki curah hujan tertinggi sedangkan Kecamatan Kampar Timur dan Kecamatan Rumbio Jaya memiliki jumlah hari hujan terbanyak.

4.1.4 Kependudukan

Penduduk merupakan modal dasar pembangunan, yang mana merupakan aset penting dalam menggerakkan pembangunan suatu daerah. Diharapkan bukan hanya jumlahnya saja yang besar tetapi kualitas penduduknya juga baik. Penduduk Kabupaten Kampar berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2016 sebanyak 812.702 jiwa yang terdiri atas 417.085 jiwa penduduk laki-laki dan 395.617 jiwa penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin (perbandingan penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan) adalah 105 yang berarti jumlah penduduk laki-laki 5 persen lebih banyak dibanding jumlah penduduk perempuan.

Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2015, penduduk Kabupaten Kampar tahun 2016 mengalami pertumbuhan sebesar 2,48 persen dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 2,42 persen dan penduduk perempuan sebesar 2,55 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2015 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 105,43.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Kampar tahun 2016 mencapai 72 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Distribusi penduduk menurut kecamatan sangat bervariasi dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Kampar dengan kepadatan sebesar 379 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Kampar Kiri Hulu sebesar 9 jiwa/km².

Sementara itu jumlah rumah tangga mengalami pertumbuhan sebesar 2,55 persen dari tahun 2015. Dari tahun 2012 sampai tahun 2016, jumlah penduduk Kabupaten Kampar terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertambahan kepadatan penduduk sebesar 2 jiwa/Km² setiap tahunnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1	Kampar Kiri	915.33	30.676	34
2	Kampar Kiri Hulu	1.301.25	12.100	9
3	Kampar Kiri Hilir	759.74	11.702	15
4	Gunung Sahilan	597.97	20.218	34
5	Kampar Kiri Tengah	330.59	27.558	83
6	XIII Koto Kampar	732.40	24.673	34
7	Koto Kampar Hulu	674.00	19.346	29
8	Kuok	151.41	25.726	170
9	Salo	207.83	26.518	128
10	Tapung	1.365.97	98.031	72
11	Tapung Hulu	1.169.15	84.517	72
12	Tapung Hilir	1.013.56	61.603	61
13	Bangkinang Kota	177.18	40.639	229
14	Bangkinang	253.50	33.735	133
15	Kampar	136.28	51.601	379
16	Kampa	173.08	25.129	145
17	Rumbio Jaya	76.92	17.540	228
18	Kampar Utara	79.84	17.609	221
19	Tambang	371.94	62.640	168
20	Siak Hulu	689.80	103.099	149
21	Perhentian Raja	111.54	18.042	162

Sumber : RPJMD Kabupaten Kampar 2017-2022

4.1.5 Penggunaan Lahan

Secara umum sebagian besar lahan di Kabupaten Kampar merupakan milik perorangan dan selebihnya adalah lahan negara atau tanah negara yang dikuasakan kepada badan hukum. Lahan negara berupa kawasan hutan dan kawasan konservasi lahan badan usaha berupa lahan perkebunan sawit dan hutan produksi. Sedangkan lahan rakyat umumnya berupa hutan rakyat, kebun sawit dan karet.

Penggunaan lahan di Kabupaten Kampar terbagi menjadi sembilan jenis penggunaan yaitu lahan sawah; pekarangan, bangunan dan lahan sekitarnya; tegal kebun; ladang huma; padang rumput; sementara tidak diusahakan; hutan negara dan hutan rakyat; perkebunan; dan lain-lain. Jenis penggunaan lahan terbesar adalah lahan perkebunan dengan luasan sebesar 415.705 ha atau 37,11 persen dari luas wilayah Kabupaten Kampar. Sedangkan luasan terkecil adalah lahan sawah dengan jumlah luasan sebesar 6.546 ha atau sekitar 0,58 persen dari luas wilayah Kabupaten Kampar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut :

Tabel 4.4 Luas Tanah Menurut Penggunaan Tahun 2017

Jenis Penggunaan Lahan	Jumlah (Ha)	Persentase (%)
Lahan Sawah	6.546	0,58
Perkarangan, Bangunan Dan Lahan Sekitarnya	386.450	34,5
Tegal Kebun	90.647	8,09
Ladang Huma	49.984	4,46
Padang Rumput	9.321	0,83
Lahan Tidak Ditanami	-	-
Kolam	61.671	5,51

Jenis Penggunaan Lahan	Jumlah (Ha)	Persentase (%)
Sementara Tidak Diusahakan	32.207	2,88
Hutan Negara Dan Hutan Rakyat	67.532	6,03
Perkebunan	415.705	37,11
Jumlah	1.120.060	100

Sumber : RPJMD Kabupaten Kampar 2017-2022

4.2 Gambaran Umum Kecamatan Tambang

4.2.1 Kondisi Geografis

a. Luas Wilayah

Kecamatan Tambang adalah salah satu kecamatan yang berbatasan langsung dengan ibukota Provinsi Riau dengan luas kecamatan 489.91 Km² yang dilewati oleh jalan negara sepanjang 36 km kearah barat. Di sepanjang jalan nasional kearah barat terletak beberapa desa yaitu Desa Rimbo Panjang, Desa Kualu Nenas, Desa Sungai Pinang, Desa Balam Jaya, Desa Tambang, dan Desa Palung Raya, sedangkan kearah timur hanya dua desa yaitu Desa Tarai Bangun dan Desa Kualu.

Selain dari jalan nasional, kecamatan ini dilintasi oleh Sungai Kampar dari arah barat ke timur dan terdapat pula beberapa desa yang berada di tepi Sungai Kampar yaitu Desa Kuapan, Desa Tambang, Desa Palung Raya, Desa Pulau Permai, Desa Kemang Indah, Desa Aursati, Desa Gobah, Desa Padang Luas, Desa Terantang, Desa Parit Baru, Desa Kualu, Desa Teluk Kanidai sepanjang + 35 Km.

Batas-batas daerah Kecamatan Tambang adalah sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tapung dan Kota Pekanbaru.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kampar Kiri Tengah dan Perhentian Raja.
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kampar Timur.
4. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Siak Hulu dan Kota Pekanbaru

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut :

Tabel 4.5 Luas Wilayah Kecamatan Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2017

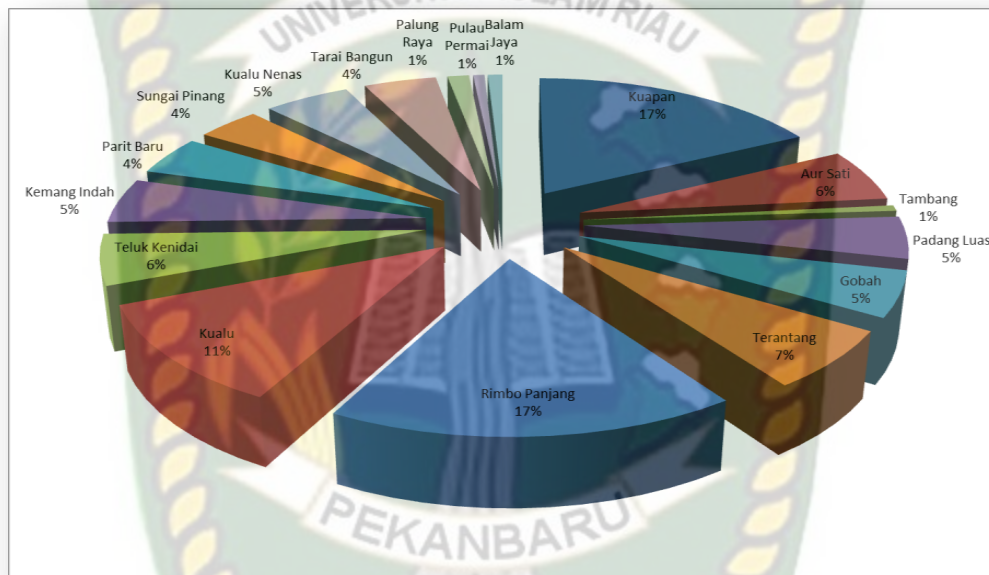
Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase (%)
1. Kuapan	85.29	17.4
2. Aur sati	29	5.9
3. Tambang	3.18	0.6
4. Padang Luas	23.04	4.7
5. Gobah	25	5.1
6. Terantang	32.06	6.5
7. Rimba Panjang	85	17.4
8. Kualu	55	11.2
9. Teluk Kenidai	27.7	5.7
10. Parit Baru	24.6	5.0
11. Kemang Indah	21.5	4.4
12. Kualu Nenas	18.49	3.8
13. Sungai Pinang	25	5.1
14. Tarai Bangun	21.15	4.3
15. Palung Raya	6.3	1.3
16. Pulau Permai	3.3	0.7

Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase (%)
17. Balam Jaya	4.3	0.9
Tambang	489.91	100

Sumber : BPS, 2018

Agar lebih jelasnya, bisa dilihat pada Gambar 4.1 dibawah ini:

Gambaran persentase luas wilayah desa-desa di Kecamatan Tambang tahun 2017



Sumber : BPS, 2018

Gambar 4.1 Persentase luas wilayah desa di Kecamatan Tambang Tahun 2017

Dari tabel dan gambar diatas bisa disimpulkan bahwa desa/kelurahan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Rimbo Panjang dan wilayah yang terkecil adalah desa Tambang.

b. Jarak Lurus Antara Desa Dan Ibukota Kecamatan

Interaksi antara desa dengan kota merupakan interaksi yang disebut juga dengan interaksi wilayah. Interaksi wilayah merupakan hubungan timbal balik antara dua wilayah atau lebih. Yang saling mempengaruhi dan dapat menimbulkan gejala atau permasalahan baru baik secara langsung maupun tidak langsung.

Untuk itu pentingnya mengetahui jarak lurus antara pusat pemerintahan desa dengan ibukota kecamatan khususnya Kecamatan Tambang. Desa-desanya di Kecamatan Tambang merupakan wilayah yang sering dikaitkan dengan wilayah pedesaan sebagai penghasil pangan, contohnya beras dari lahan pertanian. Sedangkan kota/ibukota Kecamatan Tambang merupakan wilayah yang banyak dikaitkan dengan pusat industri atau jual beli. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut :

Tabel 4.6 Jarak Lurus Antara Pusat Pemerintahan Desa/Kelurahan Dengan Ibukota Kecamatan

No	Desa/Kelurahan	Jarak Lurus (km)
1	Kuapan	19
2	Aur sati	13
3	Tambang	7
4	Padang Luas	18
5	Gobah	22
6	Terantang	24
7	Rimba Panjang	10
8	Kualu	31
9	Teluk Kenidai	41
10	Parit Baru	30
11	Kemang Indah	17
12	Kualu Nenas	6

No	Desa/Kelurahan	Jarak Lurus (km)
13	Sungai Pinang	1
14	Tarai Bangun	21
15	Palung Raya	12
16	Pulau Permai	8
17	Balam Jaya	5

Sumber : BPS, 2018

Pada tabel diatas dapat diketahui lebih detail tentang jarak lurus antara pusat pemerintahan desa/kelurahan dengan ibukota Kecamatan Tambang. Terlihat bahwa jarak desa/kelurahan yang paling dekat dengan ibukota Kecamatan Tambang adalah Desa Sungai Pinang yang berjarak hanya 1 km saja. Kemudian desa/kelurahan yang terjauh dari ibukota kecamatan adalah Desa Teluk Beridai. Desa dan pusat pemerintahan (kota) memiliki interaksi yang disebut dengan Spacial Interaction atau interaksi wilayah. Ada 3 faktor yang memengaruhinya, yaitu : Adanya wilayah yang saling melengkapi, adanya kesempatan untuk saling mengintervensi dan adanya kemudahan transfer. Tetapi tidak hanya 3 faktor yang telah disebutkan tadi yang menentukan interaksi antara desa dan kota. Ada yang dinamakan dengan zona interaksi desa dan kota. Semakin dekat jarak desa tersebut ke pusat pemerintahan atau pusat kota, maka semakin kuat dan baik interaksinya. Dan hal sebaliknya juga berlaku. Interaksi desa dan kota sangatlah penting. Tanpa adanya interaksi ini maka kota atau desa tersebut tidak akan berkembang dan kehidupan akan jalan ditempat

4.2.2 Kondisi Alam

Kecamatan Tambang secara umum beriklim tropis yang dipengaruhi oleh 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau dengan suhu udara rata-rata 210C – 350 C. Temperatur minimum terjadi pada bulan november dan desember yaitu sebesar 210 C. Temperatur maksimum terjadi pada juli dengan temperatur 350C. Jumlah hari hujan setahun rata-rata 256 hari (230,17 mm/tahun). Kondisi klimatologis demikian amat cocok dalam pengembangan berbagai komoditi pertanian, peternakan, perikanan dan beberapa jenis komoditi perkebunan. Dalam lima tahun belakangan ini belum menggambarkan terjadinya kondisi ekstrim pada musim hujan dan musim kemarau.

4.2.3 Kependudukan

a. Jumlah Penduduk

Penduduk secara umum adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis suatu negara selama jangka waktu tertentu dan sudah memenuhi syarat syarat yang telah ditentukan oleh peraturan negara. Penduduk terus menerus akan terus berkembang. Pertumbuhan penduduk adalah suatu perubahan populasi yang terjadi sewaktu-waktu dan bisa dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu atau dalam sebuah populasi menggunakan satuan “per waktu unit” untuk pengukuran.

Mengetahui jumlah penduduk merupakan suatu kebutuhan pemerintahan khususnya Kecamatan Tambang. Pemerintahan Kecamatan Tambang terus memperbaharui data jumlah penduduk agar bisa dikorelasikan dengan berbagai aspek

kehidupan lainnya. Jumlah penduduk Kecamatan Tambang bisa dilihat pada Tabel 4.7 berikut ini:

Tabel 4.7 Jumlah Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Tambang Tahun 2017

No	Desa/Kelurahan	Jumlah penduduk (Jiwa)		Jumlah (Jiwa)
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Kuapan	2,466	2,422	4,888
2	Aur sati	1,526	1,398	2,924
3	Tambang	2,068	1,514	3,582
4	Padang Luas	976	978	1,954
5	Gobah	1075	1095	2,17
6	Terantang	1,231	1,193	2,424
7	Rimba Panjang	3,964	4,563	8,527
8	Kualu	8,167	7,894	16,061
9	Teluk Kenidai	859	1036	1,895
10	Parit Baru	780	768	1,548
11	Kemang Indah	1069	1013	2,082
12	Kualu Nenas	1,508	1,471	2,979
13	Sungai Pinang	1,473	1,504	2,977
14	Tarai Bangun	17,897	18,215	36,112
15	Palung Raya	872	658	1,53
16	Pulau Permai	1,361	1,311	2,672
17	Balam Jaya	648	654	1,302
	Jumlah	47,94	47,687	95,627

Sumber : BPS, 2018

Jumlah Penduduk Kecamatan Tambang pada tahun 2017 berjumlah 95,627 jiwa, yang terdiri dari 47,940 jiwa laki-laki dan 47,687 jiwa perempuan. Dengan sex ratio sebesar 101, menunjukkan tidak adanya perbedaan yang sangat besar untuk

komposisi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, karena dalam 100 orang perempuan terdapat 101 orang laki-laki. Dengan luas wilayah Kecamatan Tambang 489.91 Km² dan jumlah penduduknya 95,627 jiwa, menghasilkan kepadatan penduduk sebesar 195 yang artinya dalam setiap 1 Km² dihuni oleh sekitar 195 penduduk.

b. Jumlah Perumah Tangga

Informasi tentang jumlah rumah tangga, komposisi rumah tangga dan karakteristik demografi, sosial dan ekonomi sangat diperlukan dalam perencanaan maupun implementasi kebijakan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat, khususnya di Kecamatan Tambang, seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, pangan dan pengentasan kemiskinan.

Untuk memenuhi kebutuhan data rumah tangga BPS Kecamatan Tambang telah melakukan pendataan dan mendapatkan hasil sebagaimana yang tercantum di tabel 4.8 berikut ini:

Tabel 4.8 Rata-rata Jumlah Penduduk Perumah Tangga Menurut Desa di Kecamatan Tambang Tahun 2017

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Rumah Tangga (Jiwa)	Rata-rata
1	Kuapan	4,888	1,439	3
2	Aur sati	2,924	824	4
3	Tambang	3,582	1,1	3
4	Padang Luas	1,954	521	4
5	Gobah	2,17	527	4
6	Terantang	2,4 24	756	3
7	Rimba Panjang	8,527	2,63	3
8	Kualu	16,061	4,183	4

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Rumah Tangga (Jiwa)	Rata-rata
9	Teluk Kenidai	1,895	506	4
10	Parit Baru	1,548	394	4
11	Kemang Indah	2,082	593	4
12	Kualu Nenas	2,979	550	5
13	Sungai Pinang	2,977	676	4
14	Tarai Bangun	36,112	9,028	4
15	Palung Raya	1,53	352	4
16	Pulau Permai	2,672	689	4
17	Balam Jaya	1,302	348	4
	Jumlah	95,627	25,116	4

Sumber : BPS, 2018

Dari Tabel 4.8 bisa disimpulkan bahwa Kecamatan Tambang mempunyai 25,116 jumlah keluarga dengan rata-rata jumlah penduduk dalam rumah tangga adalah 4 orang. Jumlah tersebut hampir merata di semua desa/kelurahan. Jumlah anggota keluarga sangat menentukan jumlah kebutuhan keluarga. Semakin banyak anggota keluarga semakin banyak pula kebutuhannya. Begitupun sebaliknya. Jumlah penduduk perumahan tangga terbanyak adalah di Desa Tarai Bangun dengan jumlah rumah tangga 9,028 dari jumlah penduduk 36112 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk perumahan tangga terkecil adalah di Desa Balam Jaya dengan jumlah rumah tangga 348 dari jumlah penduduk 1,302 jiwa.

c. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah. Kepadatan penduduk juga dimaksud dengan jumlah penduduk rata-rata yang

menempati wilayah per kilometer. Kepadatan penduduk ditentukan dengan rumus berikut ini:

$$\text{Kepadatan penduduk (KP)} = \frac{\text{Jumlah penduduk di suatu wilayah}}{\text{Luas wilayah (Km}^2 \text{ atau Ha)}}$$

Informasi kepadatan penduduk tiap daerah harus diketahui untuk menganalisis dan mengetahui gejala kelebihan penduduk (overpopulation), untuk mengetahui pusat pusat aglomerasi penduduk, serta mengetahui penyebaran dan pusat-pusat kegiatan ekonomi dan budaya. Untuk itu pemerintahan Kecamatan Tambang sudah mendata dan membuat rincian kepadatan penduduk di Kecamatan Tambang untuk keperluan diatas yang telah disebutkan sebelumnya. Data kepadatan penduduk di Kecamatan Tambang dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut ini:

Tabel 4.9 Kepadatan Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Tambang Tahun 2017

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa)
1	Kuapan	4,888	85.29	57
2	Aur sati	2,924	29	101
3	Tambang	3,582	3.18	1126
4	Padang Luas	1,954	23.04	85
5	Gobah	2,17	25	87
6	Terantang	2,424	32.06	76
7	Rimba Panjang	8,527	85	100
8	Kualu	16,061	55	292
9	Teluk Kenidai	1,895	27.7	68
10	Parit Baru	1,548	24.6	63
11	Kemang Indah	2,082	21.5	97
12	Kualu Nenas	2,979	18.49	161
13	Sungai Pinang	2,977	25	119

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (KM ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa)
14	Tarai Bangun	36,112	21.15	1707
15	Palung Raya	1,53	6.3	243
16	Pulau Permai	2,672	3.3	810
17	Balam Jaya	1,302	4.3	303
	Jumlah	95,627	489.91	195

Sumber : BPS, 2018

Dapat kita simpulkan dari tabel diatas bahwa desa/kelurahan di Kecamatan Tambang yang paling tinggi kepadatan penduduknya adalah Desa Tarai Bangun dengan kepadatan penduduk 1707 jiwa per kilometer nya. Sedangkan kepadatan penduduk yang terkecil adalah di Desa Kuapan dengan kepadatan penduduk hanya 57 jiwa per kilometernya. Tingkat kepadatan penduduk di setiap desa/kelurahan di Kecamatan Tambang tidak merata karena ada lahan atau wilayah yang kurang cocok dijadikan tempat tinggal. Sementara itu desa-desa yang memiliki akses mudah ke pusat industri misalnya Desa Sungai Pinang dan Balam Jaya cenderung tidak sepi penduduk.

Kepadatan penduduk pada daerah tertentu akan memiliki efek samping terkait dengan permasalahan kependudukan, antara lain: Munculnya kawasan-kawasan kumuh atau rumah tidak layak huni, tingginya kompetisi di dunia kerja, turunnya kualitas lingkungan dan terganggunya stabilitas keamanan.

4.2.4 Pendidikan

Sarana dan prasarana sangat penting dalam dunia pendidikan karena sebagai alat penggerak suatu pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan dapat berguna untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar dan mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pendidikan yang dicapai merupakan salah satu indikator kualitas hidup manusia serta menunjukkan status sosial dan status kesejahteraan seseorang. Semakin tinggi pendidikan yang dicapai oleh seseorang maka diharapkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan dari orang yang bersangkutan

Menurut Todaro (2000) alasan pokok mengenai pengaruh dari pendidikan terhadap distribusi pendapatan adalah adanya korelasi positif antara pendidikan seseorang dengan penghasilan yang akan diperolehnya. Adalah benar bahwa seseorang yang dapat menyelesaikan pendidikan menengahnya atau perguruan tinggi jika dibandingkan dengan mereka yang hanya mampu menyelesaikan sekolah yang lebih rendah tingkatannya, penghasilan mereka akan berbeda antara 300 hingga 800 persen. Oleh karena itu, tingkat pendapatan akan tergantung pada tahun-tahun sekolah yang dapat diselesaikannya, maka hal itu mendorong pemerintahan Kecamatan Tambang untuk memberi penyuluhan kepada masyarakat pentingnya pendidikan. Tingkat pendidikan bisa membuat suatu perbedaan pendapatan yang sangat tidak adil dan menimbulkan jurang kemiskinan.

Di Kecamatan Tambang terdapat berbagai jenjang pendidikan yang dimulai dari TK, SD, SMP/MI, SMA/MA dan sebagainya. Dengan adanya sarana pendidikan seperti ini diharapkan angka buta huruf dan anak tidak sekolah bisa diminimalisir

sebaik mungkin. Tabel 4.10 berikut ini akan memuat info sarana pendidikan di kecamatan Tambang lebih detail lagi.

Tabel 4.10 Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Tambang Tahun 2017

No	Jenjang Pendidikan	Negeri	Swasta	Jumlah Sarana	Jumlah Siswa (Jiwa)	Jumlah Guru (Jiwa)
1	TK	-	48	48	1118	72
2	SD	38	2	40	10333	638
3	MI	-	6	6	379	63
4	SMP	6	3	9	2798	313
5	MTS	-	9	9	972	136
6	SMA	3	2	5	1812	163
7	SMK	1	2	3	304	45
8	MA	-	5	3	232	39
9	PONPES	-	3	3	1287	118

Sumber : BPS, 2018

Hal yang bisa kita perhatikan dari tabel diatas adalah rasio guru yang cukup kecil jika dibandingkan dengan jumlah siswa dari berbagai tingkatan pendidikan. Jika rasio guru lebih rendah maka beban kerja/tingkat kesulitan pun meningkat dan murid tidak mendapat perhatian penuh. Tetapi jika rasio guru lebih tinggi atau sama rata maka beban kerja/kesulitan pun akan menurun dan murid akan mendapat perhatian penuh.

Selain itu, sedikitnya lembaga pendidikan negeri akan memberi kesulitan lain terhadap masyarakat Kecamatan Tambang. Tingginya biaya pendidikan di lembaga pendidikan swasta menjadi pertimbangan tersendiri oleh banyaknya wali murid. Pendidikan negeri di Kecamatan Tambang sebenarnya sangat membantu masyarakat

miskin dengan adanya program wajib belajar 12 tahun yang dengan ini otomatis pendidikan di sekolah negeri sangat murah dibandingkan dengan sekolah swasta yang ada.

4.2.5 Kesehatan

a. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Demi menunjang segala aspek dalam kesehatan, maka perlu adanya pembangunan sarana dan prasarana kesehatan hal ini akan memiliki dampak positif dalam menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berpotensi. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan seperti di puskesmas, rumah sakit, posyandu dan lain sebagainya.

Berikut ini Tabel 4.11 jumlah sarana kesehatan di Kecamatan Tambang:

Tabel 4.11 Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Tambang Tahun 2017

No	Desa/Kelurahan	Rumah Sakit	Poliklinik	Puskesmas	Puskesmasling	Pustu	Posyandu	Apotik
1	Kuapan	0	0	0	0	1	2	0
2	Aur sati	0	0	0	0	1	2	0
3	Tambang	0	1	0	0	1	2	1
4	Padang Luas	0	0	0	0	1	1	0
5	Gobah	0	0	0	0	1	1	0
6	Terantang	0	0	0	0	1	2	0
7	Rimba Panjang	0	0	0	0	1	3	0
8	Kualu	0	0	0	0	1	3	1
9	Teluk Kenidai	0	0	0	0	1	1	0
10	Parit Baru	0	0	0	0	0	1	0
11	Kemang Indah	0	0	0	0	1	2	0
12	Kualu Nenas	0	1	1	0	0	2	0

No	Desa/Kelurahan	Rumah Sakit	Poliklinik	Puskesmas	Puskesling	Pustu	Posyandu	Apotik
13	Sungai Pinang	0	0	0	0	1	3	1
14	Tarai Bangun	0	0	0	0	1	3	5
15	Palung Raya	0	0	0	0	0	1	0
16	Pulau Permai	0	0	0	0	0	1	0
17	Blalam Jaya	0	0	0	0	0	1	0
	Jumlah	0	2	1	0	12	31	8

Sumber : BPS, 2018

Kesehatan merupakan aspek yang sangat penting bagi kehidupan manusia, tubuh manusia yang sehat akan mendukung kegiatan sehari-hari. Sarana dan prasarana kesehatan diperlukan untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat. Masyarakat juga bisa mengandalkan poliklinik untuk pengobatan lainnya.

Sarana yang ada di Kecamatan Tambang hanya terdapat satu puskesmas. Adanya 12 puskesmas sudah agak membantu memenuhi permintaan pelayanan kesehatan. Posyandu juga sudah tersedia di setiap desa kelurahan di Kecamatan Tambang untuk memantau dan mengawasi kesehatan anak-anak.

b. Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam rangka terselenggaranya pelayanan kesehatan masyarakat. Pemerintah terus mengupayakan pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan guna memenuhi harapan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu. Berikut ini adalah Tabel 4.12 jumlah tenaga kesehatan di Kecamatan Tambang :

Tabel 4.12 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kecamatan Tambang Tahun 2017

No	Desa/Kelurahan	Spesialis	Umum	Gigi	Apoteker	Bidan	Dukun Bayi
1	Kuapan	0	0	0	0	1	2
2	Aur sati	0	0	0	0	1	3
3	Tambang	0	1	0	0	1	0
4	Padang Luas	0	0	0	0	1	3
5	Gobah	0	0	0	0	1	2
6	Terantang	0	0	0	0	1	3
7	Rimba Panjang	0	0	0	0	1	1
8	Kualu	0	0	0	0	1	1
9	Teluk Kenidai	0	0	0	0	1	2
10	Parit Baru	0	0	0	0	1	3
11	Kemang Indah	0	0	0	0	1	3
12	Kualu Nenas	0	0	0	0	1	2
13	Sungai Pinang	0	2	1	0	1	2
14	Tarai Bangun	0	0	0	0	1	1
15	Palung Raya	0	0	0	0	1	1
16	Pulau Permai	0	0	0	0	1	1
17	Balam Jaya	0	0	0	0	1	1
	Jumlah	0	3	1	0	21	31

Sumber : BPS, 2018

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa Kecamatan Tambang kekurangan tenaga kesehatan terutama untuk tenaga dokter. Di sebagian besar desa-desa di Kecamatan Tambang tidak memiliki dokter umum dan spesialis sama sekali. Masyarakat di Kecamatan Tambang hanya mengandalkan bidan desa dan dukun kampung/dukun bayi untuk berobat. Tentu dengan kondisi seperti ini proses pengobatan tidak akan bisa maksimal karena kadang alat-alat kesehatan dan obat-obatan pun terbatas.

4.2.6 Ekonomi

a. Pertanian

Pertanian adalah kegiatan ekonomi utama masyarakat Kecamatan Tambang, sebab lebih dari 80% masyarakat bekerja pada sektor pertanian, terutama pertanian perkebunan kelapa sawit dan karet, tanaman pangan, hortikultura, palawija dan lainnya.

Tanaman pangan nenas menjadi salah satu ikon pertanian bagi Kecamatan Tambang, dimana mayoritas keluarga pertanian di dua desa yakni Desa Rimbo Panjang dan Desa Kualu Nenas mengandalkan perekonomian mereka dari komoditas tersebut. Bahkan keberadaan nenas sudah sampai ke provinsi tetangga salah satunya Sumatera Barat. Selain itu, keberadaan “Durian Danau Kampar” juga mempunyai potensi ekonomis selama bertahun-tahun. Penangkaran bibit tanaman hortikultura juga menjadi primadona bagi sebagian besar masyarakat desa yang berada di Jl. Raya Pekanbaru-Bangkinang, khususnya di Desa Balam Jaya, Desa Tambang, Desa Sungai Pinang serta Desa Rimbo Panjang. Berikut Tabel 4.13 mengenai luas panen sayuran yang ada di Kecamatan Tambang :

Tabel 4.13 Luas Panen Sayur-sayuran Menurut Komoditas di Kecamatan Tambang Tahun 2013-2016 (Ha)

No	Komoditas	2013	2014	2015	2016
1	Kacang Panjang	15	23	6	28
2	Cabai	14	19	8	16
3	Terong	14	10	5	16
4	Kelimun	13	12	5	16
5	Kangkung	12	12	10	32
6	Bayam	12	12	9	68

Sumber : BPS, 2017

b. Pertenakan

Subsektor Peternakan juga menjadi salah satu kebanggaan Kecamatan Tambang, di mana keberadaan “Sapi Perah” yang berlokasi di Desa Kuapan yang dikelola oleh UPT-BPP menjadi ikon Kampar, yang dikemudian hari tujuan utamanya adalah untuk dikembangkan kemasyarakat luas. Saat ini terdapat 74 ekor sapi perah yang sudah memproduksi susu murni sebanyak ± 143 liter per hari dan langsung diproses secara mandiri oleh tenaga ahli UPT- BPP, dimana hasil dari susu murni tersebut langsung di kemas dalam bentuk gelas.

Melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar hasil dari susu murni tersebut dijadikan sebagai salah satu program suplemen tambahan bagi para siswa-siswi di Kabupaten Kampar yang di distribusikan langsung oleh UPT-BPP ke 3 kecamatan penerima setiap harinya.

c. Industri dan Perdagangan

Keberadaan sektor industri juga menjadi sorotan tersendiri. Saat ini terdapat 2 unit industri besar, 3 unit industri sedang dan 20 industri kecil/kerajinan, yang bergerak dibidang pengolahan hasil tanaman, pembuatan tiang beton, perabotan, dan lan-lain. Usaha kecil dan mikro ini diharapkan akan lebih meningkat dan berkembang untuk tahun yang akan datang. Untuk lebih jelas dapat di lihat pada Tabel 4.14 berikut :

Tabel 4.14 Jumlah Usaha Industri yang Terdaftar Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Tambang Tahun 2016

No	Desa	Industri Besar (unit)	Industri Sedang (unit)	Kecil (unit)	Mikro (unit)
1	Kuapan	0	0	1	0
2	Aur Sati	0	0	12	0
3	Tambang	0	1	0	2
4	Padang Luas	0	0	0	0
5	Gobah	0	0	0	0
6	Terantang	0	0	0	0
7	Rimba Panjang	1	1	1	4
8	Kualu	0	0	0	1
9	Teluk Kenidai	0	0	0	0
10	Parit Baru	0	0	0	0
11	Kemang Indah	0	0	0	0
12	Kualu Nenas	0	0	0	17
13	Sungai Pinang	1	1	7	3
14	Tarai Bangun	0	0	9	34
15	Palung Raya	0	0	0	21
16	Pulau Permai	0	0	0	0
17	Balam Jaya	0	0	0	0
	Jumlah	2	3	20	82

Sumber : BPS, 2017

Sarana perekonomian di Kecamatan Tambang terdiri dari 4 swalayan, supermarket, minimarket. 1,319 toko dan warung kelontong beberapa jumlah sarana ekonomi dan UMKM yang ada diharapkan dapat menggairahkan serta meningkatkan perekonomian masyarakat desa setempat serta sebagai pusat interaksi sosial masyarakat pedesaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.15 berikut :

Tabel 4.15 Jumlah Usaha Perdagangan yang Terdaftar Menurut Desa di Kecamatan Tambang Tahun 2016

No	Desa	Swayalan, minimarket, supermarket	Toko, warung kelontong	Pasar permanen dan semi permanen	Pasar Tanpa Bangunan Permanen
1	Kuapan	0	5	0	1
2	Aur Sati	0	10	0	0
3	Tambang	0	25	1	0
4	Padang Luas	0	1	0	0
5	Gobah	0	0	0	1
6	Terantang	0	11	1	0
7	Rimba Panjang	1	276	0	2
8	Kualu	0	83	1	1
9	Teluk Kenidai	0	0	0	0
10	Parit Baru	0	0	1	0
11	Kemang Indah	0	0	1	1
12	Kualu Nenas	0	18	1	0
13	Sungai Pinang	0	21	0	1
14	Tarai Bangun	3	865	2	5
15	Palung Raya	0	3	0	0
16	Pulau Permai	0	0	0	0
17	Balam Jaya	0	1	0	0
	Jumlah	4	1 319	8	12

Sumber : BPS, 2017

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Karakteristik Kemiskinan di Kecamatan Tambang

Pada pembahasan ini membahas mengenai kondisi karakteristik kemiskinan di Kecamatan Tambang dilihat dari segi kesehatan, pendidikan dan standar hidup, maka dapat diketahui bagaimana kondisi karakteristik kemiskinan di Kecamatan Tambang.

5.1.1 Kesehatan

Kesehatan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dijaga mulai dari yang tua, dewasa hingga anak-anak, dengan menjaga kesehatan tentu sangat berdampak terhadap peningkatan kualitas hidup. Dengan menjaga kesehatan kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas, seperti bekerja, bersekolah maupun beribadah. Kesehatan merupakan suatu hal yang menjadi perhatian kita bersama, baik dari individu masing-masing hingga pemerintah juga harus memperhatikan kualitas kesehatan masyarakatnya, banyak masyarakat yang kurang peduli dalam menjaga kesehatan, baik dari pola hidup yang kurang sehat dan mengkonsumsi makanan sembarangan. Dalam hal ini kesehatan merupakan salah satu indikator menentukan karakteristik kemiskinan di suatu daerah yang dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas). Ada tiga penilaian kesehatan yaitu: penolong persalinan, vaksinasi dan jaminan kesehatan. Maka dengan tiga penilaian tersebut dapat diketahui berapa jumlah masyarakat di Kecamatan Tambang

yang menggunakan penolong persalinan, jumlah masyarakat yang melakukan vaksinasi dan jaminan kesehatan apa yang digunakan masyarakat di Kecamatan Tambang.

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah menyediakan sarana hingga prasarana kesehatan. Namun masih banyak masyarakat yang tidak peduli dengan adanya fasilitas-fasilitas tersebut, hal ini didasari oleh faktor utama tidak adanya kemampuan dari segi ekonomi masyarakat untuk menggunakan fasilitas yang sudah disediakan, karena memang dibutuhkan biaya khusus untuk menggunakan fasilitas tersebut.

5.1.1.1 Penolong Persalinan di Kecamatan Tambang

Dalam indikator kesehatan terdapat penolong persalinan sebagai salah satu alat ukurnya, dengan mengetahui persentase ibu hamil yang di tolong persalinannya di Kecamatan Tambang maka dapat digambarkan bagaimana kondisi karakteristik kemiskinan di Kecamatan Tambang, karena ada faktor dari kendala biaya yang menyebabkan masyarakat tidak menggunakan penolong persalinan.

Jumlah persentase persalinan yang ditolong untuk Kecamatan Tambang sebesar 94,4%. Persentase yang tinggi karena memang pelayanan penolong persalinan untuk Kecamatan Tambang sudah cukup baik pelaksanaannya. Namun masih ada 5,6% yang tidak menggunakan penolong persalinan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut :

Tabel 5.1 Penolong Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Tahun 2017

Kecamatan	Puskesmas	Jumlah	K1		K4	
			Jumlah	%	Jumlah	%
Tambang	Tambang	1.867	1.847	98,9	1.868	100,1

Kecamatan	Puskesmas	Jumlah	Persalinan ditolong Nakes		Mendapat Yankes Nifas		Ibu Nifas mendapat Vit A	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tambang	Tambang	1.783	1.684	94,4	1.679	94,2	1.685	94,5

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Kampar 2017

Pada Tabel 5.1 dapat diuraikan bahwa indikator penolong persalinan di Kecamatan Tambang sudah sangat memenuhi kriteria hal ini didasari oleh kepedulian masyarakat terhadap kesehatan, namun hal ini harus di dukung oleh kebijakan-kebijakan yang dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas kesehatan.

5.1.1.2 Vaksinasi di Kecamatan Tambang

Vaksinasi disebut juga imunisasi adalah pemberian vaksin ke dalam tubuh seseorang untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit tersebut. Kata vaksinasi berasal dari bahasa Latin *vacca* yang berarti sapi, diistilahkan demikian karena vaksin pertama berasal dari virus yang menginfeksi sapi (cacar sapi).

Dalam indikator kesehatan terdapat vaksinasi sebagai salah satu alat ukurnya, dengan mengetahui persentase bayi yang melakukan vaksinasi di Kecamatan Tambang maka dapat digambarkan bagaimana kondisi karakteristik kemiskinan di Kecamatan Tambang, karena ada faktor dari kendala biaya yang menyebabkan masyarakat tidak menggunakan vaksinasi. Jumlah partisipasi masyarakat kota sangat

jauh berbeda terhadap masyarakat desa tentang kepedulian pentingnya vaksinasi tersebut. Pengetahuan, sikap tidak peduli hingga kendala ekonomi menyebabkan masyarakat tidak peduli terhadap pentingnya vaksinasi. Untuk Kecamatan Tambang jumlah bayi yang mendapat program imunisasi di atas angka 90%. Jumlah yang tinggi melihat partisipasi masyarakat terhadap pentingnya vaksinasi, namun masih ada beberapa persen masyarakat yang tidak peduli terhadap pentingnya vaksinasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.2 berikut :

Tabel 5.2 Cakupan Vaksinasi Kecamatan Tambang Tahun 2017

Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Bayi			Dpt-Hb3/Dpt-Hb-Hib3					
		<i>(Survivinginfant)</i>			L		P		L +P	
		L	P	L+P	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
Tambang	Tambang	870	828	1.698	838	96	781	94	1.619	95

KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH BAYI			POLIO4a					
		<i>(SURVIVINGINFANT)</i>			L		P		L +P	
		L	P	L+P	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
Tambang	Tambang	870	828							

KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH BAYI			CAMPAK					
		<i>(SURVIVINGINFANT)</i>			L		P		L +P	
		L	P	L+P	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
Tambang	Tambang	870	828							

KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH BAYI			IMUNISASIDASAR LENGKAP					
		<i>(SURVIVINGINFANT)</i>			L		P		L +P	
		L	P	L+P	JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
Tambang	Tambang	870	828							

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Kampar 2017

Untuk Kecamatan Tambang tingkat kepedulian masyarakat terhadap vaksinasi sudah sangat baik dimana 90% sudah menjalankannya. Tentu masyarakat harus selalu menjaga kepedulian terhadap vaksinasi agar kedepannya tidak mengalami penurunan. Maka pemerintah setempat juga harus selalu mengawasi dan memberi penyuluhan terhadap pentingnya melaksanakan program vaksinasi.

5.1.1.3 Jaminan Kesehatan di Kecamatan Tambang

Kesehatan memang hak siapapun yang menjadi masyarakat Indonesia. Hal ini sendiri sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan di Indonesia. Maka dari itu, pemerintah sebagai wakil dan pelaksana kebijakan negara haruslah mampu mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Karena dengan badan yang sehat masyarakat bisa lebih produktif untuk bekerja dan mendukung negara mewujudkan cita-citanya.

Berdasarkan basis data terpadu kmpar tahun 2018, masyarakat berpenghasilan rendah penerima program bantuan di Kecamatan Tambang sebanyak 21.637 jiwa. Beberapa program bantuan salah satunya adalah Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang digratiskan oleh pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan adanya jaminan kesehatan untuk masyarakat di Kecamatan Tambang terutama masyarakat miskin sudah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Maka dari itu diharapkan kedepannya program yang sudah berjalan senantiasa mampu memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat miskin.

5.1.2 Pendidikan

Dewasa ini, penting bagi setiap masyarakat beserta pemerintah untuk saling bekerjasama memfokuskan perhatian mereka dalam memberantas kemiskinan yang terjadi baik pada masyarakat pedesaan maupun perkotaan, diantaranya adalah kurangnya peran serta pemerintah secara nyata dalam mengurus kepentingan dan kebutuhan masyarakat terutama akses akan sumber daya terlebih pendidikan, sehingga berdampak pada pertumbuhan dan kemajuan wilayah yang menjadi relatif lambat. Sebagian masyarakat mereka berpandangan sempit bahwa pendidikan bukanlah segalanya. Hal ini, menyebabkan mereka mengalami krisis motivasi dan keinginan akan kebutuhan pendidikan yang berujung pada rendahnya kualitas dan kuantitas pendidikan di tingkat masyarakat.

Maka dari itu, diperlukan pula usaha dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dalam menyiapkan generasi yang berkualitas untuk kepentingan masa depan yang terkait dengan eksistensi serta keberlangsungan hidup dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan kehidupan yang berkelanjutan baik bagi masyarakat di pedesaan pada khususnya maupun bangsa pada umumnya, hingga menjadikan pendidikan sebagai kebutuhan pokok dalam kehidupan mereka dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi.

Dalam usaha memberantas kemiskinan yang terjadi selama ini menimbulkan suatu cambukan dasyat bagi seluruh masyarakat dan pemerintahan untuk melakukan berbagai upaya-upaya dalam rangka memberantas kemiskinan dan meningkatkan kesadaran mereka akan kebutuhan pendidikan. Pemerintah pun tampaknya sudah mulai sadar bahwa salah satu yang menjadi kendalanya adalah kesenjangan dan

ketidakadilan. Sehingga upaya-upaya penanggulangan dalam mengentaskan kemiskinan pada masyarakat dapat diselesaikan melalui upaya pendidikan dan pelatihan, yaitu dengan mendidik dan memberdayakan masyarakat baik miskin maupun tidak miskin.

Peranan bidang pendidikan merupakan salah satu upaya pembangunan dalam memberantas kebodohan dan diharapkan mampu memberantas kemiskinan yang terjadi serta dapat meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakatnya, terlebih masyarakat di pedesaan yang tingkat kesejahteraan hidupnya cukup rendah dibandingkan masyarakat disekitar perkotaan yang mudah dan serba cepat dalam mengakses sumber daya yang tersedia. Dalam pencapaiannya, upaya lain yang dilakukan untuk mendukung tercapainya pemberantasan kemiskinan melalui partisipasi masyarakat untuk bergotong royong dan saling membantu dalam melakukan pemberdayaan secara terpadu, berkelanjutan dengan sasarannya yang jelas.

5.1.2.1 Partisipasi Sekolah di Kecamatan Tambang

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut

partisipasi sekolah.

Angka partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka partisipasi sekolah merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi angka partisipasi sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya angka partisipasi sekolah tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.3 Jumlah Sekolah Dasar Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Tambang Tahun 2016

No	Desa	Jumlah Sekolah Dasar (unit)		
		Negeri	Swasta	Jumlah
1	Kuapan	2	0	2
2	Aur sati	1	0	1
3	Tambang	1	0	1
4	Padang Luas	2	0	2
5	Gobah	1	0	1
6	Terantang	2	0	2
7	Rimba Panjang	3	0	3
8	Kualu	4	0	4
9	Teluk Kenidai	2	0	2
10	Parit Baru	2	0	2
11	Kemang Indah	1	0	1
12	Kualu Nenas	2	0	2
13	Sungai Pinang	3	0	3
14	Tarai Bangun	5	0	5
15	Palung Raya	1	0	1
16	Pulau Permai	1	0	1

No	Desa	Jumlah Sekolah Dasar (unit)		
		Negeri	Swasta	Jumlah
17	Balam Jaya	3	0	3
	Jumlah	42	0	42

BPS :BPS, 2017

Dapat dilihat pada Tabel 5.3 bahwa jumlah sarana sekolah dasar di Kecamatan Tambang sebanyak 42 sekolah. Untuk sekolah dasar negeri berjumlah 42 sekolah, sedangkan untuk sekolah dasar swasta berjumlah 0. Masing-masing desa di Kecamatan Tambang memiliki sarana sekolah dasar minimal 1 sekolah. Desa Tarai Bangun merupakan desa dengan jumlah sarana sekolah dasar terbanyak yaitu berjumlah 5 sekolah, disusul oleh Desa Kualu berjumlah 4 sekolah. Selebihnya ada yang 3 sekolah, 2 sekolah maupun 1 sekolah.

Tabel 5.4 Jumlah Murid Sekolah Dasar Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Tambang Tahun 2016

No	Desa	Jumlah Murid (Jiwa)		
		Negeri	Swasta	Jumlah
1	Kuapan	412	0	412
2	Aur sati	146	0	146
3	Tambang	1.036	0	1.036
4	Padang Luas	302	0	302
5	Gobah	194	0	194
6	Terantang	298	0	298
7	Rimba Panjang	528	0	528
8	Kualu	783	0	783
9	Teluk Kenidai	210	0	210
10	Parit Baru	163	0	163
11	Kemang Indah	278	0	278
12	Kualu Nenas	389	0	389
13	Sungai Pinang	157	0	157
14	Tarai Bangun	2.165	0	2.165

No	Desa	Jumlah Murid (Jiwa)		
		Negeri	Swasta	Jumlah
15	Palung Raya	122	0	122
16	Pulau Permai	98	0	98
17	Balam Jaya	252	0	252
	Jumlah	7.533	0	7.533

BPS : BPS, 2017

Dapat dilihat pada Tabel 5.4 bahwa jumlah murid sekolah dasar di Kecamatan Tambang berjumlah 7.533 siswa. Untuk sekolah dasar negeri berjumlah 7.533 siswa. Sedangkan untuk sekolah dasar swasta tidak ada. Masing masing siswa sekolah dasar di Kecamatan Tambang tersebar secara menyeluruh dikarenakan setiap desa di Kecamatan Tambang memiliki minimal 1 sekolah dasar. Jumlah siswa terbanyak ada di Desa Tarai Bangun berjumlah 2.165 siswa, dan untuk siswa paling sedikit ada di Desa Pulau Permai berjumlah 98 siswa.

Tabel 5.5 Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Tambang Tahun 2016

No	Desa	Jumlah SLTP (unit)		
		Negeri	Swasta	Jumlah
1	Kuapan	1	0	1
2	Aur sati	0	0	0
3	Tambang	0	0	0
4	Padang Luas	1	0	1
5	Gobah	0	0	0
6	Terantang	0	0	0
7	Rimba Panjang	1	0	1
8	Kualu	1	0	1
9	Teluk Kenidai	1	0	1
10	Parit Baru	0	0	0
11	Kemang Indah	0	0	0
12	Kualu Nenas	0	0	0

No	Desa	Jumlah SLTP (unit)		
		Negeri	Swasta	Jumlah
13	Sungai Pinang	0	0	0
14	Tarai Bangun	2	0	2
15	Palung Raya	0	0	0
16	Pulau Permai	0	0	0
17	Balam Jaya	1	0	1
	Jumlah	9	0	9

BPS :BPS, 2017

Dapat dilihat pada Tabel 5.5 bahwa jumlah sarana SLTP di Kecamatan Tambang sebanyak 9 sekolah. Untuk SLTP negeri berjumlah 9 sekolah, sedangkan untuk SLTP swasta berjumlah 0. Masing-masing desa di Kecamatan Tambang tidak memiliki sarana SLTP. Desa Tarai Bangun merupakan desa dengan jumlah SLTP terbanyak yaitu berjumlah 2 sekolah, sedangkan Desa Kuapan, Desa Padang Luas, Desa Rimba Panjang, Desa Kuala, Desa Teluk Kenidai dan Desa Balam Jaya memiliki 1 SLTP saja. Dikarenakan untuk sekolah lanjutan tingkat pertama sudah banyak masyarakat yang memilih untuk bersekolah diluar kecamatan. Berikut Tabel 5.6 mengenai jumlah murid SLTP di Kecamatan Tambang:

Tabel 5.6 Jumlah Murid Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Tambang Tahun 2016

No	Desa	Jumlah Murid (Jiwa)		
		Negeri	Swasta	Jumlah
1	Kuapan	117	0	117
2	Aur sati	0	0	0
3	Tambang	63	0	63
4	Padang Luas	112	0	112
5	Gobah	0	0	0
6	Terantang	0	0	0

No	Desa	Jumlah Murid (Jiwa)		
		Negeri	Swasta	Jumlah
7	Rimba Panjang	312	0	312
8	Kualu	287	0	287
9	Teluk Kenidai	52	0	52
10	Parit Baru	0	0	0
11	Kemang Indah	0	0	0
12	Kualu Nenas	0	0	0
13	Sungai Pinang	234	0	234
14	Tarai Bangun	634	0	634
15	Palung Raya	0	0	0
16	Pulau Permai	0	0	0
17	Balam Jaya	371	0	371
	Jumlah	2182	0	2182

BPS :BPS, 2017

Dapat dilihat pada Tabel 5.6 bahwa jumlah murid SLTP di Kecamatan Tambang berjumlah 2.182 siswa. Untuk SLTP negeri berjumlah 2.182 siswa. Sedangkan untuk SLTP swasta tidak ada. Untuk jumlah siswa terbanyak berada di Desa Tarai Bangun berjumlah 634 siswa, hal ini dikarenakan terdapat 2 SLTP di desa tersebut. Sedangkan jumlah siswa paling sedikit berada pada Desa Teluk Kenidai berjumlah 52 siswa.

Untuk jumlah sarana SLTA di Kecamatan Tambang dapat dilihat pada Tabel 5.7 berikut :

Tabel 5.7 Jumlah SLTA/Sederajat Desa/Kelurahan di Kecamatan Tambang Tahun 2016

No	Desa	Jumlah SMU (unit)		
		Negeri	Swasta	Jumlah
1	Kuapan	0	0	0
2	Aur sati	0	0	0
3	Tambang	0	0	0
4	Padang Luas	0	0	0
5	Gobah	0	0	0
6	Terantang	0	0	0
7	Rimba Panjang	0	0	0
8	Kualu	1	0	1
9	Teluk Kenidai	0	0	0
10	Parit Baru	0	0	0
11	Kemang Indah	0	0	0
12	Kualu Nenas	1	1	2
13	Sungai Pinang	0	0	0
14	Tarai Bangun	0	0	0
15	Palung Raya	0	0	0
16	Pulau Permai	0	0	0
17	Balam Jaya	0	0	0
	Jumlah	2	1	3

BPS :BPS, 2017

Dapat dilihat pada Tabel 5.7 untuk jumlah sarana SLTA di Kecamatan Tambang hanya berjumlah 3 sekolah. Untuk SLTA negeri berjumlah 2 sekolah, dan untuk SLTA swasta berjumlah 1 sekolah. Masing-masing sekolah berada pada Desa Kualu dan Desa Kualu Nenas. Untuk SLTA di kecamatan Tambang memang berjumlah cukup sedikit hal ini dipengaruhi oleh banyaknya masyarakat yang memilih anaknya untuk bersekolah ke sekolah yang berada di pusat Kabupaten ataupun memilih bersekolah ke Ibukota Provinsi. Berikut Tabel 5.8 mengenai jumlah siswa SLTA di Kecamatan Tambang :

Tabel 5.8 Jumlah Murid SLTA/Sederajat Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Tambang Tahun 2016

No	Desa	Jumlah Murid (Jiwa)		
		Negeri	Swasta	Jumlah
1	Kuapan	0	0	0
2	Aur sati	0	0	0
3	Tambang	0	0	0
4	Padang Luas	0	0	0
5	Gobah	0	0	0
6	Terantang	0	0	0
7	Rimba Panjang	0	0	0
8	Kualu	482	0	482
9	Teluk Kenidai	0	0	0
10	Parit Baru	0	0	0
11	Kemang Indah	0	0	0
12	Kualu Nenas	540	207	747
13	Sungai Pinang	0	0	0
14	Tarai Bangun	0	0	0
15	Palung Raya	0	0	0
16	Pulau Permai	0	0	0
17	Balam Jaya	0	0	0
	Jumlah	1.022	207	1.229

BPS :BPS, 2017

Dapat dilihat pada Tabel 5.8 bahwa jumlah murid SLTA di Kecamatan Tambang berjumlah 1.229 siswa. Untuk SLTA negeri berjumlah 1.022 siswa sedangkan untuk SLTA swasta berjumlah 207 siswa. Desa Kualu Nenas yang memiliki 2 unit SLTA memiliki jumlah siswa sebanyak 747 siswa. Dan untuk Desa Kualu yang hanya memiliki 1 unit SLTA hanya memiliki murid sebanyak 482 siswa.

Untuk mengetahui Angka Partisipasi Kasar (APK) (%). Dapat menggunakan perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah (0-18 tahun) yang dinyatakan dalam persentase. Untuk jumlah siswa di Kecamatan Tambang berjumlah 12.062 siswa dengan jumlah penduduk usia sekolah berjumlah 23.089 orang. Dapat dihitung dengan :

Rumus :

$$APK = \frac{\text{Jumlah siswa}}{\text{Penduduk usia sekolah}} \times 100$$

$$APK = \frac{12.062}{23.089} \times 100$$

$$APK = 52,24 \%$$

Kriteria :

Semakin tinggi APK semakin banyak penduduk yang bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikan tertentu.

Dapat disimpulkan bahwa Angka Partisipasi Kasar di Kecamatan Tambang terbilang cukup tinggi dengan persentase 52,24 %. Maka dengan itu masyarakat dan pemerintah di Kecamatan Tambang seharusnya berupaya meningkatkan minat bersekolah agar angka partisipasi sekolah di Kecamatan Tambang semakin meningkat.

5.1.3 Standar Hidup

Untuk menilai karakteristik kemiskinan di Kecamatan Tambang terdapat indikator yang dikelurakan oleh Bappenas salah satunya standar hidup yang terdiri dari kondisi sanitasi, air minum, jaringan listrik, dan kondisi rumah yang terdapat di Kecamatan Tambang. Semakin baik kondisi sanitasi, air minum, jaringan listrik, dan kondisi rumah di Kecamatan Tambang akan berpengaruh terhadap standar hidup. Dengan kondisi yang baik akan mencerminkan baiknya kualitas standar hidup pada kecamatan tersebut dan sebaliknya. Kondisi sanitasi, air minum, jaringan listrik, dan kondisi rumah akan sebanding lurus dengan ekonomi masyarakat di Kecamatan Tambang. Semakin banyak masyarakat miskin maka akan semakin buruk kondisi tersebut, dan semakin sedikit masyarakat miskin maka kondisi tersebut cukup terjaga. Dengan kondisi tersebut dapat dilihat bagaimana karakteristik kemiskinan di Kecamatan Tambang.

5.1.3.1 Analisis Sanitasi Di Kecamatan Tambang

Air limbah domestik terdiri dari 2 jenis, yaitu *grey water* (air bekas mandi dan cuci) serta *black water* (tinja). Pengelolaan air limbah domestik di Kecamatan Tambang terdapat 2 sistem, yaitu sistem individu dan sistem komunal. Sistem individu adalah sistem pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat di rumah masing-masing, baik menggunakan septik tank maupun cubluk. Sedangkan sistem komunal adalah sistem pengelolaan air limbah yang dikelola secara kelompok (KSM), baik berupa sistem perpipaan maupun MCK komunal.

Secara umum kondisi pengelolaan Air limbah domestik di Kecamatan Tambang masih belum memadai. Sistem pengelolaan air limbah domestik belum berjalan efektif sebagaimana diharapkan dan itupun hanya diprakarsai oleh pemerintah, belum dilakukan oleh dunia usaha ataupun masyarakat. Kecamatan Tambang pada saat ini pengelolaan *black water* (air limbah yang berasal dari jamban atau WC) masih sebatas pengumpulan dan penampungan, sedangkan unit pengolahan pengangkutan dan pengolahan akhir lumpur tinja atau Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) masih belum ada. Sementara itu Sistem pengolahan air limbah domestik masih dikelola secara *on-site system (setempat)*. Sistem pengolahan air limbah secara *onsite sistem* pun masih belum memadai. Faktor utama adalah masih rendahnya kepedulian masyarakat dalam pengelolaan air limbah. Sistem pengolahan air limbah domestik yang terdiri atas black water yang berasal dari tinja, urine, air pembersih dan air penggelontor. Masyarakat umumnya menggunakan jamban leher angsa dengan kontruksi penampungan dan pengumpulan berupa tangki septik, pipa sewer dan cubluk. Pada umumnya sistem pembuangan limbah non tinja ini dialirkan melalui lubang resapan yang disalurkan melalui saluran terbuka yang dialirkan ke sistem drainase atau ke sungai. Berikut Tabel 5.9 mengenai cakupan layanan limbah domestik di wilayah perkotaan di Kecamatan Tambang dan Tabel 5.10 mengenai cakupan layanan limbah domestik di wilayah pedesaan di Kecamatan Tambang :

Tabel 5.9 Cakupan Layanan Air Limbah Domestik di Wilayah Perkotaan Kecamatan Tambang

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk Perkotaan	Tanpa Akses		Akses Layak					
			BABS (KK)	Cubluk/ Tangki Septik Individual Tidak Layak (KK)	SPALD Setempat		SPALD TERPUSAT			
					Skala Individual	Skala Komunal	IPALD Permukiman		IPALD Perkotaan	IPALD Kawasan tertentu
				Berbasis Masyarakat	Berbasis Institusi					
1	Kecamatan Tambang	5626	388	3120	1,232	886	0	0	0	0

Sumber : Instrumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kab.Kampar 2017

Tabel 5.10 Cakupan Layanan Air Limbah Domestik di Wilayah Perdesaan Kecamatan Tambang

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk Perdesaan	Tanpa Akses		Akses Layak					
			BABS (KK)	Cubluk/ Tangki Septik Individual Tidak Layak (KK)	SPALD Setempat		SPALD TERPUSAT			
					Skala Individual	Skala Komunal	IPALD Permukiman		IPALD Perkotaan	IPALD Kawasan tertentu
				Berbasis Masyarakat	Berbasis Institusi					
1	Kecamatan Tambang	14205	1284	7677	2,863	2403	0	0	0	0

Sumber : Instrumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kab.Kampar 2017

MCK Komunal terbangun dari pembangunan MCK Program SANIMAS pada tahun 2013 sampai dengan 2015 belum pernah dibangun untuk Kecamatan Tambang hanya beberapa Kecamatan di Kabupaten Kampar yang mendapat pembangunan MCK Komunal seperti Kecamatan Bangkinang Kota, Kecamatan Kuok, Kecamatan Kampar, Kecamatan Kampa, dan Kecamatan Siak Hulu.

Peran serta masyarakat di Kecamatan Tambang dalam penanganan limbah cair masih terbatas pada kesadaran untuk hidup sehat dengan membangun jamban dan tangki septik sendiri tanpa bantuan pemerintah. Namun tingkat kesadaran masyarakat untuk menggunakan jamban rumah tangga maupun jamban umum masih rendah yang ditunjukkan dengan masih adanya sebagian masyarakat yang membuang limbah cair langsung dari toilet ke sungai maupun BABs. Beberapa sarana dan prasarana yang telah dibangun oleh pemerintah telah dimanfaatkan dan dioperasikan oleh masyarakat namun belum optimal dimanfaatkan dan dioperasikan oleh masyarakat namun belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat masih rendah.

Masih rendahnya peran masyarakat dalam penanganan dan pengolahan air limbah ditunjukkan dari masih banyaknya warga yang melakukan BABs, persebaran Kepemilikan jamban dan sarana sanitasi lainnya masih terbatas serta banyak di jumpai fasilitas umum yang sudah terbangun namun belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya jadi terkesan kurang terawat. Pemerintah telah melakukan kegiatan untuk mendorong Peran serta masyarakat dalam penanganan pembangunan instalasi pengolahan limbah cair rumah tangga melalui program/proyek layanan yang

berbasis masyarakat seperti Program Sanitasi Lokal Berbasis Masyarakat (STBM), Sanimas Berbasis Masyarakat (SANIMAS).

5.1.3.2 Analisis Air Minum di Kecamatan Tambang

Pelayanan air minum melalui perpipaan baru dilayani oleh PDAM Tirta Kampar dengan wilayah pelayanan saat ini mencakup Kota Bangkinang dan unit yaitu Air Tiris, Tambang, Teratak Buluh, Kuok dan Desa Padang Mutung. Saat ini pelayanan air minum di Kabupaten Kampar yang dilayani oleh PDAM Tirta Kampar yaitu wilayah Kota Bangkinang (pusat), Unit Air Tiris, Unit Tambang, Unit Teratak Buluh, Unit Kuok dan Unit Desa Padang Mutung. Kapasitas sistem terpasang saat ini yaitu total 75 L/D dengan sistem pengolahan lengkap (IPA lengkap) dan mata air dengan jumlah total SR yaitu 3739 SR.

Penduduk di Kecamatan Tambang mendapatkan air bersih yang salah satunya digunakan untuk sumber air minum secara individual yaitu dengan memanfaatkan sumber - sumber air yang ada di sekitarnya yaitu berupa, air tanah dangkal (sumur bor), air permukaan (sungai) dan air tadah hujan, air permukaan dan sumur dangkal dimana kualitasnya tidak layak sebagai sumber air baku untuk air minum, rata-rata di setiap Desa air sumur dangkal/sumur gali dan sumur air tanah dalam merupakan sumber air baku utama untuk penyediaan air minumnya disamping sebagai alternative masyarakat memanfaatkan pelayanan air bersih komersil swasta dengan membeli air kemasan isi ulang. Sedangkan SPAM Eksisting Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) untuk Kecamatan Tambang dapat dilihat pada Tabel 5.11 berikut :

Tabel 5.11 SPAM Eksisting Bukan Jaringan Perpipaan (BJP)

No	Lokasi Kecamatan	Desa/Kelurahan	Modul		Jumlah KK Terlayani	Tingkat	Tingkat
			Sumber air	Jumlah		Pelayanan Thd Kecamatan	Pelayanan Thd Kabupaten
				Unit	KK	%	%
1	Tambang	Padang Luas	Sumur Dalam/Bor	4	200	1.71	0.13
		Terantang	Sumur Dalam/Bor	4	200	1.71	0.13
		Parit Baru	Sumur Dalam/Bor	6	300	2.56	0.19
		Teluk Kenidai	Sumur Dalam/Bor	6	300	2.56	0.19
		Kemang Indah	Sumur Dalam/Bor	6	300	2.56	0.19
Jumlah					1300	11.10	0.84

Sumber : Dokumen Rencana Induk Penyediaan Air Minum Kabupaten Kampar, 2017

Untuk kegiatan Pamsimas di Kecamatan Tambang dapat dilihat pada Tabel

5.12 berikut :

Tabel 5.12 Daftar Kegiatan Pamsimas di Kecamatan Tambang

Tahun	Kecamatan	Desa	Kegiatan
2008	Tambang	Padang Luas	Sistem Pelayanan Sumber Air Tanah Dalam Sumur Dalam/Bor.4Unit
	Tambang	Terantang	Sistem Pelayanan Sumber Air
2010	Tambang	Parit Baru	Bangunan Pelengkap Menara Reservoir 6 unit Sistem Pelayanan Sumber Air Tanah Dalam Sumur Dalam/Bor.6 unit
		Teluk Kenidai	Bangunan Pelengkap Menara Reservoir 6 unit Sistem Pelayanan Sumber Air Tanah Dalam Sumur Dalam/Bor.6 unit
		Kemang Indah	Bangunan Pelengkap Menara Reservoir 6 unit Sistem Pelayanan Sumber Air Tanah Dalam Sumur Dalam/Bor.6 unit

Sumber : Dokumen Rencana Induk Penyediaan Air Minum Kabupaten Kampar, 2017

Tabel 5.13 Kegiatan Program Pamsimas di Kecamatan Tambang

No	Kecamatan	Desa	Kategori desa	Jenis kegiatan										Sumber Air Baku	
				Sumur Bor	Menara Air	Perpipaan	Kran Umum	Hidran Umum	CTPS	Intake	Reservoar	PMA	Bangunan lainnya		
				(unit)	(unit)	(meter)	(unit)	(unit)	(unit)	(unit)	(unit)	(unit)	(unit)		
Tahun 2013															
1	Tambang	Rimbo Panjang	Reguler	2	2	3.694	2			1					Air Tanah
2	Tambang	Aur Sati	Reguler	2	2	1.000				1					Air Tanah
3	Tambang	Kuapan	Reguler	2	2	1.000				1					Air Tanah
4	Tambang	Palung Raya	Sharing APBD	1	1	1.000			2						Air Tanah
5	Tambang	Pulau Permai	Sharing APBD	1	1	1.000			2						Air Tanah

No	Kecamatan	Desa	Kategori desa	Jenis kegiatan										Sumber Air Baku
				Sumur Bor	Menara Air	Perpipaan	Kran Umum	Hidran Umum	CTPS	Intake	Reservoar	PMA	Bangunan lainnya	
				(unit)	(unit)	(meter)	(unit)	(unit)	(unit)	(unit)	(unit)	(unit)	(unit)	
6	Tambang	Gobah	Sharing APBD	1	1	1.000		1					1	Air Tanah
Tahun 2015														
1	Tambang	Kualu	Reguler	2	2	1353	4			1				Air Tanah
2	Tambang	Sungai Pinang	Reguler	2	2	234	2			1				Air Tanah

Sumber : Kegiatan Program Pamsimas Kabupaten Kampar, 2018

5.1.3.3 Analisis Jaringan Listrik di Kecamatan Tambang

Secara umum sumber penerangan pada kawasan permukiman di Kecamatan Tambang sudah teraliri oleh energi listrik. Dari 17 Desa yang ada di Kecamatan Tambang seluruhnya sudah terdapat listrik PLN, tidak terdapat satupun desa yang kondisi jaringan listriknya tidak memadai. Maka dari itu untuk kondisi jaringan listrik di Kecamatan Tambang sudah sangat baik dan terjaga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.14 berikut :

Tabel 5.14 Kondisi Jaringan Listrik di Kecamatan Tambang

No	Desa-Desa di Kecamatan Tambang	Penerangan
		Kondisi Umum
1.	Kuapan	Terdapat listrik PLN
2.	Aur Sati	Terdapat listrik PLN
3.	Tambang	Terdapat listrik PLN
4.	Padang Luas	Terdapat listrik PLN
5.	Gobah	Terdapat listrik PLN
6.	Terantang	Terdapat listrik PLN
7.	Rimba Panjang	Terdapat listrik PLN
8.	Kualu	Terdapat listrik PLN
9.	Teluk Kenidai	Terdapat listrik PLN
10.	Parit Baru	Terdapat listrik PLN
11.	Kemang Indah	Terdapat listrik PLN
12.	Kualu Nenas	Terdapat listrik PLN
13.	Sungai Pinang	Terdapat listrik PLN
14.	Tarai Bangun	Terdapat listrik PLN
15.	Palung Raya	Terdapat listrik PLN
16.	Pulau Permai	Terdapat listrik PLN
17.	Balam Jaya	Terdapat listrik PLN

Sumber : Hasil Survei, 2019

5.1.3.4 Analisis Kondisi Rumah di Kecamatan Tambang

Rumah adalah bangunan buatan manusia yang dijadikan tempat tinggal selama periode waktu tertentu. Rumah, sekarang ini menjadi sebuah kebutuhan penting dalam hidup manusia, dia masuk dalam sebuah lingkaran kebutuhan pokok

yang setiap insan harus memilikinya. Sebagai salah satu kebutuhan primer bagi hidup manusia, rumah amat berperan penting dalam keberlangsungan hidup seseorang. Rumah tidak lagi hanya sekedar tempat berlindung, namun sudah merupakan bagian hidup yang mencakup banyak pengaruh. Seiring berjalannya waktu, rumah berkembang menjadi sebuah identitas bagi pemiliknya. Rumah yang awalnya untuk tempat berlindung dari panas, hujan dan binatang luar, berubah menjadi status sosial sang pemilik. Rumah, dimasa kini menjadi gambaran jati diri, karakter dan nilai hidup seseorang.

Kondisi rumah merupakan salah satu indikator yang di keluarkan oleh BAPPENAS untuk menilai karakteristik kemiskinan di suatu daerah. Kondisi rumah di suatu daerah akan menggambarkan bagaimana kondisi ekonomi masyarakat di daerah tersebut. Semakin banyak masyarakat miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah disuatu daerah maka akan ada unit-unit rumah dengan kondisi tidak layak huni di daerah tersebut. Maka akan ada suatu program khusus baik yang dilakukan pemerintah maupun swadaya untuk membuat program bantuan rumah untuk rumah tidak layak huni. Berikut dapat kita lihat bagaimana kondisi rumah di Kecamatan Tambang pada Tabel 5.15 berikut :

Tabel 5.15 Data Kondisi Permukiman di Kecamatan Tambang

No	Kecamatan	Jumlah Rumah	rumah rusak	rumah hancur	rumah mendapat bantuan stimulan (tidak layak huni & MBR)	jumlah	persentase
1	Tambang	32254	98	6	264	368	0,82

Sumber : Laporan RP3KP Kabupaten Kampar, 2018

Pada Tabel 5.15 dapat dilihat jumlah seluruh unit rumah yang ada di Kecamatan Tambang berjumlah 32.254 unit rumah. Dengan kondisi rumah rusak

berjumlah 98 unit rumah. Untuk rumah hancur berjumlah 6 unit rumah. Dan jumlah rumah yang tidak layak huni yang mendapat bantuan berjumlah 264 unit rumah. Dan untuk rumah yang mendapat bantuan tersebut biasanya dapat dilihat dari kondisi rumah yang masih ber dinding kayu, kondisi atap yang sudah bocor, dan lantai dari tanah ataupun ubin. Maka jumlah total unit rumah dengan kondisi tidak layak di Kecamatan Tambang berjumlah 368 unit rumah. Namun belum seluruh rumah yang mendapat bantuan program. Berikut pada Tabel 5.16 daftar-daftar rumah yang mendapat bantuan di Kecamatan Tambang :

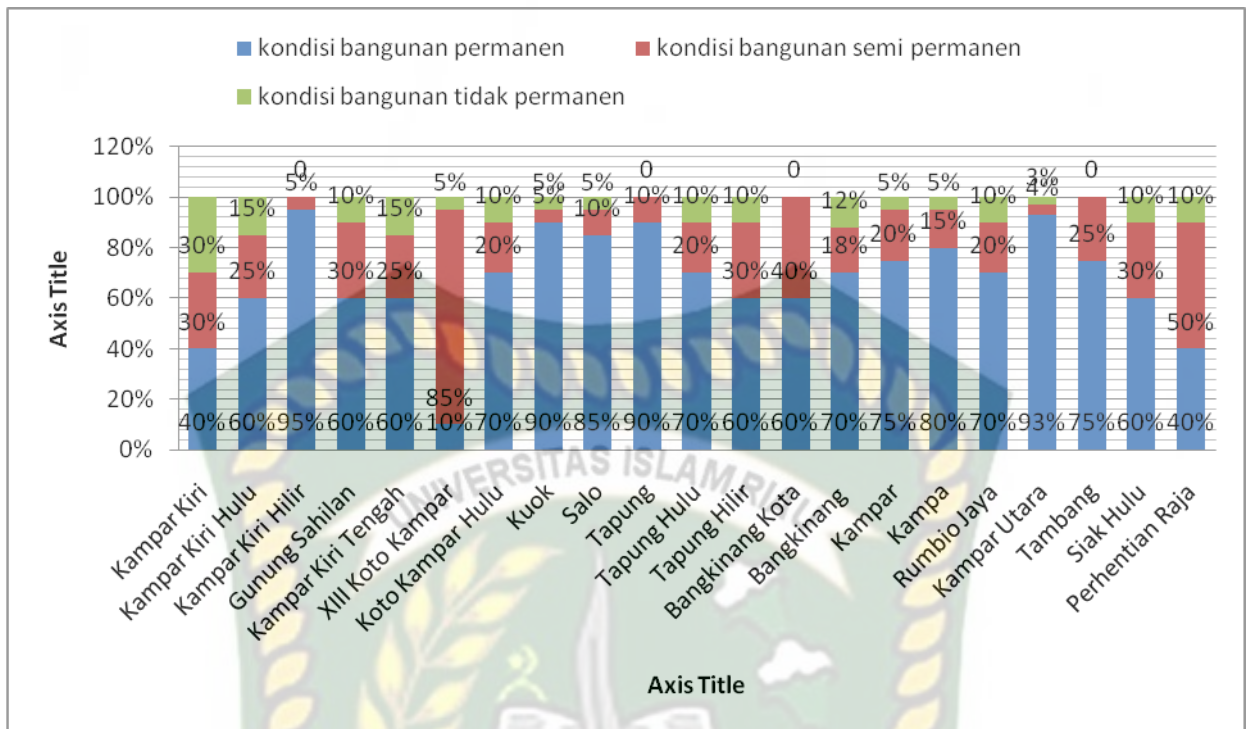
Tabel 5.16 Data Daftar Rumah yang Mendapat Bantuan Stimulant di Kecamatan Tambang

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah Rumah (Unit)
1	Tambang		264
		Aursati	107
		Padang Luas	33
		Balam Jaya	32
		Teluk Kenidai	57
		Pulau Permai	35

Sumber : Laporan RP3KP Kabupaten Kampar, 2018

Dapat dilihat pada Tabel 5.16 daftar rumah yang mendapat bantuan Stimulant berjumlah 264 unit rumah. Desa Aursati dengan jumlah unit rumah terbanyak berjumlah 107 unit dan Desa Balam Jaya yang paling sedikit dengan jumlah 32 unit rumah.

Secara umum lebih dari 50% kondisi bangunan rumah di Kabupaten Kampar terkhususnya di Kecamatan Tambang merupakan bangunan permanen, dan sisanya merupakan bangunan semi permanen dan non permanen. Berikut merupakan gambaran kondisi bangunan rumah di Kabupaten Kampar.



Sumber : Laporan RP3KP Kabupaten Kampar, 2018

Gambar 5.1 Grafik Kondisi Rumah di Kabupaten Kampar

Untuk Kecamatan Tambang secara umum kondisi bangunan rumah adalah bangunan permanen dan sisanya adalah bangunan semi permanen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.17 berikut :

Tabel 5.17 Kondisi Bangunan Rumah Kawasan Permukiman Kecamatan Tambang

Kecamatan	Persentase Kondisi Rumah	Kondisi
Tambang		

Sumber : Laporan RP3KP Kabupaten Kampar, 2018

5.2 Faktor – faktor Penyebab Terjadinya Kemiskinan

5.2.1 Status Pekerjaan

Ada beberapa indikator yang bisa dijadikan tolak ukur produktivitas antara lain adalah status kerja. Status pekerjaan dari responden yang telah di data hampir semuanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya. Tetapi keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal seseorang harus mampu menciptakan lapangan kerja baru sedangkan secara faktual hal tersebut sangat kecil kemungkinannya bagi masyarakat miskin karena keterbatasan modal dan keterampilan. Dapat dilihat pada Tabel 5.18 sebagai berikut :

Tabel 5.18 Status Pekerjaan Responden di Kecamatan Tambang

	Status Pekerjaan	Jumlah Responden (Jiwa)	Persentase (%)
Valid	Tidak Bekerja	59	15
	Bekerja	333	85
	Total	392	100

Sumber : Hasil Analisis, 2019

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebanyak 333 atau sebesar 85% responden status pekerjaannya adalah bekerja Tetapi pekerjaan para responden kebanyakan adalah petani dan pedagang dimana pendapatan perbulannya saja tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, ditambah lagi kemiskinan juga diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan akibat dari tingkat pendidikan masyarakat yang rendah. Sedangkan 59 atau sebesar 15% responden tidak bekerja. Hal tersebut tentunya mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kecamatan Tambang.

5.2.2 Pendapatan Perbulan

Pendapatan perbulan rata – rata setiap rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari hari menggambarkan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan dalam meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Dapat dilihat pada Tabel 5.19 sebagai berikut :

Tabel 5.19 Pendapatan Perbulan Responden di Kecamatan Tambang

	Pendapatan Perbulan	Jumlah Responden (Jiwa)	Persentase (%)
Valid	< 1.500.000	314	80
	> 1.500.000	78	20
	Total	392	100

Sumber : Hasil Analisis, 2019

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebanyak 314 atau sebesar 80% responden berpendapatan < 1.500.000. Sedangkan 78 atau sebesar 20% responden > 1.500.000. Hal tersebut tentunya mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kecamatan Tambang, apabila pendapatan perbulan masyarakat saja di bawah standar taraf hidup. Masyarakat Kecamatan Tambang pada umumnya bekerja tetapi dengan pendapatan perbulan yang berubah ubah atau tidak menetap dengan jenis pekerjaan informal seperti petani dan pedagang, sedangkan untuk pendapatan di atas standar itu para responden atau kepala keluarga yang mempunyai pekerjaan seperti karyawan swasta dan tenaga honorer. Serta terbatasnya kesempatan kerjadan berusaha, lemahnya perlindungan terhadap pengusaha, dan perbedaan upah serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan seperti buruh migran perempuan dan pembantu rumah tangga

Hal ini dijelaskan dengan status rumah tangga di Kecamatan Tambang.

Dapat dilihat pada Tabel 5.20 dibawah ini :

Tabel 5.20 Rumah Tangga Responden di Kecamatan Tambang

	Status Rumah Tangga	Jumlah Responden (Jiwa)	Persentase (%)
Valid	MBR	307	78
	Non MBR	85	22
	Total	392	100

Sumber : Hasil Analisis, 2019

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebanyak 307 atau sebesar 78% responden adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sedangkan 85 atau sebesar 22% responden masyarakat tidak berpenghasilan rendah. Hal tersebut tentunya mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kecamatan Tambang, dengan demikian pendapatan merupakan gambaran terhadap posisi ekonomi keluarga dalam masyarakat.

5.2.3 Jumlah Tanggungan Keluarga

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebagian besar masyarakat di Kecamatan Tambang adalah masyarakat MBR (Masyarakat Berpenghasilan rendah) dan memiliki jumlah tanggungan yang lebih banyak. Jika dalam suatu rumah tangga memiliki jumlah tanggungan tidak diimbangi dengan tingkat pendapatan keluarga yang tinggi akan berdampak pada kehidupan ekonomi dan social masyarakat Kecamatan Tambang. Mengingat umumnya pendapatan masyarakat miskin di Kecamatan Tambang memperoleh pendapatan yang rendah dan tidak menentu serta status rumah tangga yakni termasuk kedalam MBR dan berpengaruh kepada pendapatan perbulan apabila ini terjadi terus menerus maka

akan meningkatkan tingkat kemiskinan di Kecamatan Tambang. Hal ini dikarenakan dalam setiap keluarga hanya satu orang yang bekerja.

Kondisi ekonomi yang dimaksud adalah kemampuan rumah tangga tersebut memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan kondisi sosial dilihat dari kemampuan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan anggota keluarga. Banyak sedikitnya anggota keluarga, erat kaitannya dengan pengeluaran. Keadaan ini mendorong rumah tangga untuk terus berusaha meningkatkan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Sebab semakin tinggi jumlah tanggungan dalam keluarga maka semakin tinggi pula pengeluaran yang dikeluarkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.21 berikut ini :

Tabel 5.21 Jumlah Tanggungan Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Tambang

	Jumlah Tanggungan Keluarga	Jumlah Responden (Jiwa)	Persentase (%)
Valid	> 3 Orang	271	69
	1 - 3 Orang	121	31
	Total	392	100

Sumber : Hasil Analisis, 2019

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebanyak 271 atau sebesar 69% responden memiliki jumlah tanggungan > 3 orang. Sedangkan 121 atau sebesar 31 responden memiliki jumlah tanggungan 1 – 3 orang. Hal tersebut tentunya mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kecamatan Tambang, apabila tingkat taraf hidup suatu keluarga menurun akibat tidak sebandingnya pendapatan dengan tanggungan dalam memenuhi kebutuhan hidup.

5.2.4 Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan erat hubungannya dengan daya nalar dan sikap atau perilaku masyarakat. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka cenderung usaha yang dikelola atau pekerjaan yang diperoleh lebih rasional atau lebih baik dengan memanfaatkan pendidikan yang dimiliki baik diperoleh dari pendidikan formal maupun non formal.

Masalah pendidikan adalah masalah yang sangat penting dalam menentukan sumber daya manusia dalam hal pola pikir. Dengan pendidikan yang rendah tidak mampu untuk merubah pola pikir seseorang untuk berorientasi kedepan. Tingkat pendidikan di lokasi penelitian rata-rata masih sangat rendah yaitu mayoritas responden masih berpendidikan SD–SMP dan hanya sedikit yang tamat SMA ke atas. Sehingga tingkat pendidikan kepala rumah tangga yang masih rendah menyulitkan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada Tabel 5.22 berikut :

Tabel 5.22 Tingkat Pendidikan Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Tambang Tahun 2019

	Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden (Jiwa)	Persentase (%)
Valid	SD - SMP	339	86
	SMA - keatas	53	14
	Total	392	100

Sumber : Hasil Analisis, 2019

Tabel 5.22 menunjukkan bahwa rumah tangga masyarakat miskin di Kecamatan Tambang paling dominan tingkat pendidikannya adalah tamat SD dan SMP yakni sebanyak 339 responden atau sebesar 86% dan yang tamat SMA ke atas hanya 53 responden atau 14% responden dengan demikian pendidikan

merupakan faktor penyebab kemiskinan di Kecamatan Tambang. Rendahnya tingkat pendidikan maka masyarakat tidak mempunyai akses yang baik terhadap informasi, pengetahuan, dan teknologi. Sehingga akan mempengaruhi kemampuan dalam berfikir untuk beralih pekerjaan lain selain petani, pedagang untuk mengembangkan usaha memiliki pendapatan yang lebih tinggi. Pendidikan yang rendah ini akan mempengaruhi keberlangsungan kehidupan akibat dari pekerjaan yang tidak dapat memenuhi keperluan atau kebutuhan hidup masing-masing keluarga sehingga berpengaruh pada pendapatan rumah tangganya.

5.2.5 Modal Usaha

Seseorang miskin sebab mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan. Dapat dilihat pada Tabel 5.23 sebagai berikut :

Tabel 5.23 Jumlah Responden yang memiliki Keterbatasan Modal di Kecamatan Tambang

	Keterbatasan Modal	Jumlah Responden (Jiwa)	Persentase (%)
Valid	Tidak Memiliki Modal	341	87
	Memiliki Modal	51	13
	Total	392	100

Sumber : Hasil Analisis, 2019

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebanyak 347 atau sebesar 87% responden tidak memiliki modal. Sedangkan 51 atau sebesar 13% responden memiliki modal. Hal tersebut tentunya mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kecamatan Tambang, Keterbatasan modal dan landbank juga menjadi salah satu sebab banyak pengembang khusus Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

gulung tikar. Harga tanah yang semakin tak ekonomis bagi rumah MBR sehingga pengembang kesulitan karena harga rumah MBR sudah dipatok pemerintah menjadi kendala besar apalagi sosialisasi untuk masyarakat tentang koperasi dan lain sebagainya sangat minim.

5.2.6 Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Tambang

Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kecamatan Tambang dilakukan analisis secara statistik menggunakan metode analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Perhitungan dalam penelitian ini adalah dengan bantuan SPSS. Ringkasan hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 5.24 Hasil Estimasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Tambang

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.076	.089		.850	.396
status pekerjaan	.146	.042	.127	3.452	.001***
pendapatan perbulan	.058	.040	.056	1.455	.046***
tingkat pendidikan	.449	.148	.372	3.030	.003***
jumlah tanggungan keluarga	-.083	.039	-.094	-2.135	.033***
modal usaha	.478	.151	.391	3.175	.002***

a. Dependent Variable: Kemiskinan

R squared : *** tingkat keyakinan 100%***

Sumber: Hasil Analisis, 2019

Berdasarkan hasil analisis regresi di atas, maka persamaan regresi yang terbentuk pada uji regresi ini adalah :

$$Y = 0,076 + 0,146 X_1 + 0,058 X_2 + 0,449 D_1 - 0,083 D_2 + 0,478 D_3$$

Keterangan :

Y = Kemiskinan

X₁ = Status pekerjaan

X₂ = Pendapatan perbulan

D₁ = Tingkat pendidikan

D₂ = Jumlah tanggungan keluarga

D₃ = Modal usaha

Dari persamaan tersebut dapat dibuat suatu contoh kasus, bahwa apabila status pekerjaan, pendapatan perbulan, tanggungan keluarga, tingkat pendidikan dan keterbatasan modal dapat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Tambang. Maka dari itu, dapat diketahui bahwa angka kejadian atau kemungkinan kemiskinan terjadi adalah 1,046.

a. Koefisien Parameter X1

Dengan meningkatkannya pekerjaan rumah tangga miskin yang berada dalam keadaan kemiskinan maka mengakibatkan penurunan tingkat kemiskinan semakin rendah. Hal ini sesuai analisis yang menunjukkan nilai koefisien estimasinya positif sebesar 0,146. Artinya jika kepala rumah tangga bekerja maka kemiskinan akan menurun sebesar 14,6 %.

b. Koefisien Parameter X2

Dengan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dapat menurunkan tingkat kemiskinan, hal ini sesuai dengan hasil analisis yang menunjukkan nilai koefisien estimasinya positif sebesar 0,058 artinya, semakin meningkatkannya pendapatan maka akan menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 5,8%.

c. Koefisien Parameter D1

Dengan meningkatkan tingkat pendidikan dapat menurunkan kemiskinan, hal ini sesuai dengan hasil analisis yang menunjukkan nilai koefisien estimasinya positif sebesar 0,449 artinya, semakin meningkatkannya tingkat pendidikan keluarga miskin maka akan menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 44,9%.

d. Koefisien Parameter D2

Dengan meningkatkan jumlah tanggungan keluarga miskin dapat menurunkan pendapatan akibat pengeluaran yang semakin tinggi dan meningkatkan tingkat kemiskinan, hal ini sesuai dengan hasil analisis yang menunjukkan nilai koefisien estimasinya negatif sebesar -0,083 artinya, semakin meningkatnya jumlah tanggungan dalam keluarga maka meningkat pula kemiskinan sebesar 8,3%.

e. Koefisien Parameter D3

Dengan meningkatnya modal rumah tangga yang berada dalam keadaan miskin mengakibatkan penurunan tingkat kemiskinan semakin tinggi. Hal ini sesuai dengan analisis yang menunjukkan nilai koefisien estimasinya positif sebesar 0,478 artinya, dengan adanya modal usaha maka dari segi kemiskinan tersebut akan menurun sebesar 47,8%.

5.2.7 Uji Parsial (Uji T)

Uji parsial atau disebut juga uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas (X) secara parsial (sendiri-sendiri/masing-masing variabel) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y). Uji T dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dan t tabel. Apabila t hitung $> 0,05$ maka H_0 ditolak sedangkan H_1 diterima, dimana variabel bebas yang di maksud mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Sebaliknya apabila t hitung $< 0,05$ maka disimpulkan bahwa H_0 diterima sedangkan H_1 ditolak, dimana berarti variabel bebas yang di maksud tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Berikut Tabel 5.25 hasil uji T :

Tabel 5.25 Hasil Uji T

Variabel	T Hitung	Sig	Batas Sig
Status Pekerjaan (X1)	3,425	.001	0,05
Pendapatan Perbulan (X2)	1,455	.046	
Tingkat Pendidikan (D1)	3,030	.003	
Jumlah Tanggungan Keluarga (D2)	-2,135	.033	
Modal Usaha (D3)	3,175	.022	

Sumber: Hasil Analisis, 2019

Hasil pengujian dengan SPSS diperoleh untuk variabel X_1 (status pekerjaan) diperoleh nilai t hitung 3,425 dengan menggunakan batas signifikansi 0,05 maka pada status pekerjaan sebesar $3,425 > 0,05$. Atas dasar perbandingan tersebut, maka H_0 ditolak H_1 diterima, dan jika terjadi hal seperti ini maka variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan antara status pekerjaan terhadap kemiskinan di Kecamatan Tambang.

Hasil pengujian dengan SPSS diperoleh untuk variabel X_2 (pendapatan perbulan) diperoleh nilai t hitung 1,455 dengan menggunakan batas signifikansi 0,05 maka pada status pekerjaan sebesar $1,455 > 0,05$. Atas dasar perbandingan tersebut, maka H_0 ditolak H_1 diterima, dan jika terjadi hal seperti ini maka variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan antara pendapatan perbulan terhadap kemiskinan di Kecamatan Tambang.

Hasil pengujian dengan SPSS diperoleh untuk variabel D_1 (tingkat pendidikan) diperoleh nilai t hitung 3,030 dengan menggunakan batas signifikansi 0,05 maka pada status pekerjaan sebesar $3,030 > 0,05$. Atas dasar perbandingan tersebut, maka H_0 ditolak H_1 diterima, dan jika terjadi hal seperti ini maka variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan antara tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di Kecamatan Tambang.

Hasil pengujian dengan SPSS diperoleh untuk variabel D_2 (jumlah tanggungan keluarga) diperoleh nilai t hitung $-2,135$ dengan menggunakan batas signifikansi $0,05$ maka pada status pekerjaan sebesar $-2,135 > 0,05$. Atas dasar perbandingan tersebut, maka H_0 ditolak H_1 diterima, dan jika terjadi hal seperti ini maka variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan antara Jumlah Tanggungan keluarga terhadap kemiskinan di Kecamatan Tambang.

Hasil pengujian dengan SPSS diperoleh untuk variabel D_3 (modal usaha) diperoleh nilai t hitung $3,175$ dengan menggunakan batas signifikansi $0,05$ maka pada status pekerjaan sebesar $3,175 > 0,05$. Atas dasar perbandingan tersebut, maka H_0 ditolak H_1 diterima, dan jika terjadi hal seperti ini maka variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan antara keterbatasan modal kemiskinan di Kecamatan Tambang.

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa kelima variabel tersebut berpengaruh terhadap kemiskinan dengan tingkat perhitungan terbesar yaitu, status pekerjaan, modal usaha, tingkat pendidikan, pendapatan perbulan, dan jumlah tanggungan keluarga. Dapat kita simpulkan bahwa faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi kemiskinan di Kecamatan Tambang adalah status pekerjaan.

5.3 Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Tambang

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis LFA (*Logical Framework Analysis*) dimana didalam analisis LFA ini terdapat analisis situasi eksisting, membangun hirarki logika dari tujuan yang akan dicapai, mengidentifikasi risiko potensial yang dihadapi dalam pencapaian tujuan dan hasil, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dibawah ini :

5.3.1 Analisis Situasi

Tahapan analisis ini merupakan tahapan persiapan yang tidak secara baku harus ditetapkan dalam langkah-langkah pengembangan LFA terhadap suatu kasus. Pada analisis situasi ataupun yang sering juga disebut sebagai analisis konteks, dideskripsikan mengenai permasalahan atau situasi yang akan dicarikan solusinya melalui pendekatan LFA. Informasi-informasi yang digunakan dapat berupa kondisi pada laporan-laporan perencanaan strategi terdahulu ataupun kompilasi dokumen-dokumen lainnya (*European Integration Office, 2011*).

Kemiskinan yang dilatar belakangi oleh berbagai indikator seperti tingkat pendidikan, status pekerjaan, jumlah tanggungan dan keterbatasan modal, menjadi suatu faktor yang sangat berpengaruh terhadap tingginya angka kemiskinan. Maka dari itu pemerintah sedang berupaya mencari solusi melalui program-program yang digagasnya mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar, Pelatihan Keterampilan, Program Keluarga Berencana hingga Pemberdayaan UMKM pun sudah dilaksanakan.

Pada dasarnya program-program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh dinas terkait sudah mulai dijalankan dengan arahan dan tujuan yang ingin dicapai, namun setiap program penanggulangan kemiskinan pada intinya merupakan program yang langsung terlibat dengan masyarakat. Kultur dan budaya masyarakat setempat memiliki ragam macam yang berbeda, sehingga setiap program memiliki variasi masalah yang berbeda pula. Tetapi umumnya sering terjadi masalah yang timbul dari masyarakat itu sendiri. Perbedaan pandangan dan sikap dari masyarakat memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap keberhasilan suatu program. Padahal tujuan dari program tersebut untuk

mengurangi angka kemiskinan yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Maka sangat disayangkan apabila intervensi dari masyarakat tidak dicari solusinya.

Dan yang menjadi masalah terhadap program-program penanggulangan kemiskinan juga dengan terbatasnya dana, karena dana yang dibutuhkan sangat besar maka dengan dana yang terbatas tidak seluruh masyarakat miskin yang bisa merasakan dampak dari program tersebut. Terlebih lagi program yang tidak ada pengawasan sehingga tujuan dari program tersebut tidak maksimal.

5.3.2 Analisis Pemangku Kepentingan

Berdasarkan isu-isu strategi penanggulangan kemiskinan, maka berikut ini akan dilakukan identifikasi pemangku kepentingan yang terkait dalam strategi penanggulangan kemiskinan. Secara umum, pemangku kepentingan yang terlibat tersusun dari empat komponen utama, yaitu unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha dan masyarakat. Berikut adalah penjelasan mengenai pemangku kepentingan tersebut.

a. Pemerintah

Unsur pemerintah sebagai pembuat kebijakan, menyusun strategi serta merealisasikan berbagai kegiatan penanganan dan penanggulangan kemiskinan yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Unsur birokrasi pemerintah yang terlibat adalah Dinas Pendidikan, Dinas Ketenagakerjaan, BKKBN, dan Dinas Penanaman Modal.

Kewajiban Pemerintah Daerah, yakni memenuhi hak dasar masyarakat miskin, seperti kesehatan, pendidikan dan usaha sebagai sumber pendapatan. Untuk

merealisasikan dan mewujudkan kewajiban tersebut, Pemerintah Daerah menghimpun informasi yang akurat tentang data masyarakat miskin di setiap wilayah kecamatan dan kelurahan. Dalam aspek pembuatan kebijakan, pihak pemerintah harus mendukung implementasi kebijakan-kebijakan yang mendukung program penanggulangan kemiskinan.

b. Akademis

Pihak akademisi memiliki kapasitas dalam pengembangan studi-studi kedepannya yang dibutuhkan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Sebagaimana yang dirasakan bahwa studi mengenai upaya penanggulangan kemiskinan dari akademisi dirasakan masih kurang dan belum sepenuhnya terpenuhi. Bila program penanggulangan kemiskinan sudah mulai berkembang maka dukungan riset untuk memajukan program penanggulangan kemiskinan tetap diperlukan. Dukungan akademisi diperuntukkan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang terlatih dan terampil untuk terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan dengan mengkedepankan nilai-nilai sosial didalamnya.

c. Dunia Usaha

Pemerintah tidaklah mungkin mengurangi angka kemiskinan tanpa peran serta pihak lain. Untuk itu butuh peran sektor dunia usaha untuk ikut menanggulangi kemiskinan yang memang menjadi penyakit kronis masyarakat tersebut melalui program Corporate Sosial Responsibility (CSR). Sebagai negara yang kaya dengan berbagai macam sumber daya alam dan besar potensi sumber daya manusia serta memiliki pasar potensial yang sangat besar, menjadikan Indonesia punya potensi ekonomi yang sangat besar pula. Ribuan perusahaan

yang ada di Indonesia baik yang tergabung dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun non BUMN mempunyai potensi yang besar dalam ikut berperan dalam usaha menurunkan angka kemiskinan yang masih sangat memprihatinkan tersebut. Kalangan penggiat filantropi dan dunia usaha melalui program CSR-nya sebenarnya telah melakukan banyak upaya untuk peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Mereka masuk pada berbagai isu permasalahan sosial dan lingkungan baik berupa program pengembangan komunitas, peningkatan usaha ekonomi mikro, peningkatan kualitas layanan kesehatan dan lingkungan, pendidikan, bantuan bagi kalangan difabel, masyarakat terpencil, korban bencana alam, dan lain-lain.

Kewajiban dunia usaha, baik swasta maupun BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), diwujudkan dalam bentuk pemberian dan pemanfaatan dana sosial perusahaan atau pemanfaatan program kemitraan dan bina lingkungan, untuk mendukung program penanganan dan penanggulangan kemiskinan.

d. Masyarakat

Unsur komunitas yang terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan meliputi masyarakat, serta lembaga masyarakat (LSM). Masyarakat dipercaya akan mendapatkan manfaat dari program penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut dikarenakan program penanggulangan kemiskinan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi angka kemiskinan.

Keberadaan dan peran LSM dalam program penanggulangan kemiskinan juga perlu diperhatikan. Pemerintah, akademisi dan juga pihak terkait hendaknya membina hubungan yang baik dengan LSM agar masyarakat yang menerima program bantuan penanggulangan kemiskinan lebih tepat sasaran agar terciptanya

kesejahteraan bagi masyarakat dengan terbukanya lapangan pekerjaan, peningkatan partisipasi pendidikan, serta bantuan modal untuk membuka usaha sesuai dengan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat.

5.3.3 Analisis Stakeholders

Analisis *stakeholder* ini merupakan instrumen yang sangat penting untuk memahami konteks sosial dan kelembagaan dari satu kegiatan program/proyek. Tujuan analisis *stakeholder* yaitu mengidentifikasi pihak-pihak yang terkait dalam isu-isu yang digarap dalam program, peran-perannya, kepentingannya, dan dampak/efek yang ditimbulkan oleh adanya pihak-pihak tersebut terhadap isu. Analisis *stakeholder* dalam penelitian terdiri dari Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Ketenagakerjaan, BKKBN, Dinas Penanaman Modal dan Dinas Sosial. Agar lebih jelas analisis *stakeholder* pada Tabel 5.26 berikut :

Tabel 5.26 Identifikasi Stakeholder yang Terlibat

No	Stakeholder	Keterangan
1	Dinas Penanaman Modal Kabupaten Kampar	Bidang Penanaman Modal
2	BKKBN Kabupaten Kampar	Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga
3	Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
4	Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Kampar	Bidang Pengembangan dan Produktivitas Tenaga Kerja
5	Dinas Sosial Kabupaten Kampar	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Sumber: Hasil Analisis, 2019

Tabel 5.27 Analisis Kepentingan (*Interest*) dan Dampak Instansi Terhadap Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan

No	Stakeholder	Karakteristik	Masalah	Potensi	Keterlibatan
1	Dinas Penanaman Modal	Berwenang dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian, pelaksana kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan pelayanan dan pengelolaan data dan informasi	Program CSR yang masih kurang tepat sasaran, masalah masyarakat dengan perusahaan	Program CSR serta investasi modal untuk masyarakat miskin	Berkontribusi besar dalam permodalan untuk masyarakat
2	BKKBN	Berwenang dalam perumusan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana	Lanjut pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi	Berkemampuan dalam mengatur jumlah penduduk	Mampu menahan laju pertumbuhan penduduk
3	Dinas Pendidikan	Berwenang dalam merumuskan kebijakan dan pelaksana kebijakan teknis dibidang pendidikan	Masih ada angka tidak bersekolah atau tingkat partisipasi sekolah rendah	Memberi dampak terhadap kesadaran masyarakat	Berkontribusi terhadap sistem pendidikan
4	Dinas Ketenagakerjaan	Berwenang dalam merumuskan kebijakan dan pelaksana kebijakan di bidang ketenagakerjaan	Masih ada angka masyarakat yang tidak bekerja dan lapangan pekerjaan terbatas	Mampu menjadi wadah dalam penyediaan program untuk lapangan pekerjaan	Terlibat dalam masalah ketenagakerjaan dan berkontribusi terhadap penyediaan lapangan pekerjaan
5	Dinas Sosial	Berwenang dalam	Beberapa program pengentasan	Mampu dengan program tersebut	Terlibat dalam upaya-upaya secara merinci

		perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro dibidang sosial	kemiskinan masih kurang tepat sasaran dan kurangnya pengawasan dari pemerintah	mengurangi angka kemiskinan secara maksimal	dalam permasalahan sosial kemiskinan secara mendalam melalui program-program kebijakan dari kementerian
--	--	--	--	---	---

Sumber: Analisis, 2019

Berdasarkan hasil analisis *stakeholder* dengan melakukan wawancara maka didapatkan hasil mengenai masalah apa saja yang menjadi hambatan dalam program penanggulangan kemiskinan. Hasil wawancara ini diuraikan kedalam analisis permasalahan. Berikut akan ditampilkan tabel hasil wawancara dengan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Kampar, Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Kampar, Dinas Sosial dan BKKBN Kabupaten Kampar untuk dapat menjelaskan permasalahan pada program Penanggulangan Kemiskinan.

Tabel 5.28 Hasil Wawancara Instansi

No	Responden	Hasil Wawancara
1	Bapak Bambang, SIP (Kasi Bidang Penanaman Modal)	Hasil wawancara yang dilakukan bersama Kasi Bidang Penanaman Modal Bapak Bambang, SIP bahwa sudah ada dilakukannya suatu program kegiatan pemberdayaan UMKM bermitra dengan perusahaan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri dan program CSR yang berguna untuk penanggulangan kemiskinan. Namun seiring berjalannya program tersebut masih ada mengalami masalah-masalah, terutama program CSR yang tidak tepat sasaran maupun program pemberdayaan UMKM yang masih adanya intervensi dari masyarakat setempat.
2	Bapak Iskandar, SP (Kasi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga)	Hasil wawancara yang dilakukan bersama Kasi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Kelurga Bapak Iskandar, SP mengenai program yang dijalankan oleh

		<p>BKKBN Kabupaten Kampar yaitu program kependudukan keluarga berencana pembangunan keluarga (KKBPK) masih mengalami berbagai masalah terutama pada laju pertumbuhan penduduk yang masih belum bisa diatasi dan tingkat partisipasi masyarakat terhadap program tersebut masih ada yang tidak peduli.</p>
3	<p>Bapak Razi (Kabid Bidang Pengembangan dan Produktivitas Tenaga Kerja)</p>	<p>Hasil wawancara yang dilakukan bersama Kabid Bidang Pengembangan dan Produktivitas Tenaga Kerja Bapak Razi mengatakan bahwa dengan adanya program pelathan-pelatihan keterampilan yang dilaksanakan oleh dinas ketenagakerjaan Kabupaten Kampar cukup ditanggapi antusias oleh masyarakat. Namun pada akhirnya masih mengalami berbagai masalah baik dari sikap masyarakat itu sendiri atau perusahaan sebagai penerima tenaga kerja nantinya. Masyarakat masih memiliki budaya yang mana memilih dalam bekerja padahal dengan segala keterbatasan namun permintaan yang begitu tinggi. Ditambah lagi sikap perusahaan yang cukup tertutup terhadap pekerja dari masyarakat setempat.</p>
4	<p>Bapak Admiral, SP, Msi (Kasi Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar)</p>	<p>Hasil wawancara yang dilakukan bersama Kasi Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Bapak Admiral, SP, Msi mengatakan bahwa program Kartu Indonesia Pintar yang digagas oleh pemerintah yang bertujuan memberikan pelayanan pendidikan terutama kepada masyarakat miskin sehingga dengan program ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pendidikan anak yang kurang mampu hingga menyelesaikan program wajib belajar 12 tahun. Diharapkan nantinya tidak ada lagi anak putus sekolah dari keluarga miskin dikarenakan tidak sanggup memenuhi kebutuhan biaya pendidikan dan diharapkan dengan ini dapat mengurangi angka kemiskinan karena tingkat pendidikan yang semakin tinggi. Namun dengan seiring berjalannya program KIP masih saja mengalami berbagai masalah seperti belum terealisasinya program KIP secara menyeluruh dengan dana yang terbatas.</p>
5	<p>Ibuk Rosmiati, SH (Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial)</p>	<p>Hasil wawancara yang dilakukan bersama Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Ibuk Rosmiati, SH mengatakan bahwa program-program yang digagas oleh dinas</p>

		sosial dengan tujuan untuk menanggulangi kemiskinan adalah program keluarga harapan (PKH). Namun seiring berjalannya PKH masih banyak mengalami berbagai masalah. Seperti kurang tepat sasaran dan banyak protes dari masyarakat hal ini dilatarbelakangi oleh pendataan yang tidak berkelanjutan, sehingga masyarakat penerima bantuan ada yang sudah mampu namun masih mendapat bantuan dan sebaliknya masyarakat yang layak menerima manfaat tidak bisa menjadi anggota PKH.
--	--	---

Sumber: Analisis, 2019

5.3.4 Analisis Permasalahan

Analisis masalah dilakukan dengan mengidentifikasi masalah-masalah utama dan membangun “pohon masalah” (*problem tree*) melalui analisis sebab dan akibat (*analysis of cause and effects*). Analisis masalah dimulai dengan fokus pada masalah-masalah yang dihadapi. Analisis masalah dilakukan secara partisipatif setelah sebelumnya dilakukan analisis *stakeholder*.

5.3.4.1 Analisis Permasalahan Hasil Penelitian

Permasalahan kemiskinan merupakan suatu masalah bersama, merupakan tugas pemerintah maupun masyarakat, kemiskinan harus menjadi fokus bersama, dengan tingginya angka kemiskinan disuatu daerah maka akan mengakibatkan terhambatnya pembangunan baik fisik maupun non fisik. Sejauh ini sudah banyak program-program dari pemerintah guna menanggulangi angka kemiskinan, namun program yang sudah berjalan masih saja belum optimal, baik dari benturan terhadap masyarakat itu sendiri.

5.3.4.2 Analisis Permasalahan *Stakeholder*

Analisis masalah ini dapat dilakukan dengan menggunakan pohon masalah melalui suatu proses sebab akibat. Adapun permasalahan yang dihadapi program penanggulangan kemiskinan, berdasarkan hasil wawancara yakni :

1. Dengan adanya investasi maka sangat berpengaruh terhadap berkurangnya angka kemiskinan dikarenakan berimbas terhadap terbukanya lapangan pekerjaan baru. Untuk kegiatan pemberdayaan UMKM bermitra dengan perusahaan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri masih terbentur dengan masyarakat setempat, adanya intervensi masyarakat terhadap perusahaan. Masyarakat menekan perusahaan untuk meminta uang, padahal dengan kegiatan ini diharapkan perusahaan memberikan bantuan kepada masyarakat berupa bantuan yang berguna terhadap bidang usaha. Sebagai contoh memberikan bantuan terhadap galian kolam ikan kepada masyarakat yang memiliki lahan untuk dijadikan kolam ikan, atau pemberian pupuk untuk para petani. Namun dengan adanya tekanan dari masyarakat yang meminta uang kepada perusahaan maka tujuan dari kegiatan ini tidak tepat sasaran, sehingga bantuan yang diberikan oleh perusahaan tidak berguna terhadap keberlangsungan ekonomi, apabila perusahaan memberikan bantuan dalam bentuk uang maka masyarakat hanya menggunakan begitu saja sehingga nilai uang tersebut habis begitu saja tanpa memberikan dampak terhadap jenis usaha yang diharapkan. Masalah selanjutnya datang dari beberapa perusahaan yang seharusnya didalam peraturan yang ada perusahaan harus memberi manfaat untuk masyarakat sekitarnya. Namun yang ada malah perusahaan bersifat tertutup kepada masyarakat. Misal

perusahaan tidak mau bermitra kepada masyarakat yang memiliki usaha-usaha kecil dalam hal yang dibutuhkan perusahaan. Seperti pengadaan air minum perusahaan tidak mau bermitra dengan masyarakat yang memiliki usaha depot air minum. Hal ini tentu menjadi suatu solusi apabila perusahaan tidak mampu bermitra dalam bentuk permodalan kepada masyarakat sekitar. Namun sifat tertutup perusahaan sangat disayangkan dan tentunya harus menjadi perhatian khusus oleh pemerintah.

2. Dengan adanya program keluarga berencana namun belum mampu menekan angka laju pertumbuhan penduduk, dengan minimnya keinginan masyarakat yang ikut serta dalam program keluarga berencana, sehingga angka pertumbuhan penduduk semakin meningkat. Dengan jumlah tanggungan keluarga yang besar maka akan berpengaruh terhadap angka kemiskinan.
3. Pada indikator sektor pekerjaan yang menjadi masalah utama adalah budaya masyarakat yang cenderung pilih memilih dalam bekerja, padahal dari segi pendidikan masyarakat tersebut tidak memiliki pendidikan yang tinggi ditambah lagi masyarakat tersebut juga tidak memiliki skill dan kemampuan yang cukup bisa bersaing. Banyak terjadi kasus pada bidang pekerjaan buruh kasar, banyak masyarakat setempat tidak mau bekerja pada bidang ini, sehingga perusahaan yang berada pada suatu daerah tersebut lebih memilih pekerja dari daerah pendatang, sehingga menjadi gejolak ditengah masyarakat. Sebagai contoh pada PT perkebunan sawit masyarakat setempat ingin bekerja hanya pada bidang satpam, pengawas dan sejenisnya. Namun sebagai buruh pendodos masyarakat setempat tidak ingin bekerja pada bidang

ini, terbentur dengan budaya gengsi dan malu. Sehingga PT perkebunan sawit memilih pekerja dari daerah pendatang untuk bekerja pada bidang ini.

4. Melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang digagas oleh pemerintah, dinas pendidikan yang menjadi pelaksana program KIP tersebut telah menjalankan program dengan maksimal. Namun setiap program tentu memiliki masalah yang menjadi tugas bersama. Dalam hal ini program KIP tersebut dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin/rentan miskin/prioritas tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur pendidikan formal (mulai SD/MI hingga anak Lulus SMA/SMK/MA) maupun pendidikan non formal. Melalui program ini pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah, dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya. KIP juga diharapkan meringankan biaya personal pendidikan peserta didik, baik yang langsung maupun tidak langsung. Namun pada kenyataannya setiap program pasti memiliki masalah yang bervariasi, KIP yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan terutama keluarga miskin agar kedepannya mampu mengurangi angka kemiskinan pun juga memiliki masalah yang terbilang dapat menghambat tujuan dari program tersebut, masalah pertama yang dihadapi adalah program KIP belum mampu merealisasikan secara menyeluruh kepada masyarakat miskin, bahkan angka yang belum menerima bantuan KIP tersebut sangat signifikan, dan penerima program KIP ada yang uang bantuannya tidak keluar, sehingga terjadi keluhan dan protes yang dilakukan oleh masyarakat miskin terkhususnya. Masalah selanjutnya adalah

terbatas anggaran dana yang dikeluncurkan untuk program KIP, sehingga penerima bantuan program tidak menyuluruh dan terjadi ketimpangan di tengah-tengah masyarakat miskin tentunya.

5. Dengan adanya program keluarga harapan (PKH) yang digagas oleh kementerian sosial Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI. Melalui PKH, KM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan *center of*

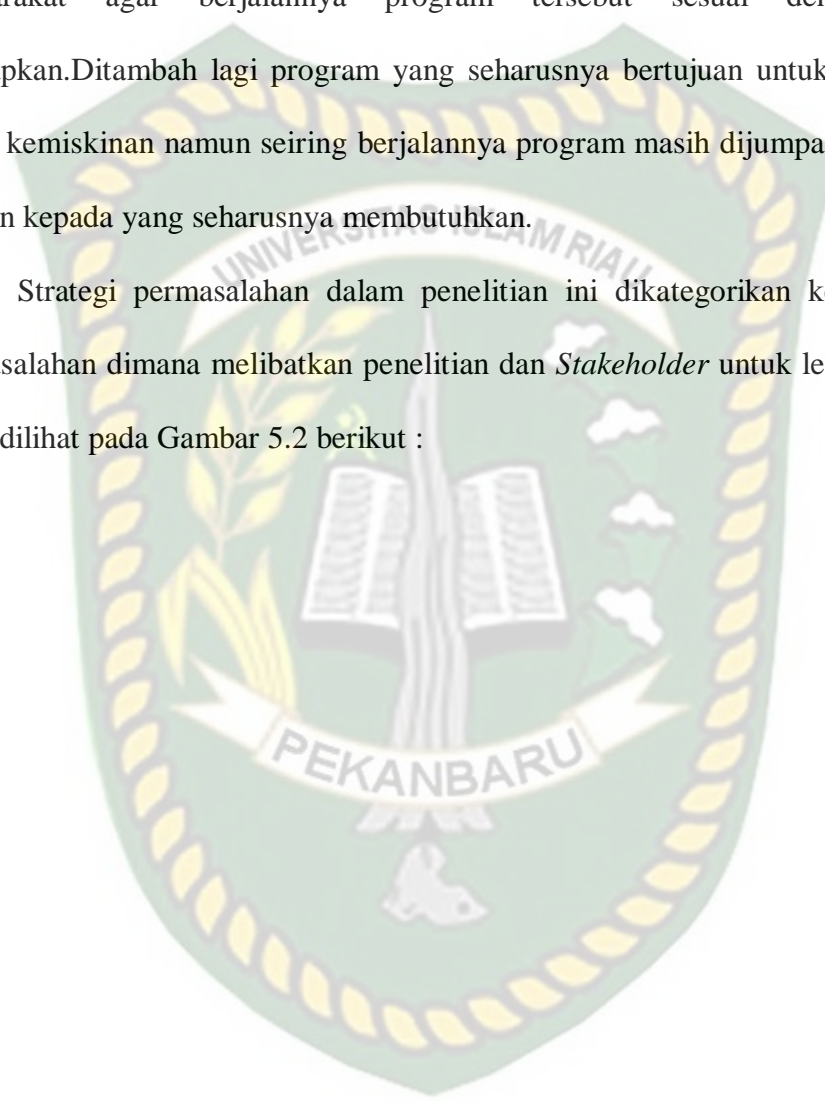
excellence penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional. Namun dengan seiringnya berjalannya PKH tersebut masih memiliki masalah-masalah yang menjadi perhatian bersama. Mulai dari kurang tepat sasaran penerima manfaat PKH sehingga menjadi gejala di tengah tengah masyarakat. Banyak dijumpai bahwa masyarakat penerima manfaat PKH bukan dari keluarga miskin, bahkan bisa dikategorikan keluarga mampu. Dan sering juga dijumpai masyarakat miskin yang seharusnya menerima manfaat dari PKH namun sampai saat ini belum terdaftar sebagai penerima manfaat. Tentu masalah ini dilatar belakangi oleh pendataan yang tidak berubah dari tahun ke tahun, pendataan keluarga miskin masih menggunakan data yang lama sehingga keluarga yang tadinya miskin sudah menjadi keluarga yang bercukupan akan tetapi tetap menerima manfaat dari PKH. Dan keluarga miskin yang sebelumnya terdaftar tetap sampai saat ini juga belum terdaftar.

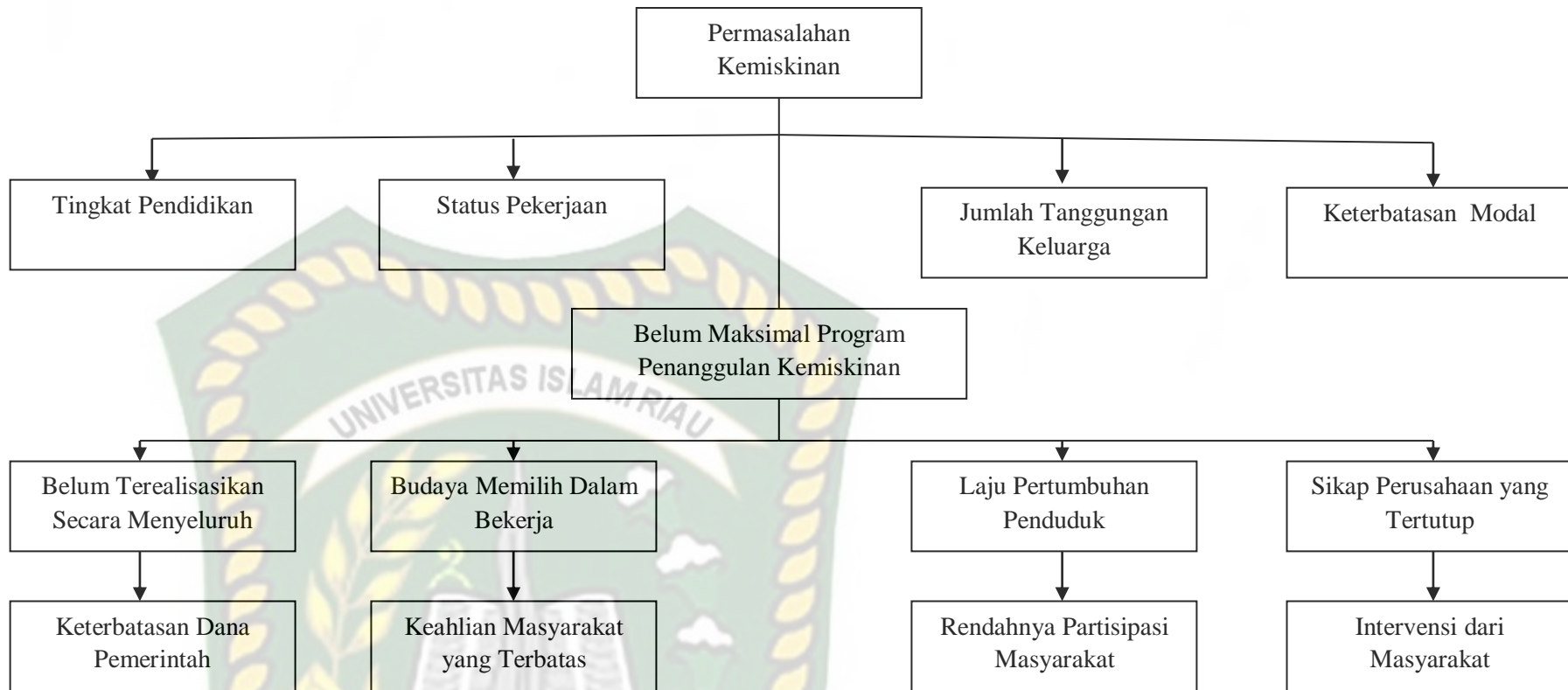
5.3.4.3 Analisis Permasalahan Program Yang Belum Terimplementasi

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari *stakeholder*terkait yaitu Dinas Penanaman Modal Kabupaten Kampar, BKKBN Kabupaten Kampar, Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Kampar dan Dinas Sosial Kabupaten Kamparmengenai program-program untuk menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Kampar pada dasarnya sudah berjalan berdasarkan program yang telah ditetapkan, namun setiap program masih memiliki masalah-masalah yang mengakibatkan kurang optimalnya program sesuai dengan arah dan tujuan dari program itu tersebut. Terutama masalah yang ada seringkali berhubungan dengan pihak masyarakat setempat yang apatis atau

mengganggu jalannya program tersebut. Hal ini tentu menjadi perhatian bersama karena pada dasarnya program penanggulangan kemiskinan itu diarahkan untuk masyarakat itu sendiri, maka dari itu dibutuhkan pendekatan yang lebih kepada masyarakat agar berjalannya program tersebut sesuai dengan yang diharapkan. Ditambah lagi program yang seharusnya bertujuan untuk mengentas angka kemiskinan namun seiring berjalannya program masih dijumpai tidak tepat sasaran kepada yang seharusnya membutuhkan.

Strategi permasalahan dalam penelitian ini dikategorikan kedalam dua permasalahan dimana melibatkan penelitian dan *Stakeholder* untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 5.2 berikut :





Sumber: Hasil Analisis, 2019

Gambar 5.2 Pohon Permasalahan Program Penanggulangan Kemiskinan

5.3.5 Analisis Tujuan

Analisis tujuan dalam arti luas merupakan prosedur yang secara sistematis mengidentifikasi, mengkategorikan, menetapkan, dan jika dianggap perlu menyeimbangkan tujuan-tujuan dari para pihak yang terlibat. Analisis tujuan dan analisis masalah saling mempengaruhi satu dengan lainnya, makin banyak informasi tentang situasi masalah, maka makin lebih spesifik dalam merumuskan tujuan, jenis dan outline dari tujuan-tujuan yang dianalisis mempengaruhi persepsi terhadap masalah-masalah tersebut.

Pohon masalah ditransformasikan menjadi pohon tujuan (*objective tree*) dengan menyatakan kembali masalah-masalah tersebut sebagai tujuan-tujuan. Pohon tujuan dapat dianggap sebagai citra cermin positif dari pohon masalah. Dalam hal ini penting untuk menyusun ulang posisi dari tujuan-tujuan saat pohon tujuan dikembangkan.

Berdasarkan pohon masalah maka diketahui tujuan utama adalah **“Untuk meningkatkan kualitas program penanggulangan kemiskinan sehingga tujuan dari program tersebut terealisasi secara maksimal guna mengurangi angka kemiskinan”**

Upaya untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan beberapa sasaran, sebagai berikut:

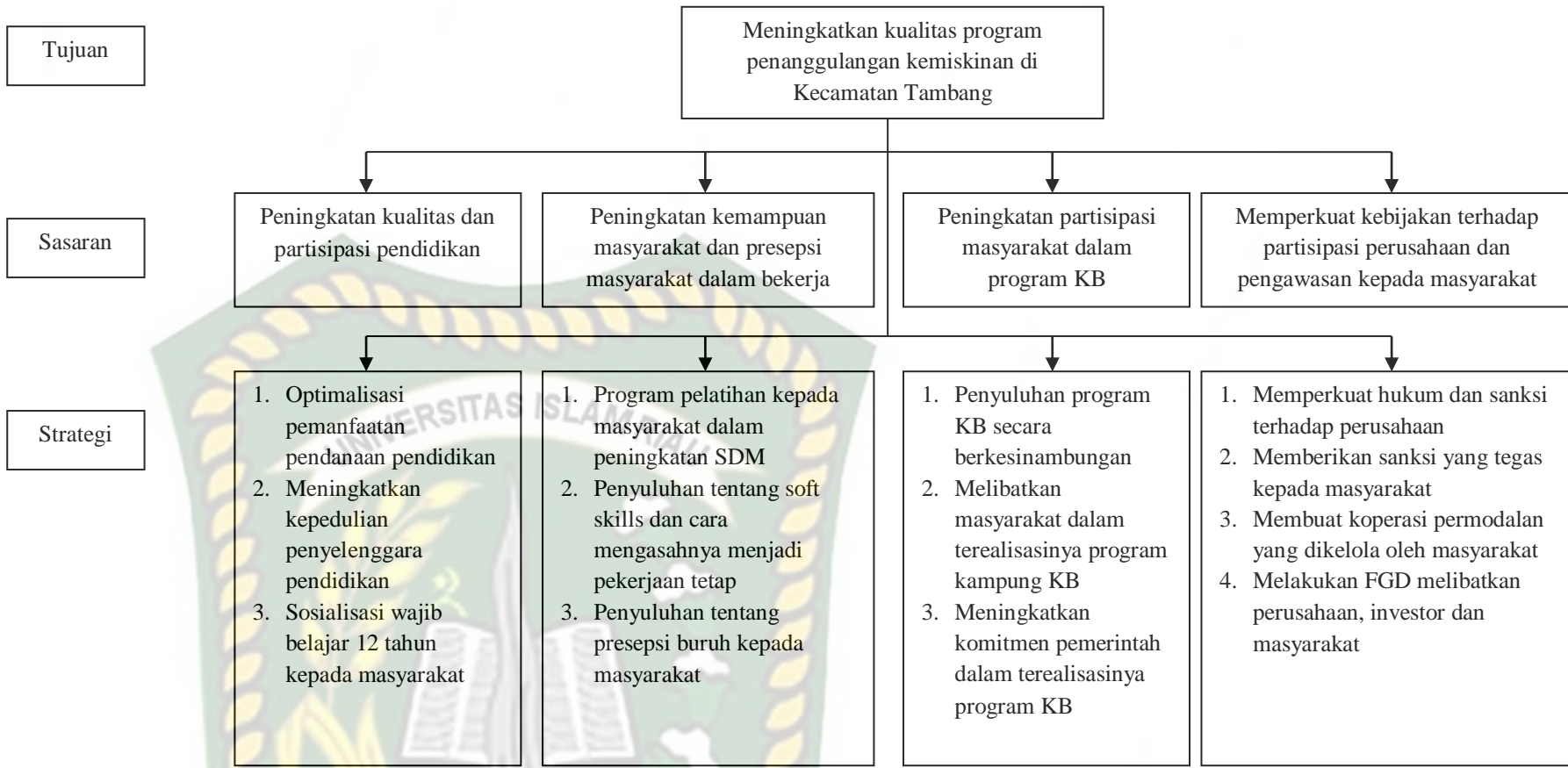
- A. Peningkatan kualitas dan partisipasi pendidikan. Dengan strategi sebagai berikut :
 1. Optimalisasi pemanfaatan pendanaan pendidikan yang tepat sasaran dan menyeluruh.

2. Meningkatkan kepedulian penyelenggara pendidikan terhadap masyarakat miskin.
 3. Sosialisasi kepada masyarakat pemahaman terhadap wajib belajar 12 tahun.
- B. Peningkatan skill serta keahlian masyarakat dalam bersaing didunia kerja dan mengubah persepsi atau cara pandang masyarakat terhadap pekerjaan buruh. Dengan strategi sebagai berikut :
1. Memberikan program pelatihan secara menyeluruh kepada masyarakat dalam meningkatkan kualitas SDM.
 2. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang soft skills dan cara mengasahnya menjadi sebuah pekerjaan yang tetap.
 3. Melakukan penyuluhan tentang “hakikat buruh atau pekerja lepas” dengan tujuan mengubah presepsi masyarakat.
- C. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan program keluarga berencana. Dengan strategi sebagai berikut :
1. Penyuluhan program keluarga berencana secara berkesinambungan dengan melibatkan kader, tokoh pemuka masyarakat, dan tenaga pendidik yang mampu memberikan pendekatan kepada masyarakat tentang pentingnya program keluarga berencana.
 2. Melibatkan masyarakat yang ikut serta dalam program keluarga berencana untuk mengajak masyarakat yang belum berpartisipasi untuk terealisasinya Kampung KB.
 3. Meningkatkan komitmen pemerintah untuk terealisasinya program keluarga berencana guna menekan laju pertumbuhan penduduk.

D. Memperkuat kebijakan terhadap partisipasi perusahaan dalam berkontribusi kepada masyarakat dan meningkatkan pengawasan terhadap masyarakat yang melakukan intervensi kepada perusahaan yang bermitra dengan masyarakat. Dengan strategi sebagai berikut :

1. Memperkuat hukum dan sanksi terhadap perusahaan yang tidak mau bermitra kepada masyarakat
2. Memberikan sanksi yang tegas kepada masyarakat yang melakukan intervensi kepada perusahaan.
3. Membuat koperasi permodalan usaha yang dikelola langsung oleh masyarakat dengan pengawasan yang maksimal oleh pemerintah.
4. Melakukan FGD yang melibatkan perusahaan, investor dan masyarakat untuk terjalinnya kemitraan yang berkesinambungan.

Untuk lebih jelasnya tentang tujuan, sasaran dan strategi dalam penanggulangan kemiskinan dapat dilihat pada Gambar 5.3 berikut:



Sumber: Hasil Analisis, 2019

Gambar 5.3 Diagram Pohon Tujuan, Sasaran, dan Strategi

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dalam studi penelitian strategi penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Tambang, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

a. Analisis Karakteristik Kemiskinan di Kecamatan Tambang

Hasil analisis mengenai karakteristik kemiskinan berupa kesehatan, pendidikan dan standar hidup masih dijumpai beberapa masalah. Untuk kesehatan, penolong persalinan di Kecamatan Tambang sudah dibidang terfasilitasi dengan baik, angka partisipasi vaksinasi di Kecamatan Tambang sudah tinggi namun masih ada beberapa masyarakat yang tidak peduli terhadap pentingnya program vaksinasi, dan untuk jaminan kesehatan program Kartu Indonesia Sehat yang diperuntukan untuk masyarakat miskin sudah berjalan walaupun masih ada beberapa masalah. Dari segi pendidikan angka partisipasi sekolah untuk anak usia sekolah terkini cukup tinggi, namun masih ada beberapa anak yang putus sekolah dikarenakan tidak mampu memenuhi biaya pendidikan. Yang menjadi masalah didalam pendidikan ialah rendahnya tingkat pendidikan kepala rumah tangga, terutama masyarakat miskin. Dan untuk standar hidup berupa sanitasi, air minum, jaringan listrik dan kondisi rumah di Kecamatan Tambang masih mengalami berbagai masalah yang cukup signifikan.

b. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kemiskinan di Kecamatan Tambang

- Hasil pengujian dengan SPSS diperoleh untuk variabel X_1 (status pekerjaan) diperoleh nilai t hitung 3,425 dengan menggunakan batas signifikansi 0,05 maka pada status pekerjaan sebesar $3,425 > 0,05$. Atas dasar perbandingan tersebut, maka H_0 ditolak H_1 diterima, dan jika terjadi hal seperti ini maka variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan antara status pekerjaan terhadap kemiskinan di Kecamatan Tambang.
- Hasil pengujian dengan SPSS diperoleh untuk variabel X_2 (pendapatan perbulan) diperoleh nilai t hitung 1,455 dengan menggunakan batas signifikansi 0,05 maka pada status pekerjaan sebesar $1,455 > 0,05$. Atas dasar perbandingan tersebut, maka H_0 ditolak H_1 diterima, dan jika terjadi hal seperti ini maka variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan antara pendapatan perbulan terhadap kemiskinan di Kecamatan Tambang.
- Hasil pengujian dengan SPSS diperoleh untuk variabel D_1 (tingkat pendidikan) diperoleh nilai t hitung 3,030 dengan menggunakan batas signifikansi 0,05 maka pada status pekerjaan sebesar $3,030 > 0,05$. Atas dasar perbandingan tersebut, maka H_0 ditolak H_1 diterima, dan jika terjadi hal seperti ini maka variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan antara tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di Kecamatan Tambang.
- Hasil pengujian dengan SPSS diperoleh untuk variabel D_2 (Jumlah Tanggungan keluarga) diperoleh nilai t hitung -2,135 dengan menggunakan batas signifikansi 0,05 maka pada status pekerjaan sebesar $-2,135 > 0,05$. Atas dasar perbandingan tersebut, maka H_0 ditolak H_1 diterima, dan jika terjadi hal seperti ini maka variabel bebas mempunyai

pengaruh yang signifikan antara Jumlah Tanggungan keluarga terhadap kemiskinan di Kecamatan Tambang.

- Hasil pengujian dengan SPSS diperoleh untuk variabel D_3 (modal usaha) diperoleh nilai t hitung 3,175 dengan menggunakan batas signifikansi 0,05 maka pada status pekerjaan sebesar $3,175 > 0,05$. Atas dasar perbandingan tersebut, maka H_0 ditolak H_1 diterima, dan jika terjadi hal seperti ini maka variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan antara keterbatasan modal kemiskinan di Kecamatan Tambang.

c. Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Tambang

Strategi dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Tambang dilakukan dengan berbagai cara yakni dengan melakukan peningkatan kualitas dan partisipasi pendidikan, Peningkatan *skill* serta keahlian masyarakat dalam bersaing didunia kerja dan mengubah persepsi atau cara pandang masyarakat terhadap pekerjaan buruh, Peningkatan partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan program keluarga berencana, danmemperkuat kebijakan terhadap partisipasi perusahaan dalam berkontribusi kepada masyarakat dan meningkatkan pengawasan terhadap masyarakat yang melakukan intervensi kepada perusahaan yang bermitra dengan masyarakat.

6.2 Saran

- a. Kepada pemerintah baik ditingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan kecamatan agar mampu bekerjasama didalam upaya penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran dan menyeluruh.
- b. Kepada pihak swasta diharapkan mampu berkontribusi dalam membantu pihak pemerintah dan bermitra kepada masyarakat agar program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan semestinya sehingga angka kemiskinan semakin tahun semakin berkurang.
- c. Kepada masyarakat yang terlibat didalam program penanggulangan kemiskinan dan bahkan menjadi penerima manfaat dari program-program kemiskinan diharapkan mampu mendukung setiap program yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta, sehingga tidak ada lagi intervensi yang dilakukan masyarakat yang akan berakibat pada keberlanjutan suatu program, dan masyarakat diharapkan mampu mengawasi jalannya program penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran dan menyeluruh.
- d. Dalam menyelesaikan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menyempurnakan penelitian ini dan dapat menjadi referensi di dalam menyusun skripsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adler, & Rodman. (1991). *Understanding Human Communication*. New York : Rinehart and Winston.
- Ala. (1981). *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan* . Yogyakarta: Liberty.
- Allen, & Chambers. (1998). Sedimentation in the Modern and Miocene. *Indonesian Petroleum Association*, 236.
- Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 233. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Cetakan ke 7. Diponegoro
- Anderson. (1979). *Petunjuk Kesehatan Modern*. Bandung: Indonesia Publishing House.
- Anwar, S. (2009). *Pemahaman Individu, Observasi, Checklist, Interview, Kuisisioner dan Sosiometri* . Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Arikunto. (2002). *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Dadan, H. (2009). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Firdaus, (2006). *Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pengembangan Komoditas Pertanian Potensial Di Kabupaten Kuantan Singingi*, Institut Pertanian Bogor. Tidak dipublikasikan
- Frak, A. G. (1984). *Sosiologi Pembangunan dan Keterbelakangan*. Jakarta : Pustaka Pulsar.
- Friedmann. (1974). *The Absorbtion of Labour in The Urban*. New Jersey : Prentice-Hall Inc.
- Ghozali, I. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: UNDIP.
- Hall, A., & Midley, J. (2004). *Social Policy For Development*. London: Sage Publication, Ltd.
- Harsiwi, R., & Setyono, J. (2015). Tingkat Kerentanan Ekonomi Wilayah Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Teknik PWK Vol 4*, 578-591.

- Hartati, E. S. (2017). *Menuju Ketangguhan Ekonomi: Sumbang Saran 100 Ekonomi*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Hartomo, & Aziz. (1999). *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Herlianto. (1997). *Urbanisasi Pembangunan dan Kerusakan Kota*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Kartasasmita. (1996). *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta : CIDES.
- Komalasari, G., Wahyuni , E., & Karsih . (2011). *Teori dan Teknik Konseling*. Jakarta: Indeks.
- Kuncoro, A. (2001). *Cara Menggunakan dan Memaknai Analisis Asumsi Klasik* . Bandung: Alfabeta .
- Levitan, S. A. (1980). Program in Aid of the Poor for the 1980's. *Policy Studies in Employment and Welfare, Fourth Edition*, 50-62.
- Lewis, O. (1966). *Kebudayaan Kemiskinan dalam Parsudi Suparlan (ed.)*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Marzuki. (2005). *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Mitlin, David Satterthwhite. (2012). *Urban Poverty in the Global South*. New Delhi. Asian Development Bank.
- Moeljarjo Tjokroaminoto. (1995). *Politik Pembangunan Sebuah Analisis, Konsep Arah dan*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Nadzir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Karya Salemba.
- Natalia, M., & Alis, M. (2014). Kajian Kemiskinan Pesisir di Kota Semarang (Studi Kasus: Kampung Nelayan Tambak Lorok). *Jurnal Teknik PWK Vol, 3*, 50-59.
- Nursalam. (2003). *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian IlmuKeperawatan Pedoman Skripsi, Tesis dan Instrumen Penelitian Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Renggapratiwi, A. (2009). Kemiskinan Dalam Perkembangan Kota Semarang: Karakteristik dan Respon Kebijakan. *Jurnal Master Program in Urban and Regional Planning Vol, 3*, 41-46.

- Riduwan. (2014). *Metode & Teknik Penyusunan Proposal Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Ritonga, H. (2003). *Perhitungan Penduduk Miskin*. Jakarta: Badan Pusat Statistik .
- Sairin, S. (2002). *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia: Perspektif Antropologi*. . Jakarta: Pustaka Belajar.
- Salim, E. (1989). *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Mutiara Sumber.
- Salim, M. (1984). *Pendidikan Anak Tuna Rungu*. Jakarta: Depdikbud.
- Salman, R. (2018). *Kajian Sosial Ekonomi Rumah Tangga Miskin di Perkotaan*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.
- Sangadji. (2010). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: ADI.
- Sekaran, U. (2006). *Metode Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soetrisno, L. (1999). *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta : Kanisius .
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta .
- Sukirno, S. (2000). *Makroekonomi Modern*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada .
- Sumodiningrat, G. (1998). *Membangun Ekonomi Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Belajar 1998.
- Suparlan, P. (2004). *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Suryandari, A. N. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi DIY. *Pendidikan Ekonomi, Vol. 7, Nomor 1*, 33-35.
- Suryawati. (2004). *Teori Ekonomi Makro*. Yogyakarta: Jarnasy.
- Suryawati, C. (2005). *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*. Semarang : Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Magister Ilmu Kesehatan .
- Winoto, G. (2006). Pola Kemiskinan di Permukiman Nelayan Kelurahan Dompok Kota Tanjungpinang . *Jurnal Master Program in Urban and Regional Planning Vol, 2*, 156-161.
- World, B. (1990). *Indonesia: Poverty Assesment and Strategy Report*. Washington: Country Department III East Asia and Pacific Region.